

346.0482
Hu2

p 4

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH
MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI
[KHUSUSNYA PADA PENGRAJIN MEBEL UKIR DI KABUPATEN JEPARA]**

Program Studi
Magister Kenotariatan



Oleh
SARI NURHIDAYATI
B4B 000 182

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
Januari, 2003**

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH
MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI
[KHUSUSNYA PADA PENGRAJIN MEBEL UKIR DI KABUPATEN JEPARA]**

Program Studi
Magister Kenotariatan



Oleh
SARI NURHIDAYATI
B4B 000 182

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
Januari, 2003**

TESIS
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH
MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI
[KHUSUSNYA PADA PENGRAJIN MEBEL UKIR DI KABUPATEN JEPARA]

Disusun Oleh

Sari Nurhidayati
B4B 000 182

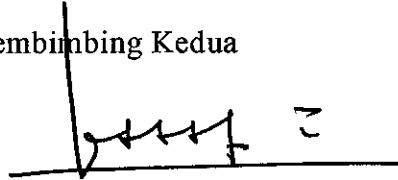
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 3 Januari 2003
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui
Komisi Pembimbing

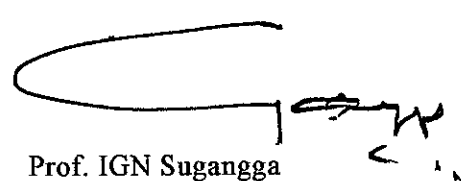
Pembimbing Utama


Etty Susilowati, SH, MS

Pembimbing Kedua


Budi Santoso, SH, MS

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Prof. IGN Sugangga

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tak terhingga, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan petunjukNya jualah penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **"Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Perlindungan Hukum Atas Desain Industri [Khususnya Pada Pengrajin Mebel Ukir di Kabupaten Jepara]."**

Tesis ini dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada Ibu Etty Susilowati, SH, MS dan Budi Santoso, SH, MS yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, perhatian, dan sumbangan pemikirannya yang sangat berharga bagi penyelesaian tesis ini.

Tidak lupa ucapan terimakasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Prof. IGN. Sugangga, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para bapak, ibu dosen yang telah memberikan ilmunya pada penulis, dan para penguji yang akan berkenan menguji tesis ini, serta para staf tata usaha dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Program Magister Kenotariatan angkatan 2000, serta rekan-rekan sahabat dan "adik-adikku" yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, juga para responden yang telah meluangkan waktunya dalam membantu pada saat penulis melakukan penelitian.

Akhirnya, terima kasih juga penulis sampaikan pada Ayah, Bunda, adikku semata wayang serta calon suamiku kelak yang penuh kesabaran memberikan bantuan dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis sangat menyadari tesis yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, semua kritik dan saran bagi kesempurnaan tesis ini akan diterima dengan tulus dan kerendahan hati.

Teriring doa, semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang setimpal darinya. Semoga tesis sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Desember 2002.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
 I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
A. Usaha Kecil Menengah Pada Umumnya.....	19
1. Usaha Kecil Menengah Dalam Sistem Ekonomi Nasional...	19
2. Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil Menengah.....	25
3. Problema Umum Usaha Kecil Menengah dan Sasaran Pemberdayaan.....	31
4. Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah.....	52
5. Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah	59
6. Konsep Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.....	63
B. Desain Industri Pada Umumnya.....	66
1. Sejarah Hak Desain Industri dan Perkembangannya di Indonesia.....	66
2. Pengaturan dan Ruang Lingkup Pengertian Desain Industri.....	77
a. Pengaturan.....	77
b. Ruang Lingkup dan Pengertian Desain Industri.....	84
3. Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya	93
4. Desain Industri Ditinjau dari Aspek Hukum Publik dan Dan Hukum Privat.....	97

C. Perlindungan Hukum Desain Industri	101
1. Perlunya Perlindungan Hukum.....	101
2. Perlindungan Desain Industri dari Hak Cipta ke Undang-Undang Desain Industri.....	108
3. Perlindungan Hukum melalui UU No. 31 Tentang Desain Industri pada Industri Mebel Ukir.....	114
a. Pemeriksaan Formalitas	118
b. Pemeriksaan Substantif.....	119
4. Penegakan Hukum atas Pelanggaran Desain Industri.....	123
D. Usaha Kecil Menengah dan Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Desain Industri	129
III. METODOLOGI PENELITIAN	132
A. Metode Pendekatan	132
B. Spesifikasi Penelitian.....	134
C. Populasi dan Sampling.....	135
D. Lokasi Penelitian.....	137
E. Teknik Pengumpulan Data.....	138
F. Alat Pengumpulan Data.....	138
G. Analisa Data.....	139
H. Jadwal Penelitian.....	139
I. Sistematika Tesis.....	140
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	142
A. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Perlindungan Hukum Desain Industri di Kabupaten Jepara.....	142
1. Demografi Kabupaten Jepara – Jawa Tengah	142
2. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Potensi Usaha Kecil Menengah Pengrajin Mebel Ukir di Jepara	145
3. Perlunya Perlindungan Hukum Desain Industri pada Desain Mebel Ukir Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.....	156
4. Perlindungan Hukum Desain Industri Mebel Ukir berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000.....	172
a. Lingkup perlindungan/Syarat Untuk mendapat Perlindungan Hukum Desain Industri.....	176
b. Sistem Perlindungan.....	178
c. Jangka Waktu Perlindungan.....	178
B. Faktor-Faktor yang menghambat dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Mebel Ukir di Kabupaten Jepara	185

1. Faktor Internal.....	185
2. Faktor Eksternal.....	189
3. Beberapa Alternatif/Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri Mebel Ukir.....	192
V. PENUTUP.....	209
A. Kesimpulan.....	209
B. Saran	211
DAFTAR PUSTAKA	213

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Perkembangan Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga [Mebel Ukir] di Jepara	158
2.	Peran Bank Swasta/Pemerintah dalam Pemberian Modal Usaha	165
3.	Sosialisasi Desain Industri	168
4.	Perlunya Perlindungan Desain Industri	170
5.	Cara Pembuatan/Penciptaan Desain Industri Mebel	172

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1.	Surat Rekomendasi Research/Survey
2.	Jumlah Permohonan Desain Industri UKM dan Non UKM
3.	Perkembangan Nilai Produksi Sektor Industri Di Kabupaten Jepara
4.	Proses Pendaftaran Desain Industri
5.	Klasifikasi Desain Industri Berdasarkan " <i>Locarno Agreement</i> "

ABSTRAK

Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah [UKM] untuk selanjutnya penulis akan menggunakan singkatan ini untuk penyebutan Usaha Kecil Menengah, di semua bidang seperti yang termaktub dalam UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual [Desain Industri] menjadi hal yang sangat penting dan mendesak, mengingat keberadaan UKM memiliki potensi yang besar jika dibandingkan dengan Usaha yang berskala besar di Indonesia, yang pada akhirnya keberadaan UKM akan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian bangsa.

Pemberdayaan UKM melalui perlindungan hukum Desain Industri, pada pelaksanaannya merupakan hal yang baru karena, keberadaan UU Desain Industri No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang baru disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 30 Desember Tahun 2000.

Dengan pendaftaran Desain Industri akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap desain dari produk yang dihasilkan, yang selanjutnya Perlindungan hukum terhadap Desain Industri diharapkan UKM akan lebih dapat diberdayakan. Kabupaten Jepara memiliki potensi UKM dan potensi Desain Industri yang cukup besar, untuk itu pemberdayaan UKM melalui perlindungan hukum terhadap Desain Industri, seharusnya mendapat prioritas yang maksimal dari pemerintah daerah.

Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam [secara yuridis empiris, kualitatif yang dibantu dengan data kuantitatif], upaya pemberdayaan UKM melalui perlindungan hukum Desain Industri khususnya pengrajin mebel ukir di Jepara, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan UKM melalui perlindungan Desain Industri perlu dilakukan penelitian.

Dari hasil penelitian terhadap responden, dapat diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa:

1. Pemberdayaan UKM melalui perlindungan Hukum Desain Industri di Kabupaten Jepara khususnya Desain Industri mebel ukir belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari Pemerintah Daerah, jika dibandingkan dengan upaya pemberdayaan UKM di bidang lainnya [SDM, Manajemen, Permodalan, Akses terhadap teknologi, Distribusi dan pemasaran Produk, Kemitraan, Sarana dan Prasarana pendukung Usaha Kecil]
2. Faktor-faktor dominan yang menghambat para pengusaha/pengrajin mebel di Kabupaten Jepara dalam upaya pemberdayaan UKM melalui perlindungan hukum terhadap Desain Industri adalah disebabkan karena antara lain *Satu*, para pengusaha kecil Menengah belum mengetahui pemahaman tentang Desain Industri. *Dua*, belum mengerti dan memahami memafaat secara ekonomis dan yuridis dari pendaftaran hak atas Desain Industri yang mereka ciptakan. *Tiga*, kurangnya sosialisasi tentang Desain Industri dari Pemerintah Daerah dan berbagai pihak yang terkait. *Empat*, Pengaruh konsep budaya [komunal] yang melekat pada konsep berpikir Usaha Kecil Menengah.

ABSTRAC

UU No 9, 1995, Small Industries Act, talk about Empower for the small industries on the some programs are important things and urgently, include the Intellectual Property Rights [IPR] subject in this case we have Industrial Design. The small industries have the good prospect, when we compered with big industris in Indonesia, at list the existence of a small industries can give the real contribution for the Gross National Product.

Empower of a small industries by the law protection is a new issues in Indonesia because the government have Industrial Design Act since December, 30, 2000

Registration of Industrial Design, can give the law protection for the design product, and then this situation will give conducive effect to empower for small industries. Acoording this case, empower for smaal industries with the law protection of Industrial Design, distric government should be give priority.

Details for this research is to learn about that case and analise for the barrier factor, of empower program for small industries in Industrial Design Subject with qualitative and quantitative data.

Details are:

1. District Government aren't give the suported fer the empower for small industries by the law protection of Industrial Design.
2. Dominant barrier factor of empower program for small industriesin Industrial Design Subject are: *First*, the small and medium industries didn't have enough knowladge abuot Industrial Design. *Second*, they didn't understand about the economic, and juridical benefity of Industrial Design Regristation. *Third*, the socialization of Industrial Design by government district and related institution. *Fourth*, influence of cultural conception [communal] that have of small and medium indusrties

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional pada masa Orde Baru berorientasi pada pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sebagaimana tergambar pada konsep pembangunan pemerintahan orde baru yang dikenal dengan Trilogi pembangunan, terdiri dari stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerintahan orde baru nampaknya telah berhasil dengan baik, sejak Pelita I sampai Pelita V, kurun waktu 25 tahun [1969-1994] pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,8 % per tahun, tetapi dalam praktek pelaksanaannya keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,8 % per tahun, ternyata tidak diikuti dengan pemerataannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Hanya kelompok tertentu saja yang diuntungkan dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.

Kelemahan kebijakan ekonomi nasional yang terlalu mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi, antara lain adalah terlalu menggantungkan pembangunan ekonomi pada kelompok usaha besar [konglomerat], mengabaikan potensi usaha kecil dan industri rumah tangga serta



partisipasi masyarakat luas, mobilitas kegiatan para konglomerat sangat tinggi menguasai ekonomi hulu sampai hilir dan keberadaan mereka dalam menguasai dunia usaha cenderung mengabaikan keberadaan Usaha Kecil Menengah.

Dampak negatif dari kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan ekonomi, antara daerah pusat kekuasaan dan daerah yang jauh dari pusat kekuasaan atau terpencil, antara sektor ekonomi, antara sesama pelaku usaha [usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha besar]. Kelemahan itu semakin terlihat ketika negara kita mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, yang diikuti dengan krisis ekonomi nasional, sosial politik dan pada akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, hampir seluruh sektor perekonomian nasional mengalami keterpurukan, dikarenakan para pengusaha besar yang berorientasi pada industri teknologi tinggi mengalami keadaan jalan di tempat, dan kerugian besar karena terlalu menggantungkan pada bahan baku impor, juga dikarenakan beban hutang luar negeri yang telah jatuh tempo dan harus dibayar.

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997, Usaha Kecil Menengah ternyata justru mampu bertahan dibanding perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar¹. Tabah dan tahan banting demikian

¹ Ade F Siregar, *Upaya Membantu Usaha Kecil Memperluas Jaringan Bisnis*, www.bmtlink.web.id, 2001, hal 1

kondisi gambaran sektor Usaha Kecil Menengah di Indonesia yang kini sedang gencar-gencarnya memperoleh perhatian khusus dari pemerintah dan berbagai media dengan berita restukturisasi hutangnya, bahkan sekarang pihak bank baik swasta/negeri mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada Usaha Kecil Menengah, karena sebelumnya pihak bank hanya melihat sebelah mata pada Usaha Kecil Menengah².

Usaha Kecil Menengah di masa mendatang merupakan salah satu bisnis efisien, sehingga lebih mampu bertahan dalam menghadapi pasar global, untuk itulah banyak negara berkembang dan negara maju sekalipun, tidak akan pernah mematikan jenis usaha ini.³

Dari zaman orde baru sampai pada saat ini keberadaan Usaha Kecil Menengah sangatlah memperhatikan, keberadaanya hanyalah sebagai alat bagi pihak-pihak yang merasa memiliki dan berharap akan adanya kepentingan yang bisa diambil dari ketidak berdayaan Usaha Kecil Menengah . Berita restukturisasi hutang bagi para usaha kecil menengah dirasakan memang penuh nuansa politik, tetapi dari sini sebenarnya bisa dirasakan bahwa nasib Usaha Kecil Menengah masih terbatas pada meja seminar dan simposium.

² Suara Merdeka, *Kini Perbankan "Memanjakan" UKM*, 21 September 2002, hal 12

³ Warjono, *Beberapa upaya pengembangan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi pada pengusaha kecil*, Gema Stikubank, Desember 1996, hal 56

Fakta di atas memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak diikuti dengan keikutsertaan masyarakat secara luas serta mengabaikan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan adalah kemajuan ekonomi yang hanya merupakan fatamorgana. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan keadilan ekonomi kepada masyarakat luas, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Keadaan seperti ini tidak bisa terus dibiarkan terus menerus mengingat pelaksanaan *Free Trade Area [AFTA]*⁴ sudah tidak bisa ditunda lagi tahun depan, untuk itu semua komponen usaha termasuk Usaha Kecil Menengah harus siap bersaing dengan dunia luar.

Dari pemahaman tersebut di atas kita harus segera mengubah orientasi pembangunan ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan memberi peluang partisipasi dari semua unsur masyarakat dan memberdayakan potensi ekonomi kerakyatan dalam hal ini Usaha Kecil Menengah.

Masalah pemberdayaan Usaha Kecil Menengah merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga tidak berlebihan jika diaktakan bahwa permasalahan yang ada bersifat multidimensional, tidak hanya sekedar perlu dilakukan pendekatan ekonomi tetapi juga diperlukan pendekatan non ekonomi. Dari berbagai kebijakan yang ini merupakan

⁴ Isworo Laksmi, *UKM Bali Diuntungkan oleh Ketenarannya*, www.Kompas.com.id, 3 Maret 2002 hal 1

itikat baik dari pemerintah yang menyangkut pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan hukum bagi para Usaha Kecil Menengah dimulai dari kebijakan perkreditan di sektor perbankan, koperasi, pola anak-bapak angkat, Perkebunan Inti Rakyat [PIR], program Inpres Desa Tertinggal [IDT], Modal Ventura, dirasakan kurang bisa mengakomodasi permasalahan yang ada dan beragam dikarenakan semua kebijakan-kebijakan tersebut di atas memerlukan persyaratan dan birokrasi yang sangat kompleks untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

Dalam salah satu tulisannya Faisal Basri menyebutkan bahwa agar permasalahan bisa ditempatkan di dalam kerangka utuh bagi terwujudnya suatu pembaruan ekonomi yang mendasar, maka diperlukan suatu landasan pijak yang kokoh dan kerangka pemikiran komprehensif yang memayunginya⁵. Dengan cara ini diharapkan bisa ditemukan sumber-sumber permasalahan yang sebenarnya, sehingga cara-cara penyelesaiannya pun lebih terstruktur, karena sekarang ini penyelesaian permasalahan yang menyangkut Usaha Kecil Menengah terkesan tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.

Penyelesaian masalah Usaha Kecil Menengah selama ini tidak dilakukan melalui pendekatan kelompok atau penguatan *cluster*⁶, padahal

⁵ Faisal Basri, "*Nestapa UKM Jangan Cuma Sekedar Retorika Politik*", www.kompas.com.id, 3 Maret 2002, hal 2

⁶ Erlangga Satriagung, *JICA Bantu Berdayakan 10 Cluster UKM*, www.bmtlink.web.id, 2001, hal 2

permasalahan usaha kecil dan menengah ini sangat beragam, upaya pemerintah dalam menghidupkan kembali iklim usaha melalui kelompok tetap tidak akan berhasil jika pembinaan yang dilakukan masih menggunakan pola secara umum dan tidak per *cluster*.

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, atau lebih populer dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, pada dasarnya merupakan perwujudan dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang universal, yaitu menjadikan manusia sebagai subyek pembangunan, dengan otonomi sebagai titik tolaknya⁷.

Alasan dari pentingnya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dalam proses pembangunan ekonomi nasional antara lain adalah Usaha Kecil Menengah lebih banyak menyerap sumber daya lokal tenaga kerja maupun bahan baku produksi, adanya hal yang mendesak menciptakan struktur ekonomi nasional, Usaha Kecil Menengah merupakan kelompok usaha terbesar di Indonesia dan tersebar di seluruh pelosok negeri sehingga memiliki peran strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan.

Jumlah Usaha Kecil Menengah yang sangat besar jika dibandingkan pengusaha yang termasuk kategori pengusaha besar⁸ yaitu sampai pada tahun 2001 Usaha Kecil Menengah berjumlah 40.195.516 sedangkan jumlah

⁷ Faisal Basri, *Op.cit*, hal 1

⁸ Kompas, *Sampai kapan UKM Teraniaya....?*, Rabu 6 Maret 2002, hal 10

pengusaha besar hanya sekitar 2.095. Dengan perbandingan jumlah ini, Usaha Kecil Menengah merupakan aset bagi Indonesia untuk segera keluar pada masa krisis ini. Usaha Kecil Menengah terbukti mampu memberi kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi nasional. Saat ini sekitar 80 persen lapangan kerja disediakan oleh 36 juta Usaha Kecil Menengah yang tersebar di seluruh Indonesia⁹.

Pengembangan usaha kecil di masa krisis menjadi suatu yang sangat strategis, yang dalam pengembangannya dihadapkan pada banyak kendala yang harus dihadapi, hal ini bisa dipahami bahwa terdapat karakteristik dari Usaha Kecil Menengah sendiri yang terkadang menghambat pengembangan dari usaha dan keberadaan mereka sendiri. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah maka sejak tahun 1995, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, tepatnya pada tanggal 26 Desember 1995 yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No 74.

Dari hal tersebut diatas bisa dikatakan bahwa masalah yang ada yang berkaitan dengan Usaha Kecil Menengah merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, sehingga tidak hanya diperlukan pendekatan ekonomi tapi juga non ekonomi, adapun masalah aspek hukum yang ada

⁹ Suara Merdeka, *Dijadikan Komoditi Politik, CDSMEs Tawarkan bantuan*, 29 Oktober 2001, hal 6

antara lain meliputi masalah yang berkaitan dengan aspek perangkat hukum yang secara jelas melandasi upaya pemberdayaan dalam arti seluas-luasnya seluruh kegiatan Usaha Kecil Menengah, masalah ini terasa semakin penting terutama bila dikaitkan dengan kenyataan yang ada hingga saat ini, yaitu bahwa peraturan-peraturan yang digunakan sebagai pembinaan dan pengembangan usaha kecil selama ini dirasakan kurang mencukupi dan tidak terkoordinasi¹⁰, aspek hukum perbankan, aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Desain Industri inilah yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis, aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat mendalam dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi Usaha Kecil Menengah.

Dalam praktek dunia usaha hal ini merupakan etika bisnis dalam usaha Usaha Kecil Menengah memasuki era perdagangan bebas. Sebab, tidak hanya kemampuan bersaing yang dituntut, namun juga kemampuan memahami etika bisnis. Bahkan salah satu pejabat pemerintah mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu etika bisnis penting yang perlu diketahui Usaha Kecil Menengah selain hak asasi manusia¹¹.

¹⁰ Marulak Pardede, *Aspek Hukum Pemberdayaan Pengusaha Kecil*, Newsletter No 41/VI/Juni/2000, hal 12

¹¹ *Restrukturisasi Kredit UKM untuk yang Berpotensi Usaha, Pemotongan Utang adalah Ongkos Krisis*, www.bmtlink.web.id, 2001, hal 3

Selama ini aspek Hak Kekayaan Intelektual, dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi Usaha Kecil Menengah dirasakan kurang atau bahkan terlewat dari perhatian pemerintah. Pada sisi lain kemampuan dalam memahami aspek ini sangat penting, dikarenakan sebuah Usaha Kecil Menengah akan terus membuat desain-desain yang terbaik dibuat dengan proses kreatifitas yang panjang serta pemikiran yang mendalam. untuk memenuhi selera pasar dan meningkatkan daya saing bagi produk yang dihasilkannya.

Desain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk yang banyak dipasarkan. Konsumen dalam beberapa hal lebih tertarik membeli sebuah produk karena desain yang menarik daripada kegunaan dari produk tersebut, tidak jarang pula konsumen harus membayar mahal suatu barang produk karena desain sebuah produk yang langka dan memerlukan proses penelitian yang mendalam sebelumnya, dengan demikian desain dapat dijadikan sebagai daya saing perusahaan/pengusaha dalam persaingannya dengan pihak lain dalam kelas sejenis¹².

Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum yang memiliki kepastian hukum yang pasti untuk melindungi desain-desain tersebut agar desain tersebut tidak ditiru atau dijiplak oleh pihak-pihak yang memiliki

¹² Budi Santosa, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, *Perlindungan Atas Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 4 Oktober 2000, hal 1

itikat buruk yang pada akhirnya hal ini akan memberikan rasa aman sebagai salah satu aset perusahaan.

Produk-produk yang dihasilkan oleh para pengusaha khususnya bagi para Usaha Kecil Menengah sebenarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam aspek perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual [*Intellectual Property Rights*], khususnya Desain Industri, karena diperlukan pemikiran yang panjang sehingga bisa dihasilkan sebuah produk yang berkualitas serta bermanfaat.

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan menjamin perlindungan hak pendesain serta menetapkan hak dan kewajiban dari adanya perlindungan Desain Industri, dengan perlindungan Desain Industri ini khususnya bagi Usaha Kecil Menengah akan memberikan perlindungan hukum yang pasti dari pihak-pihak lain yang tidak memiliki hak dan itikat baik, untuk tidak mensalahgunakan Desain Industri tersebut, seperti penjiplakan, pembajakan, peniru ataupun tindakan melawan hukum lainnya.

Berdasarkan pemahaman hal tersebut diatas perlindungan hukum Desain Industri mutlak diperlukan dan diatur dengan tegas dalam perundang-undangan. Maka pada tahun 2000 tepatnya pada tanggal 20 Desember 2000, Indonsia telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang Desain Industri yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri [UUDI No 31 Tahun 2000] yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 243, untuk selanjutnya dalam penulisan ini penulis akan menggunakan singkatan UUDI No 31 Tahun 2000 untuk penyebutan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Namun keadaan yang ada dalam masyarakat khususnya para pengusaha Kecil dan Menengah tidak begitu mengetahui arti penting dari pendaftaran desain industri dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya¹³ dari masyarakat dan karakteristik Usaha Kecil Menengah sendiri, yaitu mereka akan cukup puas apabila pendapatan sudah cukup untuk menghidupi keluarga dan oleh karena itu mereka kurang berani berinovasi dan mengambil resiko.

Di dalam masyarakat sendiri sering terjadi kerancuan pemahaman dan beranggapan bahwa Desain Industri merupakan Hak Cipta, karena sebelum adanya UUDI No 31 Tahun 2000 perlindungan terhadap Desain Industri dapat tertampung dan mendapat perlindungan hukum dengan adanya Hak Cipta dalam contoh kita ambil desain motif pada kain misalnya, desain motif pada kain merupakan Hak Cipta karena unsur estetika dan seni rupa cukup dominan yang seharusnya desain tersebut merupakan Desain Industri jika telah mengalami proses produksi secara terus menerus.

¹³Prieyo Utomo, *Penilaian Dan Manajemen Desain Industrial Dalam Skala Usaha Kecil Dan Menengah* Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu Aset Perusahaan, Kerjasama Klink HaKI FH UNDIP, Bisines Forum AOTS Dosokai Indonesia dan *Japan International Cooperation Agency [JICA]*, Semarang, 6 September 2001, hal 1.

Proses industri bisa dikatakan sebagai inti dari apa yang disebut dengan Desain Industri, hal ini juga yang akan akan dikaji oleh penulis bagaimanakah posisi atau keberadaan Desain Industri setelah tidak dalam proses produksi, dimana hal ini terjadi pada saat perlindungan Hak Desain Industri belum berakhir ataupun sudah berakhir baik itu karena pengalihan ataupun sebab lainnya.

Perkembangan Hak Cipta yang telah menjadi Desain Industri memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap tindak pelanggaran pidana, pemalsuan, peniruan, pembajakan dan tindak persaingan curang lainnya., karena Hak Cipta yang telah diproduksi dalam jumlah yang banyak, maka orang akan cenderung meniru karya desain tersebut, karena karya yang asli telah memiliki tempat di pasaran. Jika karya desain tersebut telah memiliki image yang bagus di masyarakat, akan munculah *plagiator-plagiator* yang akan meniru karya produk tersebut untuk kepentingan diri sendiri dengan cara yang tidak jujur.

Tentu saja keberadaan UUDI No 31 Tahun 2000 memberikan sesuatu yang berbeda dengan perlindungan hukum melalui Hak Cipta yaitu dampak pada perlindungan hukumnya¹⁴, ketentuan dalam Hak Cipta mengenai karya cipta tidak perlu didaftarkan karena sifat dari undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap hak Cipta

¹⁴ Budi Santosa, *Loc.cit.*

lahir pada saat karya cipta tersebut lahir hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Hak Cipta yang mulai diundangkan 29 Juli 2002 sedangkan ketentuan dalam hak Desain Industri, perlindungan hukumnya lahir bila desain industri tersebut didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya Desain Industri tidak mendapat perlindungan hukum dari peniruan dari pihak lain, dikarenakan sebagian besar desain yang dipasarkan tidak dimintakan pendaftaran oleh pendesain dari Usaha Kecil dan Menengah.

Selain faktor tersebut di atas terdapat banyak faktor yang menyebabkan perlindungan desain industri dikalangan masyarakat khususnya Pengusaha Kecil dan Menengah terkesan terabaikan, yaitu antara lain faktor mahal biaya pendaftaran Desain Industri¹⁵ yaitu Rp 600.000,- dan Rp 300.000 untuk Usaha Kecil Menengah per satu desain, sedangkan untuk satu jenis usaha Usaha Kecil Menengah dalam hal ini pengrajin ukir misalnya, terdapat setidaknya ada kurang lebih 50 jenis desain. Desain industri di mata Usaha Kecil Menengah hanya dipandang sebagai obyek bentuk semata dan hanya ditilik dari bentuk fungsionalnya. Pengusaha tidak menyadari nilai ekonomis dari desain tersebut sehingga mereka tidak menganggap desain industri tersebut sebagai asset¹⁶.

¹⁵ UU Desain Industri Ancam Kelangsungan UKM Akibat minimnya Dana UKM Untuk Pendaftaran Desain Industri, www.Pikiranrakyat.com.id, 9 November 2001, hal 1

¹⁶ Prieyo Pratomo, *Loc.cit.*

UUDI No 31 Tahun 2000 menentukan syarat kebaruan [*novelty*] bagi Desain Industri yang akan diajukan permohonan pendaftaran atas Desain Industrinya. Hal ini diatur Pasal 2 ayat 1 UUDI No 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa: Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Syarat kebaruan [*novelty*] ini merupakan syarat yang berat dirasakan bagi para pengrajin dari kalangan Usaha Kecil Menengah, dikarenakan syarat kebaruan [*novelty*] ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan proses pemikiran yang panjang dan tentunya memerlukan dana yang besar untuk bisa di kategorikan desain tersebut adalah baru, hal ini tentu saja akan mengakibatkan pengajuan kepemilikan hak desain industri dari para pengusaha kecil dan menengah akan kandas ditengah jalan, yang selanjutnya akan mengakibatkan kepemilikan hak atas desain industri akan hanya dimonopoli oleh pengusaha besar.

Dari permasalahan di atas untuk itulah sampai sekarang permohonan desain Industri 14 Juni s/d 15 November 2001 untuk Usaha Kecil Menengah hanya berjumlah 0,27% sedangkan untuk non Usaha Kecil Menengah dari dalam negeri berjumlah 76,21%¹⁷, tentu saja hal ini tidak sebanding dengan jumlah Usaha Kecil Menengah yang ada saat ini.

Faktor keberadaan Desain Industri sendiri juga merupakan masalah tersendiri, bahwa sebelumnya dalam sebuah komunitas pengrajin dari sebuah

¹⁷ Jumlah permohonan Desain Industri, www.dgip.go.id, 2002, hal 1

produk desain industri para pengusaha kecil dan menengah ditemukan ratusan bahkan ribuan desain industri yang diproduksi secara massal dikarenakan sifat komunal pengrajin tersebut di atas, dan pada akhirnya tidak diketahui secara pasti desainer pertama kali yang menciptakan desain tersebut¹⁸, meskipun UUDI No 31 Tahun 2000 menentukan bahwa pendaftar pertama kali yang telah memenuhi syarat, maka pendaftar pertama kali tersebut yang memiliki hak atas Desain Industri tersebut. Hal ini akan mengakibatkan “perang” klaim atas Desain Industri maupun tuntutan peniruan Desain industri akan marak di pengadilan dan dikhawatirkan masalah ini akan menjadi masalah baru yang cukup rumit.

Permasalahan tersebut di atas juga dialami oleh para pengusaha kecil menengah pengrajin mebel ukir di Kabupaten Jepara sebagai salah satu pusat kerajinan ukir yang sudah terkenal dan memiliki potensi Usaha Kecil Menengah yang bisa dijadikan aset dan tulang punggung perekonomian bangsa, hal ini banyak terungkap dalam berbagai seminar mengenai Desain Industri, jika dikaji lebih lanjut sebenarnya banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta perlindungan Desain Industri yang pada akhirnya akan penulis kaji pada pembahasan bab berikutnya.

¹⁸ UU Desain Industri Ancam Kelangsungan UKM Akibat minimnya Dan UKM untuk Pendaftaran desain Industr, Loc.cit

Disinilah sebenarnya peran hukum menjadi dirasakan sangat penting, Menurut Soerjono Soekanto¹⁹, salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pengendalian sosial [*social control*]. Di dalam hal ini dikemukakan menurut G Sawyer maka hukum merupakan suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memahami dan mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pengrajin mebel ukir di Kabupaten Jepara melalui perlindungan Desain Industri maka, penulis berhasrat untuk menuangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul: “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Khususnya Pada Pengrajin Mebel Ukir Di Kabupaten Jepara”

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 48

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, melalui perlindungan hukum Desain Industri khususnya pada pengrajin mebel ukir di Kabupaten Jepara.
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum atas Desain Industri, khususnya bagi pengrajin mebel ukir di Kabupaten Jepara.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji lebih mendalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, melalui perlindungan hukum Desain Industri khususnya pada pengrajin mebel ukir di Kabupaten Jepara.
2. Mengkaji lebih mendalam hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum atas Desain Industri, khususnya bagi pengrajin mebel ukir di Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa data empiris, konsep, dan metode dalam pengkajian hukum dalam kaitannya dengan upaya pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum Desain Industri.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan evaluasi terhadap upaya pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta perlindungan hukum Desain Industri. Dengan di sampainya permasalahan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta perlindungan melalui perlindungan hukum Desain Industri akan mejadikan pertimbangan bagi para Usaha Kecil Menengah sendiri serta pemerintah, khususnya Kabupaten Jepara dalam mengkonseptualisasikan dan melaksanakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta perlindungan hukum Desain Industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. USAHA KECIL MENENGAH PADA UMUMNYA

1. Usaha Kecil Menengah Dalam Sistem Ekonomi Nasional

Kemandirian ekonomi nasional akan terwujud manakala seluruh potensi bangsa diikuti sertakan dan di berikan kesempatan secara baik dan optimal. Potensi ekonomi tersebut tidak hanya terletak pada level makro tetapi ditekankan lebih pada level mikro yaitu pada ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya adalah Usaha Kecil Menengah, industri rumah tangga, kerajinan rakyat dan usaha informal. Level mikro inilah yang harus diberdayakan dan dikembangkan serta diberi posisi yang layak dalam sistim ekonomi nasional.

Ketangguhan ekonomi kerakyatan jauh lebih penting karena kekuatan ekonomi yang berpusat pada satu atau beberapa kelompok tertentu sesungguhnya tak lebih dari sebuah nisbi. Sentralisasi ekonomi negara pada satu tangan cenderung membuat ekonomi dunia rentan terhadap pengaruh buruk baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.²⁰

²⁰ Ibnu Hamad, *Yang Kuatpun perlu dukungan yang Lemah, Dalam Membangun Kemandirian Indonesia: Dari Penggalan Nilai-Nilai Menuju Penataan Kelembagaan*, Forum Dialog Indonesia, Jakarta, 1995, hal 1

Kecenderungan keberpihakan kebijakan ekonomi kepada ekonomi kerakyatan [Usaha Kecil Menengah] sangat dipengaruhi oleh sistim ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Secara garis besar sistim ekonomi dunia terbagi dalam tiga sistim yaitu sistim ekonomi pasar [kapitalis] dan sistim ekonomi terencana [sosialis] dan sistim ekonomi campuran²¹.

Sistim kapitalis mempunyai ciri-ciri antara lain bahwa pemilikan swasta atau individu atas alat-alat produksi sangat dibebaskan dan berada dalam perlindungan hukum, dalam masyarakat kapitalis peralatan dan modal dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang memiliki hak untuk memepergunakannya untuk kepentingan pribadi dan pengaturan distribusi ditentukan oleh pasar, alokasi sumber-sumber ekonomi dan penggunaannya diserahkan kepada pasar termasuk untuk menentukan tingkat pendapatan di antara kelas dalam masyarakat. Kapitalis murni disandarkan pada prinsip dasar yang mewarnai kebijakan ekonomi yaitu:²²

- a. Adanya pengakuan penuh pada hak milik perorangan tanpa batas-batas tertentu. Hak Milik Individu merupakan jaminan bagi pemiliknya untuk melakukan apa saja secara bebas.
- b. Adanya pengakuan akan hak individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka menaikkan status sosial ekonominya.
- c. Adanya pengakuan akan adanya motivasi ekonomi untuk mencapai keuntungan secara maksimal
- d. Adanya pengakuan akan kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain.

²¹ P.C. Soroso.dkk, *Perekonomian Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 1997, hal 14

²² Frans Seda, *Kekuasaan dan Moral, Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996, hal 272

- e. Adanya pengakuan berlakunya hukum ekonomi pasar [mekanisme pasar] yang termanifestasikan dengan istilah *laissez faire, laissez passer*.

Pada sistem kapitalis sangat sulit diharapkan adanya kebijakan ekonomi yang memihak usaha kecil, karena proses perekonomian benar-benar kondisi tergantung dari situasi dan kondisi pasar tanpa banyak campur tangan dari pemerintah, dan hanya berfungsi sebagai wasit yang baik dalam mengawasi berlangsungnya perekonomian.

Di Indonesia sampai sekarang masih terdapat perdebatan mengenai sistem ekonomi apa yang sebenarnya di anut oleh Indonesia. Ada yang berpendapat Indonesia menganut sistem kapitalis, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa menganut sistem campuran, juga dikatakan menganut sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi sosialis Indonesia dan sistem ekonomi kerakyatan.

Ditinjau dari sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalis, hal ini sama dengan halnya untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kompetisi antara individu atau badan-badan usaha tidak dikekang namun juga tidak dilepaskan sebebas-bebasnya. Pemerintah tetap berperan untuk

mengatur sesuai dengan kebutuhannya. Penjelasan diatas mengarah pada kesimpulan bahwa sistim ekonomi yang dianut Indonesia bukan kapitalis juga bukan sosialis tetapi merupakan gabungan dari kedua sistim tersebut, yaitu sistim ekonomi campuran.

Jika dilihat bahan rujukan umum, maka secara ekstrem dikenal dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar [SEP] dan sistem ekonomi negara [SEN]. Sistim Ekonomi Pasar bersumbu pada pasar dengan minimalnya peran negara dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan Sumber Ekonomi Negara kebalikan dari Sistim Ekonomi Pasar, yaitu berpusat pada negara. Di antara dua ekstrem tersebut, muncul Sistem Ekonomi Kerakyatan [SEK], sehingga berdasar logika yang ada menjadi wajar bila banyak ahli berdebat mengenai keberadaan Ekonomi kerakyatan [EK]. Satu kelompok ahli menyebut Ekonomi Kerakyatan dekat ke sumbu pasar. Kelompok ahli lainnya menyatakan lebih dekat ke sumbu negara. Di sisi lain, kelompok ekstrem menyebut tidak ada Ekonomi Kerakyatan²³.

Posisi Usaha Kecil Menengah dalam pembangunan ekonomi nasional berada pada level terbawah setelah konglomerat, usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara [BUMN]. Stuktur ekonomi Indonesia bisa digambarkan bagaikan piramida. Bagian bawah piramida itu memiliki *barrier of entry* [hambat masuk] yang sangat rendah sehingga keuntungan

²³ UKM Ciri Ekonomi Kerakyatan, www.Kompas.com, 13 Mei 2002, hal 1

yang diperoleh sangat tipis, sehingga akumulasi modalnya sangat lambat. Kebanyakan Usaha Kecil Menengah beroperasi pada bagian bawah piramida. Sebaliknya bagian atas piramida mempunyai struktur quasi monopolistik, oligopolistik dan memiliki *barrier of entry* yang sangat tinggi. Usaha besar, BUMN, dan konglomerat beroperasi pada bagian atas piramida. *Barrier of entry* yang sangat tinggi sebagai akibat dari banyaknya kemudahan yang diberikan pemerintah seperti kredit bunga murah pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh relatif tinggi sehingga akumulasi modal berlangsung dengan sangat cepat. Perbedaan struktur dan kebijaksanaan bisnis demikian mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi berkelanjutan.²⁴

Usaha Kecil Menengah adalah subyek ekonomi sekaligus organ masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Hukum yang dibuat harus mampu melindungi kepentingan Usaha Kecil Menengah. Meskipun sudah ada beberapa Undang-Undang dan aturan lainnya secara normatif berpihak pada Usaha Kecil Menengah namun sampai pada saat ini keadaan Usaha Kecil Menengah tetap terpuruk dan tidak berdaya. Salah satu sebabnya adalah karena hukum belum ditegakan secara benar dan adil serta masih rendahnya kemauan politik dari pemerintah. Banyak program yang

²⁴ Rizal Ramli, *Transformasi Ekonomi dan Dualisme Kebijaksanaan*, Makalah Seminar, UGM Yogyakarta, 1995, hal 10

dijalankan mengalami cacat oprasional dan kurang berdampak pada pemberdayaan dan pengembangan Usah Kecil Menengah.

Praktek pembangunan ekonomi nasional merupakan potret yang berlawanan dari apa yang telah disampaikan oleh dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mengakibatkan pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu dan berkembang penggalan sebesar-besarnya yang dilakukan oleh usaha besar terhadap ekonomi kerakyatan.

Namun demikian Usaha Kecil Menengah, tetap mampu bertahan dalam kondisi badai krisis ekonomi, sebaiknya usaha besar justru yang mengalami kesulitan menjadi beban ekonomi nasional. Peran Usaha Kecil Menengah dalam menopang ekonomi cukup signifikan, bahkan dewasa ini proses pemulihan ekonomi adalah merupakan kontribusi dari mereka.²⁵ Bahkan dari sebuah hasil penelitian di satu daerah tertentu disebutkan bahwa komoditas yang potensial dan perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan indikasi potensi permintaan terhadap kredit adalah Usaha Kecil Menengah²⁶.

Kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan Usaha Kecil Menengah yang telah dijalankan selama ini dapat dikelompokkan dalam lima bidang yaitu kebijaksanaan finansial, kebijaksanaan kemitraan usaha,

²⁵ Ade F Siregar, *Op.cit*, hal 2

²⁶ Madiantono, *Identifikasi Komoditi Unggulan Produksi Usaha Kecil di Jawa Tengah*, Gema STIKUBANK, Edisi XXXI, 1 Februari 1999, hal 60

kebijaksanaan penciptaan iklim usaha sehat, kebijaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana pendukung

2. Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil Menengah

Perkembangan dunia usaha dalam proses pembangunan nasional yang berjalan selama ini, telah menempatkan para pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan, ekspor dan impor dan bentuk bisnis serta layanan jasa lainnya, terbagi dalam kelompok-kelompok yang lazimnya disebut pengusaha kecil, menengah, besar [konglomerat]. Khusus bagi kelompok Usaha Kecil dan Menengah biasanya juga disebut dengan istilah ekonomi kerakyatan. Usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha kecil memiliki karakteristik dan bentuk kelembagaan tersendiri, secara normatif terdefiniskan dalam ketentuan Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Usaha Kecil sangat banyak lapisannya, baik secara horisontal maupun vertikal. Secara umum Usaha Kecil dapat dibagi menurut sektornya, yaitu Usaha Kecil yang bergerak dalam sektor industri dan sektor perdagangan dengan segala lapisannya. Terdapat bermacam-macam pengertian mengenai Usaha Kecil Menengah²⁷ sesuai dengan sasaran pembinaan pada masing-masing lembaga yang memiliki kepentingan

²⁷ *Langkah Baru Penyelamatan si Kecil*, Tempo, 26 Mei 2002, hal 130



terhadap pembinaan Usaha Kecil Menengah. Kriteria digunakan antara lain berdasarkan modal yang dimiliki, jumlah tenaga kerja yang dimanfaatkan, teknologi yang digunakan manajemen perusahaan, badan usaha usaha, dan pajak yang dibayar pada setiap tahun pajak.

Kriteria tersebut bisa berasal dari antara lain;

- a. Undang-Undang Usaha Kecil No 9 Tahun 1995 [Pasal 5] dan PP No 5 Tahun 1995 : Usaha kecil memiliki asset maksimum Rp 200 Juta rupiah dan omset maksimum Rp 1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan Usaha menengah, memiliki asset maksimum Rp 1 miliar rupiah dan omzet maksimum Rp 10 miliar rupiah per tahun.
- b. BPPN: bahwa kredit maksimum Rp 10 miliar rupiah sebelum mencapai 31 Desember 1997, dan kredit macet sejak 1 Januari 1993 sampai 31 Desember 2000.
- c. Departemen Koperasi dan UKM: bahwa kredit maksimum Rp 5 miliar rupiah serta penghasilan usaha di bawah Rp 50 Juta rupiah per tahun.
- d. Bank Indonesia: bahwa kredit maksimum Rp 10 miliar rupiah dan penghasilan diatas 50 juta rupiah per tahun.
- e. Bank Mandiri: bahwa omset per tahun maksimum 360 miliar rupiah
- f. Badan Pusat Statistik: bahwa asset Rp 1 miliar rupiah dan maksimum kredit Rp 400 Juta rupiah.

Menurut Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil memenuhi kriteria kekayaan bersih dan penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Kriteria tersebut yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- [Dua ratus Juta Rupiah]
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- [Satu Miliar Rupiah]
- c. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia [WNI]
- d. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.

Menurut KADIN dan Asosiasi Pengusaha Kecil, yang termasuk kategori Usaha Kecil Menengah adalah:

- a. Usaha perdagangan, meliputi keagenan, pengecer, eksportir/importir dan lain-lain dengan Modal Aktif Perusahaan [MAP] tidak melebihi Rp.150.000.000,- per-tahun dan perputaran modal [Turn Over/ CTO] tidak melebihi Rp.600.000.000,-
- b. Usaha pertanian, meliputi pertanian pangan, perkebunan, perikanan darat dan laut, peternakan dan usah lain yang berada dalam ruang lingkup pengawasan dan pembinaan departemen pertanian dan dengan ketentuan MAP tidak melebihi Rp 150.000.000,- per-tahun dan CTO tidak melebihi Rp.600.000.000,-.
- c. Usaha industri meliputi industri logam, kimia, makanan dan minuman, pertambangan, bahan galian dan aneka industri kecil lainnya dengan batas MAP Rp.250.000.000,- per-tahun serta batas CTO Rp.1.000.000.000,-
- d. Usaha jasa meliputi pelayanan bagi pihak ketiga, konsultan, perencana, perbengkelan, transportasi, restoran, dan lainnya dengan batas MAP tidak melebihi Rp.150.000.000,- per-tahun dan CTO perputaran modal tidak melebihi Rp.600.000.000,-
- e. Usaha jasa konstruksi, meliputi kontraktor bangunan, kelistrikan, jembatan, pengairan, dan usah lain yang berkiatan dengan batas MAP Rp.250.000.000,- dan CTO Rp.1.000.000.000,-

Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil disebutkan bahwa:

Yang dimaksud Usaha Kecil dalam Pasal ini meliputi Usaha Kecil Informal dan Usaha Kecil Tradisional. Yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam hal ini meliputi pula Usaha Kecil Informal dan Usaha Kecil Tradisional, yang dimaksud dengan Usaha Kecil Informal adalah usaha tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedang kaki lima, dan pemulung. Yang dimaksud dengan Usaha Kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi seerhana yang telah digunakan secara turun-temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.

Batasan mengenai industri kecil menengah di Indonesia banyak mengacu pada dua klasifikasi²⁸, yaitu berdasarkan jumlah tenaga kerja dan aset yang dimiliki. Menurut Badan Pusat Statistik dalam statistik industri kecil penggolongan sektor industri dikelompokkan menjadi:

- a. Industri besar bertenaga kerja 100 orang atau lebih
- b. Industri sedang bertenaga kerja 20 s/d 99 orang
- c. Industri kecil bertenaga kerja 4 s/d 19 orang
- d. Industri rumah tangga besar bertenaga kerja 1 s/d 4 orang

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ali Maskur²⁹ di dalam salah satu tulisannya, kategori yang mendasarkan pada besar kecilnya jumlah tenaga kerja dan modal usaha yaitu:

²⁸ Hersugondo, *Pengembangan Usaha Kecil yang berdaya saing: Antara kendala dan peluang*, Gema Stikubank Edisi 31 No III/Juni 1999, hal 40

²⁹ Ali Maskur, *Penggalangan Dana, Model Institusi Syariah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan, Usaha Kecil*, Gema STIKUBANK, September 1998, Semarang, hal 44-45

- a. Usaha yang sangat kecil yang bertenaga kerja kurang dari 10 orang [umumnya tenaga kerja keluarga], tidak ada pemisahan yang jelas antara rumah tangga dan usaha, menghasilkan produk inferior, dan memasarkannya terbatas di pasar lokal bagi goongan bawah, modal kerjanya maksimum Rp 5 Juta dan belum mampu mengakumulasi modal
- b. Usaha Kecil sederhana, tenaga kerjanya maksimum bisa sampai 25 orang, sudah tidak terbatas keluarga dan sudah mulai menerapkan sistim putting out, pasarnya sudah lebi luas masih didominasi pasar lokal di dalm propinsi dan terutama golongan menengah ke bawah, sifat pemasarannya masih terpaku pada pola tradisional atau menjadi pengikut trend yang diciptakan usaha yang lebih besar. Modal kerjanya sampai Rp 10 Juta lebih dan kemampuan pengakumulasian modal masih terbatas.
- c. Usaha Kecil yang sudah mampu mengakumulasi modal. Tenaga kerjanya sampai 50 orang, sudah mengadopsi teknologi yang relatif baru, sudah ada pemisahanyang jelas antara produksi dan rumah tangga, pengelolaan sudah mengarah ke profesional, pemasaran mengandalkan agen dan pasarannya luasa mencapai jangkauan di luar propinsi serta adanya inovasi baru untuk penetrasi pasar. Modal kerjanya di atas Rp 20 Juta dan sudah ada akses ke bank dan kebutuha dananya tidak terbatas pada modal kerjanya.

Menurut Madiantono³⁰ dalam salah astu hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa, ada tiga ciri usaha kecil

- a. mempunyai derajat kebebasan yang lebih besar dalam memilih masuk atau keluar pasar
- b. mempunyai kemampuan adaptasai yang relatif tinggi,
- c. kompetisi dalam menjalankan usahanya mempunyai derajat ketahanan yang lebih tinggi karena memiliki over cost yang relatif rendah

³⁰ Madiantono, *Op.cit*, hal 59

Usaha kecil tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu saja tetapi tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Karakteristik usaha kecil tidak dapat digeneralisir karena setiap daerah mempunyai karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, tingkat pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Heterogenitas tersebut berimplikasi kepada kebijakan yang akan diterapkan dalam upaya pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan hukum bagi usaha kecil dan menengah. Lebih jauh penentuan kebijaksanaan harus berangkat dari realitas sosiologis dari usaha kecil dan daerahnya, beberapa hal yang pada umumnya melekat di hampir seluruh usaha kecil di Indonesia, adalah: Adapun karakteristik kondisi dari Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu antara lain ³¹:

- a. Produk, dari segi ini produk masih merupakan pekerjaan tangan atau semi mesin, dengan bentuk-bentuk desain umum atau terdisional.
- b. Manajemen, dari sifat kepemilikan usaha biasanya merupakan milik keluarga atau sekelompok orang yang telah saling mengenal [pertemanan], dengan sistim operasional yang cenderung bersifat turun temurun dan modal yang terbatas.
- c. Sumber daya manusia, biasanya merupakan usaha yang padat karya, dimana peningkatan jumlah produksi akan dibarengi dengan penambahan tenaga kerja. Sifat keahlian dari tenaga kerja lebih mengandalkan pada ketrampilan atau pengalaman karena proses pembiasaan. Pengembangan wawasan lebih bersifat turun temurun, dengan pakem dasar yang sulit berubah

³¹ Prieyo Pratomo, *Op.cit*, hal 1.

[sistematis tetapi belum efisien sehingga belum efektif]. Kurang mengantisipasi teknologi.

- d. Pasar dan Pemasaran, target pasar adalah masyarakat di sekitar pasar lokal maupun regional. Pemasarannya mengandalkan pengumpul atau makelar, membuka outlet, menitipkan ke toko dengan sistem konsinyasi, dan mengikuti pameran-pameran.

Kegiatan dunia usaha dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Badan Usaha berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas [PT] dan koperasi, sedangkan badan usaha bukan berbadan hukum, literatur hukum mengakui ada 3 [tiga] bentuk, yaitu persekutuan perdata, firma [Fa] dan persekutuan komanditer [CV]. Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil menyebutkan bahwa usaha kecil sebagai salah satu unit Perekonomian nasional dapat berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum.

3. Problema Umum Usaha Kecil Menengah dan Sasaran Pemberdayaan

Alasan perlunya usaha kecil dan kerajinan rumah tangga diberdayakan dan dikembangkan dalam proses pembangunan perekonomian nasional, antara lain:

- a. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga banyak menyerap sumber daya lokal baik tenaga kerja maupun bahan baku produksi. Meskipun *share* usaha kecil belum cukup signifikan dalam menyumbang kepada produk domestik bruto, yaitu sekitar 38,9% dari keseluruhan PDB Indonesia tetapi usaha kecil berhasil menyerap lebih kurang 88% tenaga kerja³². Selain itu

³² *Manajemen Usahawan Indonesia*, No 11, November 1997, hal 9

bahan baku yang digunakan umumnya bersal dari sumber daya lokal terutama yang ada disekitar tempat usaha kecil tersebut beroperasi.

- b. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga memegang peranan penting dengan ekspor non migas, terbukti menempati ranking kedua setelah kelompok aneka industri.
- c. Adanya urgensi menciptakan struktur ekonomi nasional, yang pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap I berbentuk piramida menjadi semacam gunung pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, yaitu usaha besar tidak lagi terlalu dominan, usaha menengah merupakan komunitas terbesar sementara usaha kecil lebih sedikit lebih sedikit jumlahnya dari usaha besar.
- d. Usaha kecil merupakan sumber kehidupan rakyat banyak.
- e. Usaha kecil tersebar merata diseluruh pelosok negeri sehingga memiliki peran strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan regional.
- f. Usaha kecil memiliki potensi besar sebagai penghasil barang dan jasa, khususnya bagi golongan masyarakat menengah ke bawah.
- g. Usaha kecil bersifat padat karya, dalam situasi yang sangat terbatas kesempatan kerja pada sektor formal, maka usaha kecil dapat diandalkan sebagai penyelamat penyerapan tenaga kerja. Hal ini sudah terbukti saat krisis ekonomi 1997 dan banyaknya korban Putus Hubungan Kerja [PHK] yang mampu diserap usaha kecil terutama sektor informal.
- h. Pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada usaha kecil seringkali mengandung nilai-nilai budaya yang khas dan perlu dipertahankan, seperti batik tradisional, cinderamata, tenun kain dan sebagainya. Sembilan, usaha kecil pada umumnya merupakan wadah kegiatan ekonomi sebagai kaum perempuan, sehingga lebih mampu berperan dalam peningkatan pendapatan keluarga, masyarakat dan negara³³.

Sasaran bagi upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, terlebih dahulu perlu diketahui permasalahan-permasalahan yang melekat pada sebagian besar usaha kecil dan menengah selama ini dan dapat dikelompokkan menjadi 2 [dua], yaitu secara internal dan eksternal.

³³ Hetifah Syaipudin, dkk, *Strategidan Agenda Pengembangan Usah Kecil*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1995, hal 33

Kelemahan internal antara lain berupa³⁴ :

- a. Usaha yang dilakukan tidak atau jarang sekali melalui proses perencanaan matang. Mungkin memang agak berlebihan jika kita gampang menuduh perusahaan kecil kecil tidak memiliki perencanaan usaha. Tidak adanya perencanaan mengakibatkan perusahaan kecil tidak memusatkan segala tenaga dan daya untuk mencapai sasaran yang paling menguntungkan, mereka juga tidak mempunyai sasaran dan skala prioritas. Akibatnya mereka tidak mengathui secara pasti apakah berhasil, setengah gagal atau gagal. Segala tindakan yang dilakukan sifatnya provisoris, berdasarkan perasaan, pengalaman dan tanpa pedoman jelas dn konkrit.
- b. Kurang berorientasi ke masa depan. Kebanyakan pengusaha kecil memulai usahanya karena melihat orang lain maju atau sekedar mencoba atau asal jalan karena tidak ada kegiatan lain. Karena kurangnya pendidikan mereka tidak dapat membaca kecenderungan masa depan.
- c. Pengusaha tidak memiliki pendidikan yang relevan. Umumnya pengusaha kecil memiliki pendidikan rendah, karena lulusan pendidikan yang lebih tinggi lebih senang menjadi pegawai negeri atau karyawan swasta.
- d. Tanpa adanya pembukuan [pencatatan] yang teratur. Keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki menjadikan pengusaha kecil tidak mengerti tentang manfaat dan bagaimana membuat pembukuan yang baik. Selain itu karena tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk mengadakan pembukuan usaha kecil sehingga jarang sekali pengusaha kecil membuat pembukuan keuangan atas usahanya
- e. Tidak ada analisis pasar yang konkrit. Hal ini terkait dengan lemahnya tingkat perencanaan, tingkat pendidikan dan tidak adanya pembukuan yang teratur. Pengusaha kecil hanya mengandalkan perkiraan dan bertumpu pada pengalaman hari kemarin. Mereka tidak tahu kelemahan / kekuatan pesaingnya, selera pembeli, perkembangan teknologi dan produk dan sebagainya
- f. Jarang melakukan pembaharuan [inovasi]. Dari hari ke hari bentuk usaha kecil atau tempat usaha, jenis produk yang dijual, tata letak dan lain-lain tidak dilakukan pembaharuan

³⁴ B.N. Marbun, *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil Mengapa ribuan perusahaan Kecil rontok setiap tahun*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1993, hal 35-44

secara periodik. Bahkan sekalipun ada, itu bukan hasil analisis pasar tetapi meniru tetangga sehingga belum ada pembaruan yang konsisten.

- g. Kurang menyadari arti pentingnya pengkaderan [generasi penerus usaha]. Usaha yang dilakukan pada umumnya adalah usaha orang tua, sementara anak mereka tidak diharapkan untuk mengikuti jejak orang tuanya. Mereka lebih suka anak-anaknya menjadi pegawai negeri atau lainnya. Akhirnya ilmu perniagaan tidak diturunkan kepada keturunannya. Oleh karena itu jarang usaha kecil sukses sampai pada generasi kedua.
- h. Cepat merasa puas atas hasil yang telah dicapai. Jika memperoleh hasil lumayan para pengusaha kecil sudah cukup puas dan bertahan pada posisi tersebut.
- i. Pengelolaan usaha umumnya menggunakan manajemen keluarga. Pengelolaan perusahaan tidak efektif dan inefisien karena semua anggota keluarga sering melibatkan diri padahal tidak mengetahui hal ihwal perusahaan.
- j. Kurang percaya ilmu modern [misalnya ilmu pembukuan, ilmu manajemen dan teknologi]. Mempelajari ilmu modern dianggap pemborosan karena banyak mengeluarkan biaya. Usaha kecil cukup puas dengan keadaan yang dipacainya.
- k. Kurang menguasai aturan hukum. Aturan hukum hampir tidak mereka ahami, misalnya masalah perijinan usaha, hak atas kekayaan intelektual. Sehingga kadang-kadang mereka berusaha di tempat terlarang atau di luar lokasi yang telah ditentukan dan membajak hasil karya orang lain atau merek dagang yang sudah terdaftar. Maka akibatnya mereka digusur oleh petugas ataupun dianggap melakukan tindakan pidana atas pembajakan tersebut. Di samping itu juga tidak mengetahui mengenai perijinan usaha, peraturan perpajakan dan ketentuan hukum lainnya.

Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kelemahan internal yang sangat besar pengaruhnya terhadap ketidakmampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri adalah masalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya dukungan fasilitas yang pada gilirannya akan berdampak pada ketidakmampuan memperkuat usaha, rendahnya produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Usaha kecil melakukan kegiatan usaha

berbekal modal sendiri yang mungkin diperoleh dari hasil tabungan pribadi, penjualan barang tertentu atau pinjaman dari keluarga yang nilainya relatif kecil. Akses pada lembaga keuangan perbankan atau non perbankan belum terpikirkan, apalagi bila mereka dihadapkan pada masalah birokrasi yang panjang dan keharusan menyediakan jaminan kredit [*collateral*]. Sementara program bantuan pemerintah belum mampu mengatasinya. Walaupun permasalahan tersebut merupakan persoalan internal usaha kecil, namun untuk mengatasinya tidak mungkin menyerahkannya kepada usaha kecil sendiri. Pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten harus turun tangan membantu penanggulangan permasalahan tersebut.

Kelemahan eksternal yang juga turut mempengaruhi usaha kecil, antara lain adalah :³⁵

- a. Iklim usaha yang kurang mendukung bagi pengembangan usaha kecil. Iklim usaha kadang-kadang tidak memberikan peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Saha besar dan menengah acapkali melakukan monopoli sehingga menutup pangsa usaha kecil. Fasilitas kredit modal usaha sangat sulit didapat pengusaha kecil, sementara bagi pengusaha besar dan menengah sangat mudah mendapatkan kredit yang sangat besar.
- b. Kebijakan pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa pertauran perundang-undangan belum dilaksanakan dengan tegas dan konsisten, kebijaksanaan pemerintah bagus di atas kertas namun pada tataran aplikasi di lapangan banyak mengalami cacat operasional. Sehingga target pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil tidak tercapai.

³⁵ Muhamad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha; Konsep dan Strategi*, Sinar Harapan, Jakarta, Jakarta, hal 39

Kendala eksternal lainnya adalah kurangnya dukungan fasilitas untuk berusaha, seperti lokasi khusus yang diperuntukkan bagi usaha kecil di pasar atau tempat tertentu, fasilitas kredit dan informasi. Kemitraan dengan usaha menengah dan besar juga belum berjalan dengan optimal. Tidak semua usaha besar dan menengah mempunyai komitmen dan perhatian pada usaha kecil, apalagi jika usaha kecil tidak mempunyai keterkaitan usaha dengan usaha besar dan menengah. Peran pemerintah tetap diperlukan untuk mendorong proses kemitraan yang saling menguntungkan.

Disamping kelemahan dan permasalahan di atas, ternyata Usaha Kecil Menengah mempunyai kekuatan yang sangat besar dan potensial. Terbukti mereka masih mampu bertahan hidup walaupun badai krisis ekonomi menerpa bangsa kita hampir tiga tahun ini. Kekuatan atau potensi tersebut adalah tidak birokratis dan mandiri, cepat tanggap dan fleksibel, dinamis dan ulet.³⁶

Uraian terdahulu menyuguhkan pengetahuan kepada penulis, bahwa problematika usaha kecil tidak sesederhana seperti yang kerap kali diperkirakan oleh banyak orang. Selama ini fokus pemberdayaan usaha kecil hanya tertuju pada persoalan bagaimana meningkatkan modal usaha. Padahal bila mau disurutkan secara satu persatu permasalahan yang

³⁶ B.N Marbun, *Op.cit*, hal 34

umumnya terjadi pada sektor usaha kecil di Indonesia dan segera harus ditangani adalah antara lain Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Perusahaan [Manajemen], Permodalan, Penguasaan dan Pemilikan Informasi dan Teknologi dan Penciptaan Iklim Usaha yang Sehat, Distribusi Produk [*marketing*], Kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha besar dan menengah, Pembangunan prasarana pendukung usaha kecil, Perlindungan dan pemahaman hukum dan ekonomi, Usaha kecil rentan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Permasalahan diatas merupakan sasaran [*focus shooting*] dari kebijaksanaan pemerintah yang bertujuan memberdayakan dan mengemangkan usaha kecil. Paparan berikut akan membahas seberapa jauh undang-undang usaha kecil dan peraturan perundang-undangan lainnya mengakomodasikan permasalahan tersebut dalam ketentuan pasal-pasal nya

a. Sumber Daya Manusia

Faktor pendidikan cukup signifikan dalam pengembangan dunia usaha karena dengan wawasan yang cukup luas akan dapat membentuk karakter, pola pikir dan pola kreatifitas, inovatif. Lebih dari 80% sumber daya manusia yang menggeluti usaha kecil dan industri rumah tangga hanya berpendidikan sekolah dasar. Sedikit sekali yang memiliki pendidikan tingkat lanjutan akademi atau sarjana. Sumber Daya Manusia

merupakan suatu hal yang erat sekali dengan aspek manajemen, penguasaan teknologi dan distribusi produk.

Pengembangan Sumber Daya Manusia mutlak diperlukan, Sebab tanpa Sumber Daya Manusia yang berkualitas kita hanya menjadi pengekor, dimana pada saat ini pemanfaatan Sumber Daya Alam kita yang sangat kaya [dari sudut potensi bukan riil], hanya tergantung pada keahlian atau pengetahuan Sumber Daya Manusia dari pihak asing.

Mulai titik ini sistem Hak Kekayaan Intelektual memegang peran yang sangat penting. *Pertama*, sistem Hak Kekayaan Intelektual diperlukan untuk melindungi penanam modal dari asing [tentu saja secara strategis harus diperhitungkan agar terjadi alih teknologi dan alih ketrampilan bagi Sumber Daya Manusia kita sendiri], *Kedua*, sistem Hak Kekayaan Intelektual tidak lain merupakan upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia itu sendiri³⁷.

Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Sebab Hak Kekayaan Intelektual berurusan dengan produk dan proses yang berkaitan dengan olah pikir manusia.

³⁷ A Zen Umar Purba, *Perindungan dan Penegakan Hukum HaKI*, Makalah Pelatihan Teknis dan Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Makasar, 20 November 2001, hal 1, dalam. www.dgip.go.id.

Dengan pengembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual diharapkan akan berkembang pula sumber daya manusia kita terutama terciptanya budaya inovatif dan inventif. Hal ini sangat penting dikaitkan dengan kenyataan, walaupun kekayaan atau sumber daya alam berlimpah, kita masih “begini-begini” saja bahkan mundur, dan tingkat kemiskinan makin bertambah³⁸.

Masalah Sumber Daya Manusia diatur pada Pasal 17 Bab V Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Pemerintah dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu dengan memasyarakat dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan ketrampilan teknik dan manajemen, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil dan menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi bagi usaha kecil menengah

b. Manajemen

Manajemen sangat berhubungan erat dengan dengan kualitas Sumber Daya Manusia. Sebagian pengusaha kecil kita memiliki tingkat

³⁸ A Zen Purba, *Sistim HAKI Nasional dan Otonomi Daerah*, Seminar Nasional, Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKI, JIII, APIC, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, didukung oleh JPO dan Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado 18 Februari 2002, hal 1, dalam www.dgip.go.id.

pendidikan yang sangat rendah, sehingga mengakibatkan kemampuan analisis, pola pikir dan pengatuan bisnis serta manajemen sangat minim sekali.

Kelemahan akan kemamapuan manajemen perusahaan sebaiknya memang disikapi dengan mulai memeperkenalkan aspek-aspek manajemen sederhana yang mudah dimengerti dan mungkin untuk dilaksnakan oleh pelaku usaha kecil menengah. Usaha Kecil Menengah biasanya masih menerapkan sistem manajemen keluarga dalam menjalankan usahanya. Fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemasaran, dan pengawasan. Ketentuan mengenai peningkatan manajemen diatur dalam Pasal 17 huruf b Bab V Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

c. Permodalan

Pada umunya pengusaha kecil menengah memulai perusahaannya dari tingkat yang paling sederhana dengan menggunakan modal yang relatif kecil. Modal uasaha tersebut diperoleh dengan tabungan pribadi atau keluarga, atau seringkali diperoleh dari penjualan harta benda yanag dimiliki. Sumber pembiayaan yang berasal dari bank dirasakan merupakan hal yang berat dikarenakan syarat yang mengharuskan jaminan.

Kesulitan yang dialami Usaha Kecil Menengah dalam mengakses kredit modal usaha dari lembaga perbankan karena ketiadaan jaminan/agunan secara teoritis sebenarnya sudah ada jalan keluarnya, yaitu sejak diakuinya keberadaan bank syariah sebagai salah satu jenis bank di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Konvensional [Bank Umum] dan Bank Syariah, dimana pada Bank Syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil [*mudharabah*] sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir m dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Maka dengan sistem bagi hasil ini mengakibatkan lebih terbukannya kesempatan untuk mendapatkan kredit tanpa agunan. Tetapi dalam praktek pelaksanaannya dikarenakan lembaga Bank Syariah ini masih merupakan hal baru, maka belum mampu mengoptimalkan pemenuhan kredit bagi Usaha Kecil Menengah.

Masalah permodalan merupakan masalah dari semua kelompok usaha dari pengusaha besar, sampai dengan hingga industri kecil dan rumah tangga, untuk itulah maka kesempatan yang diperoleh oleh para pelaku usaha tersebut adalah sama dan sesuai dengan kebutuhan. Selama ini hanya sedikit Bank yang mau mengalokasikan dana untuk Usaha Kecil Menengah, meskipun sekarang keadaannya banyak Bank baik swasta maupun pemerintah yang telah mau memberikan alokasi dana yang

cukup memadai. Oleh karena itu pemerintah tetap harus berupaya untuk mengupayakan jalan keluar yang lebih arif dalam masalah permodalan ini. Masalah permodalan diatur dalam Pasal 7 Bab IV dan Pasal 21-25 Bab VI Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

d. Akses Terhadap Teknologi dan Penciptaan Iklim Usaha Yang Sehat

Masalah pemberdayaan Usaha Kecil Menengah merupakan aspek yang banyak kaitannya dengan aspek permodalan dimana aspek permodalan ini sebenarnya memberikan pengaruh terhadap semua aspek. Aspek pemberdayaan Usaha Kecil Menengah terhadap akses terhadap teknologi bisa dilakukan dengan alih teknologi yaitu suatu proses dari penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri³⁹. Pelaksanaan proses alih teknologi dirasakan merupakan aspek yang memerlukan dana yang tidak sedikit dan proses yang cukup rumit.

Pelaksanaan proses alih teknologi tidak secara apa adanya tetapi harus disesuaikan dengan kondisi usaha kecil yang menerimanya, seperti tingkat penerimaan dari segi Sumber Daya Manusia, manajemen perusahaan, produk yang dihasilkan dan keuangan. Permasalahan teknologi dituangkan dalam Pasal 14-18 Bab V Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Pemerintah.

³⁹ Ridwan Khaerandy, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual Jilid 1*, FH UII Yogyakarta, 1996, hal 10 A

Dunia usaha para kalangan bisnis dan masyarakat dalam upaya membina dan mengembangkan teknologi pada Usaha Kecil Menengah melakukan upaya-upaya [Pasal 18 UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil]:

- 1) Meningkatkan kemampuan dibidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- 2) Meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk pengembangan desain dan teknologi mutakhir;
- 3) Memberikan insentif pada usaha besar yang ingin mengalihkan teknologi baru pada usaha kecil;
- 4) Usaha kecil juga diberikan insentif apabila ingin menerapkan teknologi baru dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 5) Meningkatkan kerjasama dan proses alih teknologi;
- 6) Berusaha memenuhi kualitas standarisasi penggunaan teknologi baik dari aspek produksi, pengolahan, informasi dan pemasaran.

Perlakuan khusus diperlukan bagi Usaha Kecil Menengah agar mampu berkompetisi di kancah bisnis yang ketat. Sungguh tidak adil jika si kecil harus bersaing dalam persaingan bisnis dengan yang besar ataupun yang menengah. Belum bertanding pun si kecil sudah kalah dalam hal modal, manajemen, teknologi, kualitas produk dan strategi pemasarannya. Untuk itu pemerintah perlu mengambil posisi sebagai penyeimbang dalam persaingan tersebut dengan memberikan fasilitas dan pembelaan terhadap usaha kecil. Pembelaan yang dilakukan pemerintah bukan berarti untuk selamanya tetapi terbatas pada pemberian peluang

bagi usaha kecil agar berkembang , maju dan kuat. Setelah itu fasilitas dan pembelaan dapat dicabut dan usaha kecil berkompetisi dengan kemampuan sendiri

Persaingan yang sehat berhubungan erat dengan kondisi iklim usaha yang ada. Dalam upaya menciptakan iklim persaingan yang sehat di kalangan pelaku usaha terutama dalam rangka memberikan perlindungan usaha kepada usaha kecil, pemerintah menetapkan perturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil [*bargaining position*], mencegah terbentuknya struktur pasar yang berpeluang melahirkan persaingan yang tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang dapat menimbulkan kerugian bagi usaha kecil, mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha dari hulu hingga hilir oleh perseorangan atau kelompok tertentu.

Bentuk kebijaksanaan yang dapat dilaksanakan misalnya membangun sarana dan prasarana yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha kecil, memberikan keringanan-keringanan tarip tertentu bagi usaha kecil, seperti keringanan pajak, membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan pengembangan bisnis mengenai perkembangan pasar, desain produk, mutu dan teknologi yang mampu diakses oleh semua kalangan termasuk usaha kecil, mewujudkan

kemitraan antara usaha menengah dan besar dengan usaha kecil yang saling menguntungkan, menyederhanakan birokrasi serta menekan biaya siluman, memberikan bantuan konsultasi hukum dan bisnis serta bentuk pembelaan bagi usaha kecil lainnya.

Penciptaan iklim usaha dan persaingan sehat [*fairplay competition*] diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 13 Bab IV 13 UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, dan Pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menumbuhkan iklim kondusif bagi usaha kecil pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap usaha kecil yaitu dengan menetapkan perturan perundang-undangan dan kebijaksanaan tertentu.

e. Distribusi dan Pemasaran Produk

Pemasaran produk dan distribusi termasuk dalam salah satu aspek manajemen perusahaan. Bagaimana cara mendistribusikan dan memasarkan produk supaya dapat terserap pasar dan memenuhi selera konsumen. Kalau dulu para konsumen yang mendatangi produsen untuk memperoleh kebutuhan hidupnya, zaman sekarang sudah sangat berubah. Pengusaha tidak bisa lagi berdiam diri menunggu [manajemen penantian] di belakang meja dan konsumen datang sendiri. Sekarang pilihan terhadap suatu jenis produk sangat beragam baik merek, produsen, kualitas maupun harganya.

Pengusaha akhirnya harus mengubah gaya pemasaran dari gaya menanti bola menjadi memburu bola dengan promosi langsung, melalui media massa atau melalui cara lain yang menurutnya efektif menjangkau pasar yang dituju. Manajemen ini belum begitu populer di kalangan pengusaha kecil. *Oral Promotion* terbukti tidak lagi efisien di jaman sekarang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mensiasati persoalan distribusi dan pemasaran ini adalah :

- 1) Mengadakan hubungan kemitraan dengan para distributor atau agen-agen penjualan;
- 2) Mengembangkan sistem konsinyasi kepada *supermarket*, swalayan dan koperasi. Namun harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat. Jangan sampai kelompok usaha kecil hanya sebagai pemasok saja, sementara keuntungan lebih dikuasai oleh pihak penjual produknya;
- 3) Mengembangkan pusat penjualan berbentuk galeri atau *stand* pada pasar tertentu;
- 4) Ikut serta dalam berbagai pameran perdagangan dan industri, di dalam maupun luar negeri.

Undang-undang usaha kecil menaruh perhatian pada aspek pemasaran dengan mengatur ketentuan pembinaan dan pengembangan pada Pasal 14-16 Bab IV Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Usaha yang dapat dilakukan untuk membantu pemasaran

usaha kecil baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri antara lain dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian mengenai aspek pemasaran, meningkatkan kemampuan dan manajemen pemasaran, menyediakan sarana serta dukungan promosi, uji coba pasar, mengembangkan jaringan pemasaran dan jaringan distribusi.

f. Kemitraan dan Usaha Saling Menguntungkan.

Wujud Kemitraan usaha selama ini dikenal dengan istilah bapak-anak angkat, usaha bersama dan istilah lainnya. Secara definitif yang dinamakan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar dengan mempertahankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Kemitraan dimanapun selalu dilaksanakan di antara para pelaku usaha. Di Indonesia ada pelaksanaan kemitraan meskipun belum ditetapkan dengan aturan-aturan yang jelas dan mengikat. Kemitraan diatur pada Pasal 26-32 Bab VII Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Hal-hal penting dari ketentuan pasal tersebut adalah :

- 1) Usaha besar dan menengah diwajibkan melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil baik terhadap usaha kecil yang memiliki keterkaitan usaha maupun tidak sama sekali tetapi lebih suipayakan terhadap usaha yang mempunyai keterkaitan.
- 2) Kemitraan berisi pembinaan dan pengembangan dalam bidang-bidang produksi, permodalan, SDM, manajemen dan teknologi.

- 3) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebaiknya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan autentik yang mengatur betuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bidang pembinaan dan pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian sengketa bilaman terjadi perselisihan;
- 4) Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil, dapat ditindaklanjuti dengan memberikan kesempatan pemilikan saham usaha besar dan menengah oleh usaha kecil sebagai mitra usahanya;
- 5) Dalam proses kemitraan usaha besar dan menengah tidak dibenarkan bagi mereka untuk memiliki atau menguasai usaha kecil dan menengah.

Namun dalam pelaksanaan kemitraan di lapangan seringkali timbul perselisihan antara pihak yang biasanya dipicu oleh pemahaman yang tidak selaras mengenai hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bermitra. Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan PP Nomor 44 Tahun 1997 telah memberikan garis-garis besar tentang isi dari perjanjian kemitraan termasuk hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bermitra.

Usaha besar, menengah maupun kecil dalam kemitraan mempunyai hak untuk meningkatkan efisiensi usaha, mendapatkan kemudahan dalam melakukan kemitraan, membuat perjanjian kemitraan, membatalkan perjanjian jika salah satu pihak mengingkari salah satu isi perjanjian, usaha besar dan menengah mempunyai hak untuk mengetahui kinerja usaha kecil sebagai mitra binaannya. Usaha kecil memiliki hak memperoleh pembinaan dan pengembangan usaha dalam satu atau

beberapa aspek mengenai pemasaran, Sumber Daya Manusia, permodalan, manajemen dan teknologi [Pasal 12 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997].

Dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan diatur kewajiban usaha besar dan menengah terhadap usaha kecil dalam kemitraan. Kewajiban itu adalah memberi informasi peluang kemitraan, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan, menunjuk penanggung jawab kemitraan, mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan, melakukan pembinaan kepada mitra usaha binaannya dalam satu aspek atau lebih misalnya pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan permodalan, manajemen dan teknologi.

Sebaliknya usaha kecil sebagai mitra binaan usaha besar atau menengah berkewajiban meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar atau usaha menengah.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, para pengusaha besar dan menengah tidak bisa lagi mengelak untuk menghindari bermitra dengan usaha kecil dengan alasan

belum ada peraturan yang mengaturnya. Kemitraan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan adalah khusus tentang kemitraan antara pengusaha besar dan menengah dengan pengusaha kecil, bila kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha besar, pengusaha menengah dengan pengusaha menengah saja bukan merupakan obyek dari Peraturan Pemerintah tersebut. Kemitraan jenis terakhir ini hanya memunculkan orientasi keuntungan semata-mata tidak lebih dari itu, tidak ada kerjasama bilamana tidak ada peluang mencapai keuntungan.

Beberapa model Kemitraan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, yaitu pola inti plasma, sub kontrak, perdagangan umum, keagenan dan waralaba [*franchising*].

g. Sarana dan Prasarana Pendukung.

Pengadaan prasarana pendukung pada pengembangan usaha kecil merupakan tugas dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Pengadaan prasarana umum bagi kepentingan usaha kecil yang disini maksudnya adalah penyediaan prasarana yang memadai untuk mendukung gerakan pengembangan usaha kecil. Prasarana itu dapat berbentuk penyediaan lahan usaha [misalnya lokasi warung tenda, rumah toko yang terjangkau oleh usaha kecil], pemberian keringanan tarif, penyediaan informasi bisnis terbaru pembangunan atau perbaikan

prasarana transformasi, telekomunikasi, listrik, air bersih dan prasarana lainnya. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 9 dan Penjelasan Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

h. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Kecil

Secara konseptual dan tertuang dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum. Hukum tidak membedakan status sosial, jabatan atau kedudukan. Dalam dunia bisnis pun beberapa peraturan undang-undang menegaskan bahwa semua pelaku bisnis berhak untuk dapat berusaha semampunya dan mendapatkan keuntungan dari perusahaannya. Namun beberapa pihak meragukan konsepsi tersebut. Terlalu banyak kenyataan bisnis yang tidak memberikan kesamaan dihadapan hukum, perlakuan yang tidak adil dan pilih kasih, monopoli, merebaknya kolusi, korupsi dan nepotisme, munculnya pengusaha instan kuat dan semakin tidak berdayanya usaha kecil kerakyatan.

Hasil dari pengingkaran aturan hukum tersebut di dalam ekonomi nasional adalah makin melebar dan dalamnya jurang kesenjangan ekonomi antara kelompok yang diprioritaskan dengan kelompok yang dianak tirikan. Akibatnya dapat muncul kecemburuan sosial yang berpotensi menjadikan kerusuhan.

4. Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah

Efektifnya suatu pemerintahan negara tidak terlepas dari tersedianya aturan hukum dan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Oleh sebab itu hukum dapat digunakan dalam fungsi perencanaan dan penaggulangan berbagai persoalan berbangsa dan bernegara. Ada empat alasan untuk memanfaatkan hukum dalam proses tersebut, yaitu hukum merupakan bentuk pengaturan kehidupan manusia yang paling tua dan diyakini paling modern dan representatif, hukum sebagai konsekuensi terhadap pengaturan dan perubahan-perubahan yang hendak dilakukan atau yang terjadi dalam masyarakat; hukum sebagai konsekuensi terhadap pengaturan dan perubahan-perubahan yang hendak dilakukan atau yang terjadi dalam masyarakat; hukum berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang yang bersifat adaptif fleksibel dan prediktif yang terlihat pada potensi dimensi fungsi hukum yaitu preventif dan represif, dan hukum diyakini untuk mengemban misi sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan. Maka tidak salah apabila kekuasaan memanfaatkan hukum sebagai instrumen pengefektifan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Persoalannya adalah jangan sampai pemanfaatan tersebut berpotensi menunggangi hukum untuk memposisikannya sebagai pendukung kekuasaan bukannya sebagai pendukung kebenaran. Hukum harus berada di atas kekuasaan [*konsesi rule of law rechstaat* bukan *machstaat*].

Fungsi sosial hukum yang banyak disorot akhir-akhir ini yaitu hukum sebagai instrumen kebijaksanaan publik dalam mengarahkan perubahan sosial. Hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hanya dalam menilai proses pencapaian tujuan tersebut, tidak boleh berpikir seperti dalam ilmu alam. Proses pencapaian akan berlangsung lama dan efek yang ditimbulkan merupakan efek yang sifatnya berantai. Dalam keadaan demikian hukum dapat dikategorikan sebagai faktor penggerak mula, yaitu yang memberikan dorongan pertama secara sistematis.⁴⁰

Kenyataan yang diuraikan diatas menegaskan semakin pentingnya penggunaan hukum sebagai sarana mewujudkan kebijaksanaan pemerintah sekaligus memperlihatkan pertautan erat antara hukum dan kebijakan pemerintah. Hukum Modern memang mengandung potensi untuk memberi keadilan dalam masyarakat, dengan syarat bahwa hal tersebut harus dijalankan dengan jujur dan penuh komitmen serta dedikasi untuk memberikan keadilan⁴¹

Kebijakan pemerintah diartikan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.⁴² Pada

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal 209.

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Supremasi Hukum Yang Benar*, Kompas, 12 Juni, 2002, hal 4

⁴² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal 26-28

prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Setiap masyarakat mempunyai keinginan dan cita-cita bersama yang ingin di wujudkan seecara bersama-sama. Untuk itu perlu diwujudkan dalam rencana yang mengikat dalam bentuk kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang.

Tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan dirumuskan dengan penuh kesadaran dan terestimasi melalui cara-cara dan instrumen yang sah, tidak melanggar atau melanggar hukum [*legal/ legitimate*] dengan tujuan politik yang jelas.⁴³ Ketika hukum digunakan sebagai instrumen kebijaksanaan hukum dan kebijaksanaan pemerintah, karena keduanya telah melebur dan menjadi satu kesatuan. Bahkan dapat dikatakan hukum itu sendiri adalah kebijaksanaan pemerintah, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan usaha Kecil, Peraturan Pemerintah itu sendiri adalah hukum namun sekaligus juga merupakan kebijaksanaan pemerintah.

Khusus dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan kebijaksanaan pemerintah adalah segala keputusan atau tindakan-tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berdasarkan ketentuan hukum yang

⁴³ S Prajudi Atmosudirjo, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, , Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hal 153

berlaku dan diimplementasikan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil.

Apapun kebijaksanaan yang ingin dilakukan oleh pemerintah seyogyanya harus didasarkan pada nilai filosofis yaitu Pancasila dan aturan yuridis yang jelas dan tepat. Dengan demikian ada justifikasi konstitusional sehingga implementasinya diharapkan dapat didukung oleh seluruh komponen bangsa baik aparatur negara, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas. peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kebijaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia, antara lain adalah

- a. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004,
- b. Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- c. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- d. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi diupayakan melalui cara mengembangkan sistem ekonomi yang berorientasi kerakyatan. Pembinaan usaha kecil selama ini terkesan tidak teratur dan kurang koordinasi antara pihak-pihak yang menangani usaha kecil baik institusi pemerintah, swasta [asosiasi pengusaha maupun Lembaga Swadaya Masyarakat]. Masing-

masing melangkah sendiri sesuai dengan kebijaksanaan dan institusinya tanpa ada keinginan untuk menselaraskan program-programnya.

Dari sini pendefinisian usaha kecil saja sudah berbeda-beda sehingga mengakibatkan ketidakjelasan maka siapakah yang sesungguhnya dapat digolongkan sebagai pengusaha kecil dan berhak untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitas tertentu dalam berusaha. Selain itu juga mengenai sasaran apa saja yang paling signifikan untuk segera dituntaskan masih berbeda-beda.

Salah satu faktor penyebabnya adalah karena selama ini belum pernah ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang usaha kecil dan mekanisme standar yang digunakan dalam proses pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Oleh karena itu pemerintah berupaya membuat suatu pedoman yang jelas baik dari sisi hukum, program maupun model-model pembinaan dan pengembangan, dengan mengundang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Para pihak yang berkepentingan dengan usaha kecil diharapkan memiliki acuan yang jelas dan sama sehingga lebih lanjut akan mendorong terjadinya kesalingterikatan dan kesepadanan *[link and match]* dari program pembinaan.

Dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis guna mewujudkan struktur perekonomian nasional sehingga makin berimbang, adil dan sesuai dengan

prinsip demokrasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa datang.

Kehadiran Undang-Undang Usaha Kecil memberikan dampak yang sangat penting bagi keberadaan Usaha Kecil tersebut. Eksistensinya diakui secara formal sebagai salah satu obyek pembangunan ekonomi bukan semata-mata sebagai obyek pembangunan. Konsekuensinya dalam proses pemberdayaan sedapat mungkin harus meninggalkan metode atau pendekatan yang bersifat sentralistik, proyek dan *top down* tetapi lebih mengarah pada metode atau pendekatan pembinaan yang bersifat partisipatif. Artinya usaha kecil jangan lagi diposisikan sebagai anak kecil yang harus selalu di suapi, namun berusaha dilibatkan secara langsung dalam membangun diri bersama pemerintah, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

Di Indonesia, lembaga yang tidak terlepas dan mempunyai relevansi yang kuat terhadap usaha kecil adalah koperasi. Koperasi diharapkan mampu berperan aktif dan menjadi sandaran untuk mempertinggi kualitas kehidupan perekonomian masyarakat. Apabila ketiga sektor yakni pemerintah, swasta dan koperasi dapat saling mendukung dan menguatkan, maka bisa dikatakan pemerintah sebagai pengemban misi penjaga stabilitas, sektor swasta sebagai pemupuk modal masyarakat guna pertumbuhan ekonomi bangsa dan sektor koperasi adalah merupakan sektor yang menjadi

wahana bagi pemerataan baik melalui kegiatan-kegiatan bersama maupun sebagai pembagi-bagi hasil kegiatan.

Demokrasi ekonomi meghendaki adanya perlakuan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara agar dapat berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkerjanya proses perekonomian yang wajar dan berkeadilan sosial. Kehadiran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Moopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi alat demi terwujudnya tatanan ekonomi nasional yang demokratis.

Tujuan diundangkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tersebut adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagu pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, hal ini tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1999.

5. Kebijakan Pemerintah Tentang Pemeberdayaan Usaha Kecil Menengah

Kebijakan Umum Pengembangan Industri Kecil, antara lain⁴⁴:

- a. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif, yang dilakukan dengan penerapan Undang-Undang anti monopoli dan mekanisme kontrolnya, menghilangkan proteksi-proteksi yang tidak efektif, deregulasi ekonomi terutama menyangkut masalah-masalah administratif [debirokratisasi].
- b. Menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung tumbuhnya industri kecil seperti membangun sarana informasi yang merata [akses informasi mudah], menghilangkan proteksi-proteksi yang tidak efektif, memberikan kredit dengan kriteria akuntabilitas.
- c. Membentuk lembaga penjamin kredit untuk usaha kecil yang bertujuan untuk melakukan proses seleksi, jembatan antara bank dengan industri kecil, sekaligus penjamin kredit.
- d. Redefinisi konsepsi *local content* dalam tahap aplikasi, yaitu dengan memperhatikan potensi dasar masyarakat, kondisi sosio-ekonomi selain keunikan kondisi geografis dan kandungan sumber daya alamnya berdasar pada Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan Usah Kecil Menengah melalui peraturan pemerintah dan keputusan pejabat terkait, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Usah Kecil,
- b. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan,
- c. Keputusan Presiden No 99 tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk usaha Kecil dan Bidang /Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan,

⁴⁴ Danny Daud Setiana, *Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Periode Pelita VII : Membangun Struktur Industri Yang Kokoh Dan Seimbang*, www.ekonomirakyat.org, hal 1.

- d. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan /kewirausahaan [GNMMK],
- e. Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/Kepala BPKM, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 22/SK/1998 dan No 07/SKB/M/VII/1998 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Kemitraan Dalam Rangka Penanaman Modal,
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Dana Dari Bagian Laba BUMN,
- g. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Dirjen Pembinaan Usaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK No Kep-1515/BU/1994 dan Nomor 02/SKB/PPK/X/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN,
- h. Surat Keputusan Direksi BI No 26/24/KEP/DIR/1993 dan SE BI No 26/1/KUK tanggal 29 Mei 1993 tentang Kredit Usaha Kecil.

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima bidang keuangan [pemodalán usaha] , kemitraan usaha, penciptaan iklim usah sehat, pembinaan sumber daya manusia dan manajemen, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha, di bidang keuangan pemerintah.

Sejak tahun 1970 sampai tahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan skema kredit yang diproyeksikan khusus bagi pengembangan permodalan usaha kecil Menengah. Tercatat antara lain adalah Kredit Investasi Kecil [KIK] dan Kredit Kerja Permanen [KMKP] sampai tahun 1980 dengan fasilitas subsidi pemerintah. Sejak tahun 1990 dua skema kredit tersebut diganti dengan Kredit Usaha Kecil [KUK] dengan mencabut fasilitas

subsidi dari pemerintah. Perubahan pola kredit ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi usaha kecil menengah, karena harus membayar cicilan kredit penuh sebagaimana halnya dengan kredit komersial. Akibatnya banyak usaha kecil menjadi tidak mampu lagi mendapatkan kredit dari perbankan.

Padahal melalui surat edaran BI No 26/1/KUK/1993, diinstruksikan kepada perbankan nasional agar mengalokasikan sebanyak 20% dari keseluruhan jumlah kredit yang dikeluarkan untuk Usaha Kecil Menengah. Fasilitas kredit lainnya adalah kredit umum pedesaan [Kupedes] berupa kredit umum komersial yang diperuntukan bagi kegiatan usaha yang berskala lebih kecil dari kredit investasi kecil.

Selain kebijakan perkreditan di atas, pemerintah juga mengupayakan alternatif pembiayaan usaha lain yang mungkin dapat diakses oleh usaha kecil menengah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan SK Menkeu No 1251/KMK.013/1988 dan SK Menkeu No 468/KMK.017/1985. Lembaga pembiayaan yang dimaksud oleh Keppres tersebut adalah lembaga pembiayaan non Bank yang terdiri dari sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang [*factoring*], usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Keppres No 61 Tahun 1988. Lembaga yang memiliki relevansi cukup kuat dengan upaya penanggulangan permasalahan permodalan usaha kecil menengah adalah lembaga modal ventura. Keppres

No 61 Tahun 1988 dan Pasal 1 angka 11 Kepmenkeu No 1251/KMK.013/1988, memberikan devinisi perusahaan modal ventura [*Ventura capital company*] ialah suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalm suatu perusahaan yang menrima bantuan pembiayaan [perusahaan pasangan usaha--*investee-company*] unutk jangka waktu tertentu.

Di bidang pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya anusia pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Instruksi Presiden No 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan [GNMMK]. Pemerintah Pemerintah tahun 1998 merupakan peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No 9 tahun 1995, yang mnegatur mengenai ruang lingkup, tata cara dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilkukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi.

6. Konsep pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Istilah pemberdayaan [*empower*] berasal dari kata dasar daya [*power*] yang berarti kesanggupan atau kemampuan untuk berbuat/melakukan sesuatu.⁴⁵ Pemberdayaan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu keadaan yang mengkuasakan atau memberi kewenangan kepada⁴⁶. Pemberdayaan adalah gerakan yang mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan kepada pentingnya keberpihakan kepada *the powerless*.⁴⁷

Power diupayakan sebagai hal pokok yang harus dimiliki oleh semua orang atau masyarakat dalam membangun kualitas, aktualisasi dan eksistensi diri sebagai manusia. Sebab manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur baik secara normatif, struktural dan substansia. Pemberdayaan tidak lain merupakan suatu proses pembangunan individu, keluarga, masyarakat, dan negara.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, *Pertama*, kecenderungan yang bersifat primer yaitu proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kekuatan kemampuan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat menjadi lebih berdaya. *Dua*

⁴⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1990

⁴⁶ Jhon M Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

⁴⁷ Onny S Priyono dan Pranarka AMW, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996, hal 44

kecenderungan yang bersifat sekunder, yaitu suatu proses pemberdayaan yang menekankan pada tindakan yang menstimulasi, mendorong, memotivasi masyarakat atau individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan dalam menjalani kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat berintikan suatu premis bahwa masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang dan mandiri dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui proses pengembangan masyarakat yang bersandar pada dua paradigma pembangunan yaitu⁴⁸:

- a. Pengembangan masyarakat memandang positif arti perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terencana yang terbangun di atas sistim nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah peningkatan kapasitas masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kapasitas masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Proses perubahan harus didasarkan atas pengetahuan yang pasti tentang masyarakat sehingga senantiasa sejalan dengan sistim nilai dan tujuan perubahan yang dikehendaki bersama masyarakat.
- b. Masyarakat dipahami melalui *mindscape* yang berkembang dan dijadikan acuan dalam memandang hidup dan kehidupan, perubahan dan masa depan. Dalam pengertian ini, realitas dipandang sebagai keadaan yang terbentuk oleh proses sosial dan budaya masyarakat. Proses perubahan yang diharapkan terjadi harus mampu memprtimbangkan berbagi *mindscape* yang berkembang dalam masyarakat.

⁴⁸ Muslim Nasution, *Pemberdayaan Masyarakat: Tujuan Proses Pengembangan Masyarakat yang Dibangun di atas Realits*, Jurnal Studi Pembangunan Vo 2 No 1 Pasca Sarjana ITB Bandung 1999, hal 25

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah tidak mungkin dilakukan oleh institusi pemerintah saja. Keterlibatan lembaga non pemerintah yang menguasai sumberdaya informasi, teknologi, ketrampilan yang bersifat teknis sangat diperlukan. Melalui gerakan pemberdayaan diharapkan terjadi suatu proses perubahan sosial yang memberi ruang bagi masyarakat marginal untuk dapat mengangkat potensi, kesejahteraan, dan aktualisasi diri sehingga dalam jangka panjang pada gilirannya mampu memengaruhi kebijakan pemerintah agar pembangunan lebih berdimensi humanisme dan berkeadilan.

Prinsip dasar dari kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat [Usaha Kecil Menengah] yang benar adalah sejauh mungkin mengurangi investasi pemerintah dan aparat birokrasi dan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sejak dari tahap perencanaan program sampai pelaksanaan dan evaluasi program. Hal ini memiliki arti bahwa program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yang sifatnya merupakan proyek harus segera dihilangkan dan lebih diutamakan program yang dimunculkan dari masyarakat sendiri⁴⁹.

Sedangkan konsep Pemberdayaan rakyat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, yang dalam kondisi sekarang, tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

⁴⁹Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hal 126

keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya memampukan, memartabatkan, dan memandirikan rakyat⁵⁰.

B. DESAIN INDUSTRI PADA UMUMNYA.

1. Sejarah Hak Desain Industri dan Perkembangannya di Indonesia

Sejarah Desain Industri lebih dulu dibanding dengan sejarah perlindungan hukum terhadap desain. Dalam sejarah perkembangan Desain tidak akan terlepas dari perkembangan industrialisasi dan mekanisasi, serta pengaruh pertumbuhan perdagangan dunia⁵¹. Pengaturan desain mulai dikenal abad 18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Jadi wajar bila undang-undang yang pertama mengatur desain industri adalah *"The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act"* sekitar tahun 1787.

Undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan hanya dua bulan untuk selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama tiga bulan. Pada

⁵⁰ *Ekonomi Kerakyatan Cuma Retorika?*, Harian Kompas 7 Oktober 2001, hal 1, dalam www.jps.or.id.

⁵¹ Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 16

saat itu desain industri baru pada tahap dua dimensi, perkembangan selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi. Desain industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diatur melalui "*Sculpture Copyright Act 1798*". Pengaturannya pun masih sederhana meliputi model manusia dan binatang, barulah dengan undang-undang yang dibentuk pada tahun 1814, lingkup pengaturannya diperluas.⁵²

Ketentuan Undang-Undang 1839 mengatur desain industri yang lebih luas lagi, baik bentuk yang dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya digunakan dalam proses industri. Selain itu diatur pula perlunya ada pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih singkat. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain industri lebih komprehensif lagi. Lamanya perlindungan atas hak desain ini tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act 1949* perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, jadi totalnya lama perlindungan adalah 15 tahun.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai Desain Industri tidak dapat terlepas dari Hak Cipta. Pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan bidang hak Cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah

⁵² Muhamad Djumhana dan R Djubaidilah, *Hak Milik Intelektual [Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia]*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hal 152

bagian seni pakai [*applied art*]. Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Desain dan Paten tahun 1988. Pasal 51-nya memuat pemisahan antara perlindungan Hak Cipta dan Hak Desain secara jelas. Sedangkan pengaturannya dalam Undang-Undang Hak Cipta 1956, perlindungannya terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta, yaitu desain grafik, potografi, seni pahat atau kolase [*sculpture* atau *collage*], rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan.⁵³

Undang-Undang *Registered Design Act 1949*, menentukan perlindungan sebagai bagian seni pakai [*applied art*], sehingga di Inggris saat itu dikenal tiga perlindungan desain, yaitu : *design registration*, *design copyright*, dan *full copyright*. Adanya peraturan yang belum tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak tersendiri, karena latar belakang materi, dan obyek desain industri itu sendiri. Desain industri tidak bisa lepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan Hak Cipta, yaitu seperti seni lukis, seni patung dan yang lainnya. Hal ini kita lihat wujud Desain Industri itu tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.

Berbeda dengan sejarah keberadaan Desain Industri di Eropa yang bersamaan dengan terjadinya Revolusi Industri, maka sebaliknya di

⁵³Peter Groves, *Copyright and Designs Law*, Graham & Trotman, London, 1991, hal 97, Dalam, *Ibid*, hal 152

Indonesia tidak demikian. Ada perbedaan dalam sejarah Industrialisasi antara di Eropa dengan Indonesia. Terutama dari fase-fase Industrialisasi yang terjadi di Eropa tidak dialami di Indonesia, dimana proses Industrialisasi di dasari pada banyaknya penemuan-penemuan teknologi yang semuanya di dapatkan dari proses *Research and Development* sesuai dengan konteks pada waktu itu⁵⁴.

Industrialisasi Indonesia lebih berbasis pada *Foreign Investment* atau *Joint Venture Agreement*, bukan Industri yang berbasis pada *Research and Development*. Hal ini dapat dilihat dalam terjadinya proses lisensi Teknologi atau lisensi produk *Consumer Goods* seperti baju, sepatu, makanan, elektronika dan sebagainya.

Desain Industri di Indonesia bukan lahir dari proses industrialisasi sendiri. Semua desain-desain tersebut tidak di buat di Indonesia dan oleh orang-orang dari Indonesia, tetapi dibuat oleh pihak asing yang merupakan investor, yang kemudian dikirimkan ke Indonesia, kemudian di produksi secara besar-besaran di Indonesia, oleh karena itu Indonesia sempat dikenal sebagai negara “perakit”

Desain Industri masuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1970-an sebagai salah satu Program Studi di Institut Teknologi Bandung. Setelah

⁵⁴ Rizki Adiwilaga, *Penyalahgunaan Desain Produk Industri dan Rahasia Dagang Bagi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat, Yogyakarta*, Makalah Seminar “Implementasi UU Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, 4 Oktober, 2000, hal 4-5

itu diikuti oleh Universitas Trisakti dan Institut Seni Indonesia membuka program Studi Desain Industri pada tahun 1980-an, kemudian oleh 5 Universitas lainnya pada tahun 1990-an.

Pada masa itu Indonesia sendiri basis industrinya adalah kerajinan [*craftbased on industries*]. Industri-industri berbasis kerajinan inilah desain diperkenalkan seperti contohnya perabotan rumah tangga dan rotan atau bambu. Oleh karena itu Desain Industri pada masa itu sebagian besar didasarkan pada kria/kerajinan dari Desain Interior⁵⁵. Baru pada dekade 80-an, Desain Industri di Indonesia telah mengalami masa transisi menuju teknologi yang berorientasi desain berbasis teknologi modern seperti memperkenalkan industri otomotif dan pendirian BPPT. 17.

Proses perancangan dan pengembangan desain produk-produk kerajinan yang terdapat di Indonesia dan atau akan diminati oleh pasar [*design development*] atas dasar masukan dari kegiatan riset sebagai awal kegiatan.

Penyebarluasan berbagai rancangan kerajinan dan usaha perajin, dengan cara menyelenggarakan pengembangan *research and development*, para pengrajin, dengan cara menyelenggarakan penerbitan-penerbitan buku-buku panduan desain maupun pendidikan dan latihan pembuatan produk kerajinan / kriya dengan desain yang baru atau diperbaharui, serta klinik

⁵⁵ *Ibid*, hal 5

desain bagi perjain yang sewaktu-waktu memerlukan [termasuk bantuan hukum untuk industri kecil] dalam pengembangan desain.⁵⁶

Desain Industri selain bersinggungan dengan Hak Cipta dapat bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnya, misal seperti Paten maupun Merek. Hal itu karena melihat bentuknya ini serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas dari perhatian aturan Hak Cipta, Paten dan Merek. Di Indonesia Desain Industri atau Desain Produk Industri diakui memang berbeda dengan Hak Cipta. Hanya saja Hak Desain Industri tersebut dalam pengaturannya belum lengkap dan masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian pada umumnya, yaitu merupakan bagaian ketentuan UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.1984.

Dalam Pasal 17 Undang-undang No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian telah ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang Desain Produk Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Konsep pengertian tentang Desain Produk Industri di dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut adalah :

Desain Produk Industri” adalah : Suatu ciptaan atau kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau pola dri suatu barang yang dapat diproduksi oleh perorangan dan/atau perusahaan industri.

⁵⁶ Prof. Yusuf Affendi, *Peranan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Desain Industri Kriya-Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*, Makalah Seminar-Pekan Seni 1997 IKJ, 30 Juni 1997, hal.3.

Hak Desain Produksi Industri adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta desain atas desainnya untuk mendapatkan hak khusus atas desain, maka desain tersebut harus didaftarkan pada kantor desain oleh si pencipta desain yang bersangkutan.

Di dalam perkembangan selanjutnya mengenai Desain Industri di Indonesia sampai saat ini telah dibuat Undang-Undang tentang Desain Industri yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri [UUDI No 31 Tahun 2000] yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 yang diharapkan mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Desain industri.

Beberapa pertimbangan yang terkait dengan disahkannya UUDI No 31 Tahun 2000⁵⁷

1. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, sehingga perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri.
2. Kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang beragam sebagai sumber bagi pengembangan Desain Industri.

⁵⁷ Ori Timbul Hartonegoro, *Pembinaan Dan Pengembangan Desain Indusri Bagi UKM di Jawa Tengah*, Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah satu Aset Perusahaan, Kerjasama Klinik HaKI FH UNDIP, JICA [Japan International Coopertion Agency], Business Forum AOTS Dosokai Indonesia, Semarang 6 September 2001, hal 2

Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam konsideran undang-undang tersebut bahwa tujuan diterbitkannya UUDI No 31 Tahun 2000 ini untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkungan perdagangan nasional dan internasional sehingga perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, khususnya bagi para Usaha Kecil Menengah.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUDI No 31 Tahun 2000 diebutkan bahwa :

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Definisi ini mengakomodir kepentingan dari Industri kria/kerajinan yang cukup banyak di Indonesia, karena bila menggunakan definisi seperti apa adanya Desain Produk Industri hanya akan melindungi desain-desain di sektor industri manufaktur, seperti elektronik, transportasi, Militer, Otomotif dan sebagainya.

Mencermati definisi Pasal 1 ayat 1 UUDI No 31 Tahun 2000 di atas, diperoleh pemahaman bahwa ciri dari Desain Industri adalah rancangan yang digunakan dalam sebuah proses produksi, dan dapat dilihat lebih jelas bahwa Desain Industri berkaitan dengan segi estetika atau ornamentalnya bisa juga disebut seninya. Berbeda dengan Paten yang

merupakan ciptaan dari bidang tekniknya atau dari segi ornamentalnya atau hiasannya⁵⁸.

Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Harsono Adi Sumarto⁵⁹ bahwa Desain Produk Industri berkaitan dengan segi estetika atau keindahan mengenai bentuk garis atau warna daripada produk Industri.

Obyek Desain Industri⁶⁰ pada dasarnya karya berupa pola [*pattern*] yang digunakan untuk memproduksi barang melalui kegiatan/proses industri. Ciri pokok karya ini adalah kemampuannya untuk digunakan berulang kali dalam kegiatan atau proses industri. Adapun contohnya adalah produk mengenai bentuk/desain mesin mobil, botol dan lain sebagainya⁶¹

Dengan keberadaan UUDI No 31 Tahun 2000 ini, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian [Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1984 No 22 dan Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No 3274] menjadi tidak berlaku [Pasal 56 UUDI No 31 Tahun 2000].

Menurut ketentuan Pasal 10 UUDI No 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa "Hak Desain Industri atas dasar permohonan", dari hal tersebut dapat

⁵⁸ Ridwan Khaerandy, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual Jilid 1*, FH UII Yogyakarta, 1996, hal 11

⁵⁹ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, Merek*, Akademika Persindo, Jakarta, hal 16

⁶⁰ *Loc.cit*

⁶¹ Makalah Seminar Pelaksanaan Sosialisasi HaKI bagi para Pengusaha UKM di Wilayah Jawa Tengah, Kerjasama Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah dan Klink HaKI FH Undip, 12 Juni 2001

disebutkan bahwa keberadaan Desain Industri menimbulkan Hak Desain Industri, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan bahwa

Hak Desain Industri adalah hak yang eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Jadi keberadaan Hak Desain Industri lahir setelah adanya pendaftaran, dengan syarat bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru [Pasal 2 ayat 1 UUDI No 31 Tahun 2000] dan sebuah Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya [Pasal 2 ayat 2 UUDI No 31 Tahun 2000].

Hal ini sesuai dengan apa yang di definisikan oleh Ita Gambiro,SH⁶² dalam bukunya bahwa:

Hak Desain Produk Industri adalah Hak Khusus yang diberikan kepada pencipta desain atas desainnya untuk mendapatkan hak atas desain tersebut maka desain tersebut didaftarkan pada kantor desain oleh si pencipta desain yang bersangkutan”

Adapun klasifikasi dari desain industri Indonesia menggunakan ketentuan dalam “*Locarno Agreement*” sesuai apa yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 UUDI No 31 Tahun 2000, dimana salah satu ketentuannya termasuk desain-desain yang dibuat dalam kerajinan ukir.

⁶² Ita Gambiro, SH, *Desain Produk Industri*, CV. Gramedia Offset Jakarta, 1992 hal 13

Hak Desain Industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak khusus ini meliputi melaksanakan sendiri Desain Produk Industrinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi Hak Desain Produk Industri.

Desain produk yang merupakan karya intelektual dengan latar belakang nilai nilai estetik atau tradisi lokal , masyarakat Indonesia yang kaya dengan beragam etnik seharusnya tidak kalah dibanding dengan negara maju. Oleh karena itu dengan diberlakukannya UUDI No 31 Tahun 2000, hendaknya jumlah karya intelektual bidang Desain Industri yang didaftarkan oleh masyarakat Indonesia di Indonesia sendiri lebih banyak daripada yang didaftarkan di Indonesia oleh orang asing⁶³.

⁶³ Diberlakukannya UU Desain Industri Bagi Pendesain/Pengrajin Dan Industri Kecil di Indonesia, www.ristek.go.id, 2002, hal 2.

2. Pengaturan dan Ruang Lingkup Pengertian Desain Industri

a. Pengaturan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia [*World Trade Organization*] yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual/HKI [*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*], untuk selanjutnya penukis akan menggunakan singkatan *TRIPs* untuk penyebutan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* sebagaimana telah dishkan dengan UndangUndang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* [Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia]. Ratifikasi dari praturan tersebut menunjang peratifikasian Konvensi Paris [*Paris Covention of The Protection of Industrial Property*] yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement [London Act] Concerning The International Deposit of Industrial Designs*.⁶⁴

Konvensi Paris [*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*] mengatur mengenai sebagian perlindungan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang salah satunya adalah mengenai perlindungan hukum di bidang desain industri. Pengaturan Desain Industri

⁶⁴ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual [HAKI] Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1-2.

tersebut diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris dan diatur juga dalam Pasal 25 dan Pasal 26 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights [TRIPs Agreement]*⁶⁵.

Article 25 TRIPs menyebutkan bahwa:

- 1) *Member shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or oriinal if they don't significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs, designs dictates essentially bytechnical or functional considerations.*
- 2) *Each member shall ensure that requirement for securing protection for textile design, in particular in regard to any cost, examination or publication, don't unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Member shall be free to meet this obligation trough industrial*

Article 26 TRIPs menyebutkan bahwa:

- 1) *The owner of protected industrial design shall have the right to revent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying adesign which is copy, or substantialy a copy, of protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.*
- 2) *Members may provide limeted exceptions to protection of industrial design, provided that protected industrial designs and don't unreasonably prejudice the legimate interests of the owner of the protected design, talking ccount of the legitimate interests of third parties.*

⁶⁵ Insan Budi Maulana, *Undang-Undang Desain Industri dan Merek Qua Vadis*, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Kejasama Japan Institute of Invention and Innovation [JI/II/APIC], Yayasan Klinik HaKI [IP Clinic], Pusat Pengembangan dan Pelayanan HaKI LPKwu UNS [P3HaKI LPKwu UNS], Asosiasi Alumni JI/II Indonesia, FH UII, FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002, hal 3.

- 3) *The duration of protection available shall amount to at least 10 years*

Dari Pasal 25 *TRIPs* dapat dilihat bahwa:

- 1) Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap Desain Produk Industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasai beberapa desain yang dikenal. Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek-aspek teknis atau fungsional.
- 2) Negara anggota wajib menjamin persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota memiliki kebebasan untuk mengatur kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Produk Industri atau Hak Cipta.

Sedangkan Pasal 26 *TRIPs* menyebutkan :

- 1) Pemilik suatu Desain Produk Industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok merupakan tiruan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
- 2) Negara anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas terhadap perlindungan yang diberikan terhadap Desain Produk Industri, sepanjang pengecualian tersebut tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pemanfaatan secara normal atas Desain Produk Industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.

- 3) Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah maksimal kurang dari 10 tahun.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum dengan membuat pertauran perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri. Perlindungan hukum ini dimaksud untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesainan dari desain industri dan kewajiban-kewajibannya serta menjaga pihak yang tidak berhak menyalah gunakan Hak Atas Desain Industri tersebut.

Selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan *TRIPs*, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas Desain Industri yang terkenal. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas sebuah pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetika dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk tiga dimensi, hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUDI No 31 Tahun 2000.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual modern di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya *Convention Establishing the WTO/Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* [Konvensi WTO/Persetujuan *TRIPs*] dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Ratifikasi

ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian. Terdapat lima langkah strategis dalam rangka penyesuaian, yaitu⁶⁶ :

- 1) Legeslasi dan Konvensi Internasional : revisi peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HaKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang HaKI seperti Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang , juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam Konvensi-konvensi Internasional;
- 2) Administrasi : Penyempurnaan sistem administrasi pengelolaan HaKI dengan misi memberikan perlindungan hukum, dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual;
- 3) Kerjasama : peningkatan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri;
- 4) Kesadaran masyarakat : pemasyarakatan atau sosialisasi HaKI;
- 5) Penegakan hukum : koordinasi penegakan hukum di bidang HaKI.

Berkaitan dengan langkah pertama, yaitu di bidang legislasi dan konvensi Internasional, tahun 1997 Indonesia menetapkan tiga buah Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

- 1) Undang-Undang No 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang No 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1989 tentang Paten dan sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2001 Tentang Paten

⁶⁶ Supanto, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Desain Industri dan Merek, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Kejasama *Japan Institute of Invention and Innovation [JIII/APIC]*, Yayasan Klinik HaKI [*IP Clinic*], Pusat Pengembangan dan Pelayanan HaKI LPKwu UNS [P3HaKI LPKwu UNS], Asosiasi Alumni *JIII* Indonesia, FH UII, FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002, hal 3-4.

- 3) Undang-Undang No 14 Tahun 1997 Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek⁶⁷

Di samping itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan seperangkat Undang-undang baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

- 1) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri [*Industrial Designs*];
- 2) Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu [*Lay-out Designs of Integrated Circuits*]
- 3) Undang-Undang No 30 Tentang Rahasia Dagang [*Trade Secret*]⁶⁸

Indikasi geografis telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Merek. Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* [Keppres No 15 Tahun 1997]
- 2) *Patent Cooperation Treaty ["PCT"] and Regulations Under The PCT* [Keppres No 16 Tahun 1997]
- 3) *Trademark Law Treaty* [Keppres No 17 Tahun 1997]
- 4) *Berne Convention for The Protection of Literacy and Artistic Works* [Keppres nomor 18 Tahun 1997]
- 5) *WIPO Copyright Treaty* [Keppres Nomor 19 Tahun 1997]⁶⁹.

⁶⁷ Zainudin Jahisa, *Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek*, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Kejasama Japan Institute of Invention and Innovation [JIII/APIIC], Yayasan Klinik HaKI [*IP Clinic*], Pusat Pengembangan dan Pelayanan HaKI LPKwu UNS [P3HaKI LPKwu UNS], Asosiasi Alumni JIII Indonesia, FH UII, FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002, hal 8

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Menyambut Millenium III, TRIPs, Dimensi Baru HaKI Dan Kesiapan Kita*, Newsletter No 39, X/Desember/1999, hal 3

Dalam Pasal 17 Undang- Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian disebutkan bahwa Desain Industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan Industri. Dengan demikian Undang- Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut merupakan embrio bagian pengaturan mengenai pengakuan dan perlunya perlindungan atas Desain Industri. Pasal 17 Undang- Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menyebutkan pula bahwa Desain Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah tetapi sampai dengan dikeluarkannya UUDI No 31 Tahun 2000, belum di buat mengenai Peraturan Pemerintah tersebut.

Walupun demikian rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Produk Industri tersebut disebutkan bahwa Desain Produk Industri adalah suatu ciptaan atau kreasi tentang bentuk konfigurasi atau pola dari suatu barang yang dapat diproduksi oleh perorangan dan atau persahaan industri.

Pada tahun 1999, sebelum Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Desain Industri diberlakukan, Pemerintah mempunyai pandangan lain dalam mengatur Desain Industri, tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah tetapi dalam bentuk Undang-Undang tersendiri, kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 31 Tentang Desain Industri.

Dengan demikian istilah yang digunakan menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah Desain Produk Industri⁷⁰.

⁷⁰ Budi Santoso, *Loc.cit*, hal 3

Sedangkan dalam Undang-Undang Desain Industri yang digunakan adalah Desain Industri

b. Ruang Lingkup dan Pengertian Desain Industri

Dari ketentuan Pasal 1 UUDI No 31 Tahun 2000 dapat diambil pemahaman bahwa pada dasarnya Desain Industri merupakan "*pattren*" yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial, dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri, bahkan merupakan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam Hak Cipta.

Unsur lain yang menjadi pembeda dari Desain Industri adalah bahwa Desain Industri cenderung berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa secara umum dan sederhana bahwa Desain Industri melindungi ciptaan "seni pakai" sedangkan Hak Cipta melindungi ciptaan "seni murni".⁷¹

Sebuah barang yang akan diproduksi akan selalu melalui tahapan berupa perancangan. Perancangan ini bisa berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Rancangan motif untuk tekstil berbentuk dua dimensi maupun

⁷¹ Muhamad Djumhana dan R Djubaidilah, *Op.cit*, hal 156

tiga dimensi. Rancangan motif untuk tekstil berbentuk dua dimensi, sedangkan rancangan untuk barang seperti kursi, atau yang lainnya diperlukan dalam bentuk tiga dimensi. Penuangan rancangan bisa melalui media lukisan dalam bentuknya yang dua dimensi, atau melalui seni patung untuk rancangan dalam tiga dimensi, seperti *prototipe* dalam bentuk barang

Whitford⁷², membagi Desain ke dalam 2 kategori yaitu

- 1). Kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti dua dimensi, dan bentuk lain yang bersifat tiga dimensi, yang mana unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil Desain Industri tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetika dari penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum Hak Cipta. Juga tidak diperlukan pendaftaran maupun uang taggungan.
- 2). Kategori B berupa desain yang berbentuk tiga dimensi hanya bentuk Desain itu tidak memberi dorongan konsumen membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan, dan peruntukan barang tersebut.

Sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan ke dalam Desain Industri bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Rancangan tersebut adalah suatu yang baru [*novety*], dan asli [*originaly*]. Hasil karyanya tidak termasuk ke dalam bidang kesusastraan, dan bentuk seni murni. Juga dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk diproduksi secara massal melalui industri.

⁷² Whitford dalam, Muhamad Djumhana dan R Djubaidilah, *Ibid*, hal 154

Menurut Pasal 213 Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan Paten Inggris Tahun 1988, yang disebut *design right* adalah the "*design of any aspect of the shape or configuration [whether eksternal or intenal] of whole or part of the article*" rancangan seluruh aspek bentuk, atau konfigurasi apakah itu eksteranal maupun internal dari seluruh maupun bagian dari suatu barang.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pendaftaran Desain 1949 [*Registered Designs Act 1949*], pada Pasal 1 ayat [3] pengertian Desain disebutkan sebagai⁷³ :

Features of shape, configuration, pattern of ornament applied to an article by any industrial process or means, being feature which in the fisished article appeal to an judged solely by the eye, doesn't include a method or principle of construction of features of shape or configuration which are dictated solely by the function ehich the article to be made in that shape or configuration has to perfom.

Merancang sebuah produk yang akan dihasilkan industri tertentu, bisa meliputi keseluruhan aspek bentuk dan konfigurasi dari barang trsebut, atau hanya bagian tertentu saja. Langkah hasil perancangan suatu barang yang akan diproduksi secara massal tesebut selanjutnya dapat kita sebut sebagai Desain Industri. Hal ini karena penuangan seni yang diwujudkan digunakan dalam proses industri, serta mempunyai kemanfaatan untuk

⁷³ Peter Groves, dalam Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hal 39

menunjang kesuksesan pemasarannya, disebabkan barang tersebut memiliki estetika, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaannya⁷⁴.

Konvensi mengenai Desain Industri, bersatu dalam Konvensi Paris, yaitu Konvensi untuk perlindungan hak milik perlindungan perindustrian Tahun 1883. Pengelolaan dari Konvensi ini dilakukan oleh *United Biro for the Protection Intellectual Property* dalam bahasa Prancis disebut *Bivieaux International reunispour la Protction de Propriete Intellectuelle [BIRPI]* yang sekarang ini lebih dikenal dengan *WIPO [World Intellectual Property Organization]*. Badan Internasional ini sekarang berkantor di Jenewa.

WIPO memegang peran penting dalam pelindungan hak milik Intelektual secara Internasional. Walaupun badan tersebut bukan merupakan badan peradilan yang khusus ditugaskan untuk memberikan interpretasi secara uniform dari konvensi-konvensi tersebut, tetapi juga tidak melakukan pengawasan atas anggota-anggotanya, tetapi badan tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara Internasional. Badan tersebut seringkali mengadakan persiapan untuk konvensi-konvensi tersebut, dan membuatkan *draft convention*. Selain itu juga berusaha membuat model hukum yang dapat ditiru oleh negara berkembang.

⁷⁴ Muhamad Djumhana dan R Djubaidilah, *Op. cit*, hal 155

Pada tahu 1970, *WIPO [World Intellectual Property Organization]* dan *BIRP [International Bureau for the Protection of Intellectual Property]* di Jenewa, telah menyusun suatu *Model Law* [contoh Draft Undang-Undang] tentang Desain Produk Industri yang berisikan "*guiding principle*" bagi negar-negara yang sedang berkembang. Jika suatu negara ingin mempunyai Undang-Undang Desain Industri sendiri, dapat mengambil dari pedoman-pedoman prinsip-prinsip yang disusun dalam *Model Law*⁷⁵

Dalam *Model Law* ini diberikan suatu definisi tentang *industrial design* tersebut yaitu sebagai berikut:

Desain Industri adalah setiap komposissi garis-garis atau warna-warna dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa/penampilan khusus pada suatu hasil/produk industri dan dapat dipakai sebagai suatu pola/*pattern* untuk sautu hasil/produk industri

Di berbagai negara sendiri terdapat berbagai pengertian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desain Industri antara lain sebagai berikut⁷⁶:

Swedia [1970]

Negara Swedia menyebut Undang-Undang tentang desainnya dengan "*The Swedeish Design Protection Act*" yang memberikan definisi tentang Desain Industri, sebagai berikut:

"The term Design means the prototype emboyding the appearance of an article or the prtotype of an ornament"

Jepang [1960]

Jepang dalam Undang-Undang tentang Desainnya [Undang-Undang tentang *Industrial Design Law*] memberikan definisi sebagi berikut:

⁷⁵Ita Gambiro, *Op.cit*, hal 10

⁷⁶ Ita Gambiro, *Op.cit*, hal 10-11

Kategori No 2 dan 3 secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif. Sedangkan perlindungan kategori 1 merupakan satu alternatif dan tambahan saja terhadap kategori kedua.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Rancangan Industri, hasil kerjasama dengan ELLPS Project disebutkan bahwa⁷⁸:

“Rancangan Industri” merupakan istilah hukum bagi aspek tertentu dari rancangan peralatan barnag-barang bermanfaat buatan pabrik (dalam jumlah besar). Rancangan Industri ini mencakup rancangan keindahan atau hiasan produk seperti alat-alat, konsol komputer, kursi, lampu, namun umumnya tidak termasuk ciri khas fungsionalnya.

Perlindungan hukum terhadap hukum terhadap rancangan industri dapat meliputi ciri-ciri seperti warna, kombinasi warna, bentuk, dan susunan bahan. Perlindungan juga dapat meliputi ciri khas tertentu yang membuat sebuah produk menjadi lebih menarik, seperti peletakan pengikat, kancing, kenop, dan lubang celah serta orientasi permukaan yang berfungsi. Namun perlindungan hukum terhadap rancangan industri tersebut bersifat terbatas. Perlindungan tersebut tidak termasuk ciri-ciri khas fungsional suatu produk, misalnya ciri khas yang menentukan bagaimana produk itu bekerja atau bagaimana mudahnya merakit dan mereparasi produk tersebut. Apabila ciri khas fungsional demikian harus dilindungi, maka harus dilindungi berdasarkan hak paten “kemanfaatan”, yaitu dengan mempatenkan aspek kegunaan dari benda itu sendiri.

⁷⁸Ita, Gambiro, *Hak Milik Industri dan Alih Teknologi* Jakarta, Prisma, hal 18

“Desain adalah bentuk, pola atau warna atau kombinasi dari ketiga hal tersebut dari suatu produk industri yang memberikan kesan penglihatan aesthetis”

Thailand [1979]

Thailand menyebutkan tentang Desain dalam *Patent Act*, yaitu:

“Design means the shape of the product or element of drawing or color having special characteristics the product, which can be used as a form for industrial production including manufacturing.”

Amerika [1952]

Amerika mengatur tentang Desain dalam *Patent Act*.

“A Design Patent may be obtained for any new, original and ornamental design for an article of manufacture”

Inggris [1950]

Inggris menyebut Undang-Undang Desain dengan *Design Act*

“Design means those features shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process or means which in finished article appeal to and are judged solely by the eye but doesn't include a method or principle of construction or features of shape or configuration which are dictated solely by the functions which the article made”

Di Inggris dikenal 3 kategori perlindungan untuk Desain Industri⁷⁷:

- 1) *Design Registration*, hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimum 15 tahun
- 2) *Design Copyright*, Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta selama 25 tahun. Perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus orisinal dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta. Perlindungan ini pun hanya menyangkut segi perbanyakan yang tidak sah.
- 3) *Full Copyright*, Desain Industri tersebut memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur Undang-Undang Hak Cipta 1956, yaitu digolongkan sepenuhnya sebagai Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan Desain Industri yang digolongkan ke dalam sepenuhnya hak Cipta, yaitu selama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah si pencipta meninggal

⁷⁷Muhamd Djumhan dan R Djubaidilah, *Op.cit*, hal 157-158

Kategori No 2 dan 3 secara tersendiri satu sama lain bersifat eksklusif. Sedangkan perlindungan kategori 1 merupakan satu alternatif dan tambahan saja terhadap kategori kedua.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Rancangan Industri, hasil kerjasama dengan ELLPS Project disebutkan bahwa⁷⁸:

“Rancangan Industri” merupakan istilah hukum bagi aspek tertentu dari rancangan peralatan barnag-barang bermanfaat buatan pabrik (dalam jumlah besar). Rancangan Industri ini mencakup rancangan keindahan atau hiasan produk seperti alat-alat, konsol komputer,kursi, lampu, namun umumnya tidak termasuk ciri khas fungsionalnya.

Perlindungan hukum terhadap hukum terhadapaa rancangan industri dapat meliputi ciri-ciri seperti warna, kombinasi warna, bentuk, dan susunan bahan. Perlindungan juga dapat meliputi ciri khas tertentu yang membuat sebuah produk menjadi lebih menarik, sepeti peletakan pengikat, kancing, kenop, dan lubang celah serta orientasi permukaan yang berfungsi. Namum perlindungan hukum terhadap rancangan industri tersebut bersifat terbatas. Perlindungan tersebut tidak termasuk cir-ciri khas fungsional suatu produk, misalnya ciri khas yang menentukan bagaimana produk itu bekerja atau bagaimana mudahnya merakit dan mereparasai produk teresebut. Apabila cri khas fungsional demikian harus dilindungi , maka harus dilindungi berdasarkan hak paten “kemanfaatan”, yaitu dengan mempatenkan aspek kegunaan dari benda itu sendiri.

⁷⁸Ita, Gambiro, *Hak Milik Industri dan Alih Teknologi* Jakarta, Prisma, hal 18

Rancangan industri berarti aspek rancangan tiga dimensi dari sebuah barang buatan pabrik yang bermanfaat yang dapat dilihat dengan jelas oleh pemakai barang tersebut dalam penggunaan normal dan yang memenuhi syarat untuk dilindungi menurut Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah ini. Rancangan Industri memberikan pengertian, dan peraturan pemerintah ini harus melindungi, setiap khas yang terlihat dari produk bermanfaat buatan pabrik yang didikte oleh fungsi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 3, jadi, misalnya, warna, gaya, bentuk, pola, lokasi susunan bahan dan "rasa" dari setiap bagian dari barang buatan pabrik yang bermanfaat, demikian pula tata ruang dan hubungan lain dari suatu bagian ke bagian lainnya, dapat dilindungi sebagai bagaian dari rancangan industri dari barang tersebut, sepanjang tidak dibutuhkan untuk fungsi yang dijalankan oleh ciri khas ataupun barang buatan pabrik tersebut.

Rancangan Industri ini terbatas pada rancangan atas benda-benda buatan pabrik yang bermanfaat. Untuk tujuan ini sebuah barang bermanfaat dapat diuraikan sebagai sebuah barang buatan pabrik yang mempunyai fungsi pemakaian yang tidak sekedar hanya mencerminkan barangnya ataupun menyampaikan informasi. Pembatasan ini tidak termasuk barang-barang yang rancangannya dilindung secara tersendiri oleh Undang-Undang Hak Cipta, seperti gambar, lukisan, patung, dan semacamnya. Karya seni

dan rancangan secara abstrak tidak memenuhi syarat untuk perlindungan menurut hukum ini⁷⁹.

Rujukan terhadap rancangan tiga dimensi dimaksudkan untuk mengesampingkan pola-pola di atas permukaan dua dimensi, seperti halnya pola tekstil, dari perlindungan menurut Peraturan Pemerintah ini. Pola-pola dua dimensi dapat dilindungi sebagai bagian dari rancangan industri apabila merupakan bagian dari sebuah rancangan tiga dimensi yang karenanya membuatnya memenuhi syarat terhadap perlindungan berdasar Peraturan Pemerintah ini. Namun secara tersendiri, rancangan dua dimensi dapat menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan mengesampingkan rancangan dua dimensi dari perlindungan sebagai rancangan industri itu sendiri, maka konsep ini menghindarkan adanya tumpang tindih dalam perlindungan rancangan tekstil dan dua dimensi lainnya. Namun penghindaran dari tumpang tindih ini tidak disyaratkan oleh *TRIPs GATT* ataupun perjanjian Internasional lainnya. Apabila Pemerintah berkeinginan memperbolehkan perlindungan tumpang tindih ini, maka pembatasan terhadap rancangan dua dimensi dapat dihapus. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengisyaratkan rancangan dalam dua ataupun tiga dimensi.

⁷⁹ *Ibid*, hal 167

3. Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual di diskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran sebagai di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa Hak Kekayaan Intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual lahir karena kemampuan intelektual tadi.

Adapun alasan dari perlunya perlindungan adalah bahwa, karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataupun seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai asset perusahaan.⁸⁰

Tumbuhnya konsepsi kekayaan Intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai

⁸⁰ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HAKI di Indonesia*, Kerjasama FH UNDIP & Setneg RI, Semarang, 15 Desember 1994, hal 4

dengan hakikatnya pula Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud [*intangible*].

Aset intelektual adalah *intangible assets*⁸¹ yang merupakan hasil pemikiran manusia dan memiliki potensi untuk dikomersialkan. Dengan demikian cakupan aset intelektual sangat luas, tidak hanya berupa paten dan merek dagang seperti yang dikenal dulu, tetapi masyarakat sekarang sudah cukup mengerti bahwa yang dimaksud aset intelektual dapat berupa lampu pijar sampai laser, dari saklar lampu sampai pabrik, metode pembuatan suatu materi, rumus-rumus kimia, program komputer dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual ini pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak.

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu

⁸¹ *Pengertian Aset Intelektual*, www.ipr.itb.ac.id, 6 November 2002, hal 1

pula, pemilik hak diminta untuk mengungkap jenis, bentuk dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya. Ia dapat aman mengungkapkan *[discloses]* karena adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat dapat ikut menikmati atau menggunakannya atas dasar ijin, atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut.

Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua kelompok, yaitu :⁸²

- a. Hak Cipta *[copyright]*
- b. Hak atas Kekayaan Industri *[Industrial Property]* yang berisikan:
 - 1) Paten *[patent]*
 - 2) Merek *[trademark]*
 - 3) Desain produk industri *[industrial design]*
 - 4) Penaggulangan praktek persaingan curang *[repression of unfair competition practices]*

Perlu terlebih dahulu dicatat, bahwa pengenalan jenis di atas, pada dasarnya berpangkal pada Konvensi Pembentukan *WIPO [The World Intellectual Property Organization]*. *WIPO* adalah badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian persetujuann multilateral mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia merupakan anggota *WIPO* dan meratifikasi Konvensi tersebut dalam tahun 1979. *Paris Convention 1883*, terakhir diadakan perbaikan pada tahun 1979, merupakan

⁸² Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hal 5

konvensi internasional yang pertama yang mengatur mengenai Hak Milik Perindustrian [*Industrial Property*].

Dalam *Paris Convention* tercantum bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diatur yakni :

- a. Patent / paten
- b. *Utility Models* / paten sederhana
- c. *Industrial Designs* / desain industri
- d. *Marks* / merek
- e. *Trade Names* / nama dagang
- f. *Unfair Competition* / persaingan curang

TRIPs, yang merupakan bagian dari kesepakatan *World Trade Organization* [*WTO*], menyebutkan bahwa bidang Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari⁸³ :

- a. Hak Cipta dan Hak-Hak yang terkait lainnya
- b. Merek
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain Industri [*Design Product Industries*]
- e. Paten
- f. Rangkaian sirkit terpadu [*Lay Out Design* dari *Integrated Circuit*]
- g. Perlindungan atas Undisclose Information,
- h. Pengendalian terhadap praktek-praktek persaingan yang tidak sehat dalam Lisensi.

⁸³ C.Kastowo, *Strategi dan Kesiapan Indonsia, Kebijakan Perdagangan Internasional, Beberapa Catatan mengenai Penanaman Modal dan Milik Intelektual Indonesia*, Seminar *WTO*, Mekanisme Perdgangan Internasional, Antar Peluang dan Tantangan, Serta Kesiapan Indonesia, FH Atma Jaya Yogyakarta, 1 Maret 1997, hal 3.

Dengan demikian, desain industri sebenarnya sudah sejak lama menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya sejajar dengan Paten, Merek, Hak Cipta. Hanya saja di Indonesia Desain Industri masih merupakan hal baru.

Desain Industri diaplikasikan pada berbagai bentuk produk industri dan kerajinan: dari instrumen teknikal dan medikal sampai jam tangan, perhiasan dan barang mewah lainnya; dari perlengkapan rumah tangga dan peralatan elektrikal sampai kendaraan dan struktur arsitektural; dari desain tekstil sampai barang-barang hobi/kesenangan⁸⁴.

4. Desain Industri Ditinjau dari Aspek Hukum Publik dan Hukum Privat

Dari segi isinya hukum dibagi menjadi *lex generalis* dan *lex specialis*. *Lex generalis* adalah hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar, sedangkan *lex specialis* adalah hukum khusus, yaitu yang menyimpang dari *lex generalis*. *Lex generalis* merupakan dasar dari *lex specialis*. Misalnya peraturan mengenai Perseroan Terbatas, diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1995 merupakan peraturan khusus. Peraturan umumnya, *lex generalis* terdapat dalam BW. Hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* ini dituangkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁸⁴ Pengertian Desain Industri, www.ipr.itb.ac.id, 6 November 2002, hal 1.

Pembagian klasik yang sampai sekarang masih digunakan meskipun banyak diperdebatkan ialah pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat atau perdata.⁸⁵ Hukum Publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum Publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan menatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.

Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang terhadap yang lain dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk membedakan antara hukum publik dan hukum perdata.⁸⁶

Dalam hukum publik salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan dalam hukum perdata kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdata pun penguasa dapat menjadi pihak juga. Peraturan hukum publik sifatnya memaksa,

⁸⁵ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum [Suatu Pengantar]*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 110

⁸⁶ *Ibid*, Hal. 111

sedangkan peraturan hukum perdata pada umumnya bersifat melengkapi meskipun ada juga yang bersifat memaksa.

Semula kriteria yang digunakan untuk membedakan hukum perdata ialah tujuan. Tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum perdata tujuannya adalah melindungi kepentingan perorangan atau individu. Terhadap kriteria kepentingan ini ada kebratannya. Baik hukum publik maupun hukum perdata kedua-duanya tujuannya pada hakekatnya adalah kepentingan umum. Lain dari pada itu batas yang tajam antara hukum publik dan hukum perdata tidak dapat ditarik.

Kemudian timbul pendapat bahwa perbedaan antar hukum publik dan hukum perdata itu terletak pada hubungan hukum. Hukum perdata itu berhubungan dengan hubungan hukum antar negara dan individu. Kita lihat dewasa ini bahwa perkembangan hukum perdata menunjukkan makin meningkatnya campur tangan penguasa dalam hukum perdata. Hal ini dapat disaksikan dari makin banyaknya ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, makin banyaknya pembatasan-pembatasan kebebasan individu dan sebagainya. Ini semuanya menyebabkan menjadi makin kaburnya batas antara hukum publik dengan hukum perdata

Pembagian publik-perdata tidak terdapat dalam setiap sistem hukum. Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum modern.

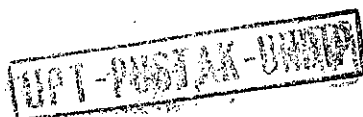
Modernitas ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai bentuk tertulis.
- b. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara.
- c. hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah bagian dari Hukum Perdata Dagang khususnya Bidang Hak Kekayaan Intelektual yang tentunya merupakan bidang Hukum Privat. Namun demikian campur tangan pemerintah dalam mengatur mengenai desain industri dapat juga digolongkan dalam hukum Administrasi Negara karena menyangkut materi mengenai prosedur dan tatacara pendaftaran Desain Industri pada pemerintah, yang mana ini masuk dalam hukum publik. Dengan demikian UUDI No. 31 Tahun 2000 memuat dua unsur sekaligus baik unsur hukum publik maupun hukum privat.

Beberapa bagian dari yang termasuk dalam UUDI No. 31 Tahun 2000 bagian hukum publik antara lain :

- a. Ketentuan mengenai pendaftaran Desain Industri pada pemerintah termasuk di dalamnya. Pendaftaran Desain Industri dengan Hak Prioritas.
- b. Ketentuan mengenai penolakan pendaftaran Desain Industri
- c. Kewajiban pencatatan pengalihan hak dengan lisensi pada pemerintah [Ditjend Hak Kekayaan Intelektual].
- d. Pembatalan pendaftaran desain industri.
- e. Penetapan biaya permohonan pendaftaran pengajuan keberatan, permintaan petikan daftar umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas desain industri, permintaan salinan sertifikat desain industri, pencatatan pengalihan hak.



- f. Ketentuan mengenai tatacara penyelesaian sengketa.
- g. Ketentuan mengenai ancaman pidana pelanggaran desain industri.

Beberapa bagian yang merupakan hukum privat, antara lain :

- a. Lingkungan Hak pemegang Desain Industri.
- b. Ketentuan mengenai pengalihan Hak Desain Industri.
- c. Hak pengajuan gugatan secara perdata atas pelanggaran desain industri, pembatalan pendaftaran desain industri.

C. Perlindungan Hukum Desain Industri

1. Perlunya Perlindungan Hukum

Seperti halnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan rancangan industri mempunyai tujuan ekonomi. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi para perancang dan mereka yang mempekerjakan para perancang untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan rancangan barang-barang ciptaan pabrik yang baru dan menarik. Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru rancangan industri baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaan. Kemudian peniruan tanpa izin oleh pendesain ini akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan rancangan baru tersebut hingga mendekati biaya marginal produksi, sehingga merampas kesempatan bagi pencipta rancangan baru tersebut untuk mendapatkan kembali biaya penciptaannya, disamping premi

resikonya. Akibatnya produsen tidak mempunyai insentif finansial untuk menanam modal penciptaan rancangan-rancangan baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi produsen memperoleh kembali investasi dalam rancangan industri, di samping premi untuk menempuh resiko penemuannya, maka perlu perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu terbatas akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam rancangan industri secara umum. Jadi, perlindungan hukum terhadap rancangan industri, seperti perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual lainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektual dengan insentif finansial terbatas.

Walaupun demikian, rancangan industri merupakan semacam hak milik intelektual khusus yang menempati posisi tengah antara perlindungan paten kemanfaatan dan hak cipta. Amerika Serikat melindungi rancangan industri terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai "paten rancangan". Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang, dan Jerman, melindungi rancangan industri dengan sistem pendaftaran yang sederhana yang terutama didasarkan atas prinsip-prinsip hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah diperoleh perlindungan hukum dan mengurangi biaya

dan beban administrasi pemerintah terhadap hukum perlindungan rancangan atau desain.⁸⁷

Kalau kita lihat bagian terpenting dari kontribusi dari seseorang *industrial designer* terhadap kualitas / produk adalah sesuatu yang “lebih” daripada yang diharapkan oleh konsumen. Di dalam salah satu *Design Center* yang pernah kami lihat, tergantung suatu tulisan dinding, yang dapat dibaca sebagai berikut : “*Don't ask a designer to design a bridge but to design a way to cross the river*”, yang berarti : “ Janganlah minta seorang desainer untuk membuat desain dari sebuah jembatan, akan tetapi untuk mendesain suatu jalan untuk menyeberang sungai itu”.

Desain industri atau *product design* adalah erat hubungannya dengan fungsi, bahan baku, teknologi serta pemasaran [produk yang *marketable*].

Berbicara tentang mendesain produk, kita dapat lihat adanya beberapa fungsi sebagai berikut :⁸⁸

- a. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain aman dan sehat buat orang yang memakai, dapat diandalkan atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi dan lain sebagainya.
- b. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa atau orang cacat.
- c. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut yang berdasarkan latar belakang sosial

⁸⁷ Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, *Model Pengembangan Hukum Ekonomi*, ELIPS, Juli 1998, Hal.1.

⁸⁸ Ita Gambiro, *Desain Produk Industri*, CV. Gramedia Offset, 1992, Jakarta *Op. Cit*, hal.16.

dan keadaan dari si pemakai, nilai simbolis, pengaruh mode, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan lain sebagainya.

- d. Fungsi estetis, yang menyangkut proporsi dari bentuk produk warna-warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus serta yang berhubungan dengan selera baik.
- e. Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari produk tersebut dan lain sebagainya.
- f. Fungsi sosial, yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut terhadap masyarakat, seperti sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara / lingkungan dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk / barang, didasarkan pada fungsi-fungsi tersebut di atas sebagian atau seluruhnya.

Desain produk industri seharusnya dipandang dan dipormosikan sebagai suatu komponen dari inovasi teknologi, terutama sebagai disiplin dari suatu pengembangan produk proses pengembangan produk berkaitan dengan :

- a. Dapatnya barang untuk dipakai [*useability*] ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan si pemakai yang berarti produk itu harus praktis, aman, mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.
- b. Produktivitas [*productivity*], ini terkait pada pemakaian dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja, prosedur manufaktur, "*know-know* dan *organizational methods*"
- c. Pemasaran [*marketability*], terkait dengan permintaan potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perseorangan, mungkin juga badan pemerintah atau badan swasta
- d. Keuntungan [*profitability*], terkait dengan cara manufaktur produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup rendah, tergantung tentunya pada ketersediaan tenaga kerja yang terampil.

- e. Kualitas estetika dari produk tersebut, ini terkait dengan penampilan dari produk tersebut secara visual, yang terdiri atas bagian-bagian yang secara keseluruhan memberikan bentuk dari suatu produk, tekstur, warna dan lain sebagainya.

Ini kesemuanya tentu berkaitan pula dengan latar belakang kebudayaan, standar sosial dan kebiasaan si pemakai produk / si-pembeli dari produk.⁸⁹ Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum atas desain industri sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya, yaitu karena hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi.⁹⁰ Adapun alasan lainnya adalah sesuatu yang menjadikan suatu produk menjadi lebih bagus dan menarik; lebih jauh lagi, dapat meningkatkan nilai komersial suatu produk dan meningkatkan kemungkinan untuk diterima pasar⁹¹.

Namun demikian, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berlebihan akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain :⁹²

⁸⁹ *Ibid*, hal. 17.

⁹⁰ IASTP Phase II, *Short Course in Intellectual Property Rights 9 Elementary*), Page 40-41.

⁹¹ *Pengertian Desain Industri, Loc.cit.*

⁹² *Ibid*, P.42.

a. Hak Monopoli Dapat Menimbulkan Harga Menjadi Mahal

Tidak ada satupun yang bisa menghalangi pencipta untuk menentukan harga yang sangat mahal sekali untuk produk dan barang yang telah diciptakan, sebab ia mempunyai hak eksklusif untuk melakukan hampir semua tindakan dengan kreasinya. Orang sering menemukan sesuatu [termasuk obat-obatan] untuk mendapatkan keuntungan investor ataupun penemu ingin mengembalikan dana riset dan pengembangan dan untuk keuntungan bagi mereka. Karena mereka punya hak monopoli atas penemuannya, mereka dapat menetapkan harga barang-barangnya. Hal ini berarti produk atau kreasi tersebut tidak dapat dibeli masyarakat luas dengan harga terjangkau. Produsen mungkin menetapkan harga yang amat tinggi bagi produknya sehingga hanya sebagian kecil orang yang dapat membayar, dalam artian sebagian besar yang lain tidak dapat menikmati manfaat dari suatu penemuan atau kreasi baru.

b. Perusahaan-perusahaan mungkin tidak Mengeksploitasi Secara Penuh Kreasi-Kreasi Penting Mereka

Apabila ada orang atau perusahaan mempunyai suatu ide, mungkin ia akan memperoleh hak untuk menunda pengembangan lebih lanjut idenya. Ada beberapa dasar yang menyebabkan hal ini. Sebagai contoh, pemilik mungkin melihat ada keuntungan dengan menyimpan idenya agar tidak memberikan keuntungan bagi pesaingnya yang mempunyai kelebihan untuk mengeksploitasinya.

Pencipta mungkin juga ingin memperoleh lebih banyak keuntungan dari produk yang ada sebelum ada produk yang baru lagi sehingga produk-produk tersebut tumpang tindih.

Sebagai contoh, perusahaan iranti lunak komputer mempunyai ide bagus bagaimana cara meningkatkan salah satu programnya, sehingga menghemat waktu dan biaya dalam operasionalnya, tetapi belum mendapatkan keuntungan yang cukup dari versi yang dirilis sebelumnya, maka ia akan menunda peluncuran program baru tersebut kepada publik. Hal ini menyebabkan tidak adanya definisi yang optimal bagi perusahaan yang menggunakan program tersebut.

c. Royalti akan menimbulkan harga yang lebih mahal dan menghemat penyebaran ilmu pengetahuan.

Apabila hukum kekayaan intelektual diberlakukan, maka mungkin saja terjadi bahwa pencipta akan dibayar untuk kreaanya. Ini berarti bahwa harga barang yang mengandung kekayaan intelektual seperti VCD, Kaset akan meningkat, dan akan menjadi lebih mahal kalau dibandingkan dengan tidak terdapatnya hukum Hak Kekayaan Intelektual. Setiap buku, film dan produk lain akan makin langka dan mahal apabila bentuk-bentuk insentif yang lebih efisien dan memakan ongkos sosial yang lebih rendah tidak diberlakukan. Hal ini berarti bahwa informasi dan teknologi mungkin tidak dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat.

2. Perlindungan Desain Industri dari Hak Cipta ke Undang-Undang Desain Industri

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri adalah Undang-Undang yang baru yang mengatur secara khusus mengenai Desain Industri, berlaku dan disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dimasukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* [Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia] yang mencakup pula *Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* [Persetujuan TRIPs] sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement [London Act] Concerning The International Deposit of Industrial Designs*.

Kebutuhan akan proteksi atas desain industri, dapat dicari alternatif lain, yaitu dengan mendaftarkan desain industri tersebut melalui hak cipta. Hak Cipta merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang secara khusus memberikan perlindungan atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra untuk sementara. Hak Cipta dapat dijadikan sarana untuk perlindungan Desain Industri.

Hal tersebut dikarenakan hak cipta juga mempunyai cukup alasan untuk dapat melindungi desain industri, karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Desain Industri juga merupakan hasil karya seni yang dilindungi Hak Cipta.
- b. Kegiatan membuat desain industri tidak terpisahkan dari kegiatan melukis, menggambar.
- c. Hasil akhir desain industri berupa gambar.
- d. Dalam *TRIPS* sendiri dimungkinkan memberikan perlindungan atas Desain Industri dalam Hak Cipta sebelum Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai Desain Industri
- e. Sejarah perkembangan pengaturan desain industri di negara maju [Inggris, AS] juga diawali Hak Cipta.

Alasan yuridis yang dapat dijadikan dasar perlindungan Desain Industri dalam hak cipta juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mengenai bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, antara lain :

Buku-buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; Tari, koreografi; Segala bentuk seni rupa seperti lukis, seni pahat, seni patung; Seni batik; Ciptaan lagu, musik; Arsitektur; Ceramah, kuliah, pidato; Alat peraga; Peta; Program komputer; Sinematografi; Fotografi; Karya pertunjukan; Karya siaran; Data Base.

Dengan demikian sejauh Desain Industri dapat dimasukkan sebagai bagian dari seni, maka tetap dapat dilindungi dengan hak cipta sepanjang Undang-Undang yang mengatur Desain Industri belum ada. Namun demikian perlindungan desain industri ke dalam hak cipta tetap saja merupakan perlindungan yang *sui generis* atau perlindungan yang bersifat sementara yang mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan seperti,

Kelebihan perlindungan hukum dengan Hak Cipta :

- a. Jangka waktu perlindungan yang lebih lama, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal
- b. Sistem pendaftaran pasif, artinya pendaftaran bukan merupakan keharusan untuk munculnya hak. Dengan demikian hak telah lahir setelah karya cipta selesai dibuat.
- c. Biaya pendaftaran relatif murah [rata-rata Rp. 75.000,- / per karya cipta].

Dipihak lain, beberapa kelemahan perlindungan Hak Cipta adalah :

- a. Kesulitan dalam pembuktian mengenai siapa yang berhak atas suatu karya cipta yang tidak diaftarkan, bila terjadi persengketaan.
- b. Status karya cipta yang didaftarkan dengan yang tidak didaftarkan hampir sama, karena pendaftaran karya cipta bukan berarti pengakuan hak pemohon.
- c. Desain Industri yang didaftarkan sebagai karya cipta dalam Hak Cipta akan diperlakukan sama dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran Desain Industri. Dengan demikian tidak ada ketentuan khusus yang diperlukan pada Desain Industri.

Dengan telah dikeluarkannya UUDI No 31 Tahun 2000, maka akan berakibat terhadap desain industri ada yang tidak dapat lagi didaftarkan dalam hak cipta. Segala ketentuan yang berkaitan dengan Desain Industri akan diambil alih UUDI No 31 Tahun 2000.

Beberapa ketentuan UUDI No 31 Tahun 2000 yang berbeda dengan hak cipta antara lain :

- a. Prinsip pendaftaran, bahwa suatu desain industri baru akan mendapat proteksi hukum apabila dimintakan pendaftaran
- b. Lingkup hak
- c. Jangka waktu perlindungan
- d. Subyek desain industri
- e. Pengalihan hak

- f. Pembatalan pendaftaran desain industri
- g. Penyelesaian sengketa
- h. Ketentuan pidana

Dalam era globalisasi suasana perekonomian dunia makin terbuka dan akibatnya barang-barang yang bermutu dan harga bersaing yang akan dapat bertahan di tengah-tengah masyarakat. Gejala ini mengharuskan pengusaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan daya saing ekonominya. Untuk itu diperlukan kecermatan yang cukup tinggi, modal yang besar, penguasaan teknologi. Secara sendiri-sendiri perusahaan-perusahaan kecil dan koperasi seolah-olah tidak berdaya. Akan tetapi jika semuanya bergerak terpadu pasti akan menjadi kekuatan besar. Tantangan besar lain yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kecil dan koperasi adalah rendahnya kemampuan manajemen yang dapat menyebabkan rendahnya efisiensi, padahal efisiensi adalah merupakan kekuatan hidup dalam perekonomian global.

Agar pengusaha kecil dan koperasi mampu menghadapi tantangan dalam era globalisasi, maka perlu terus ditumbuhkan dan ditingkatkan, kerjasama antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan disertai dengan bantuan pembinaan kemampuan manajerial, peningkatan kemampuan teknik dan mutu produksi dan lain-lain. Produk yang dihasilkan perajin perlu dilindungi hak kepemilikan

intelektualnya, dengan maksud agar pencipta dan produsen akan mendapatkan nilai ekonomis yang lebih besar lagi dari produk yang dirilis program dengan pengertian bahwa pihak lain dilarang untuk meniru, memalsu, ataupun membajak produk dari pemegang hak cipta, merek, paten dan desain industri.

Dengan demikian, salah satu aspek Hak Kekayaan Intelektual yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melakukan pembinaan usaha kecil adalah desain industri. Mengingat desain industri ini relatif masih baru pengaturannya di Indonesia, desain industri adalah suatu karya atau upaya intelektual tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang.

Sesuai dengan perjanjian *TRIPs* di bidang desain industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Industri [*Industrial Property Right*] dan hak atas kekayaan industri merupakan cabang dari Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut jelas karena obyek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain dan digunakan dalam proses industri. Oleh karena itu desain industri merupakan karya intelektual manusia sebagai pendesain yang harus mendapat perlindungan. Hal ini di kemukakan dalam penjelasan UUDI No 31 Tahun 2000.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengarah ke negara industri harus mempertimbangkan pentingnya keberadaan desain industri dalam kehidupan industrinya. Termasuk dalam hal ini untuk mengembangkan dan mendorong industri kecil dan menengah terutama industri kerajinan serta industri rumah tangga. Dalam hubungan dengan industrialisasi keberadaan desain industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan suatu negara industri akan mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai prioritas utama untuk ekspor dan devisa bagi negaranya.

3. Perlindungan Hukum melalui UU No 31 Tentang Desain Industri Pada Industri Mebel Ukir

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Desain Industri memberikan definisi tentang Desain Industri yakni suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. *TRIPs* tidak mengatur tentang definisi atau pengertian desain industri. *TRIPs* hanya mengatur kewajiban negara peserta

untuk melindungi desain industri, kriteria perlindungan, pelanggaran dan jangka waktu perlindungan.⁹³

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu desain industri harus memenuhi kriteria kebaruan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan yang telah ada sebelumnya [Pasal 2 ayat 2 UUDI No 31 Tahun 2000], yaitu pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas [Pasal 2 ayat 3 UUDI No 31 Tahun 2000]. Kriteria tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki *TRIPs* yang menyatakan bahwa "*members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original*".

Desain industri tidak mendapat perlindungan, jika desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan [Pasal 4 UUDI No 31 Tahun 2000]. Pasal 10 UUDI No 31 Tahun 2000 menegaskan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Berdasarkan keterangan ini jelas bahwa hak desain industri baru muncul bila ada pendaftaran [*registration*], tanpa pendaftaran maka tidak ada jaminan perlindungan hukum atas desain industri yang diciptakan. Konsep ini jelas sangat berbeda dengan hak cipta yang

⁹³ Nandang Sutrisno, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri*, Rahasia Dagang, DTLST, Makalah Seminar, Yogyakarta, 4 Oktober 2000, Hal. 2.

tidak mewajibkan pendaftaran untuk perlindungan hukum, hal ini disebabkan hak atas suatu ciptaan telah lahir secara otomatis setelah ciptaan selesai dibuat.

Permohonan pendaftaran diatur dalam Pasal 10-15 UUDI No 31 Tahun 2000 dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya permohonan. Surat permohonan pendaftaran desain industri tersebut harus memuat :

- a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan
- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesainan
- c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan orang atau badan hukum yang berhak atas desain industri
- d. Nama, alamat lengkap kuasa hukum apabila permohonan pendaftaran desain industri diajukan melalui kuasanya, dan
- e. Nama negara dan tanggal permohonan pendaftaran desain industri yang pertama kali dalam hal permohonan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas.

Surat permohonan pendaftaran desain industri harus dilampirkan disertai dengan :

- a. Contoh fisik atau gambar / foto dan uraian dari desain industri yang dimintakan pendaftarannya.
- b. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa hukumnya.
- c. Surat salinan sah bahwa pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran desain industri berhak atas desain yang bersangkutan.
- d. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya
- e. Tanda bukti pembayaran permohonan pendaftaran desain industri

Dalam hal pendaftaran desain industri diajukan oleh dari satu orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas desain industri tersebut, nama orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan dicantumkan semuanya. Apabila permohonan pendaftaran desain industri didaftarkan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum secara bersama, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu wakil dari yang berhak atas desain dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang atau badan hukum lainnya yang berhak.

Jika permohonan pendaftaran desain industri diajukan oleh pihak yang bukan pendesainnya, permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa yang berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Dan apabila permohonan pendaftaran desain industri yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, harus diajukan melalui kuasa selaku kuasa hukumnya di Indonesia dengan memberi kuasa khusus.

Lamanya perlindungan hukum terhadap desain industri yang terdaftar adalah selama 10 tahun, kemudian jangka waktu tersebut diperhitungkan sejak tanggal penerimaan permohonan kepada Direktorat Jenderal mencatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan telah diumumkan dalam berita resmi desain industri. Apabila jangka waktu perlindungan hukum desain industri sudah lewat, si pemilik tidak dapat

memperpanjang pendaftaran desain industri tersebut hal ini pengaturannya terdapat pada Pasal 5 UUDI No 31 Tahun 2000.

Pemeriksaan atas permohonan pendaftaran desain industri dilakukan dua tahap yaitu : pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substansi.

a. Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan Formalitas diatur dalam Pasal 24 UUDI No 31 Tahun 2000, dalam pemeriksaan ini yang diperiksa adalah permohonan pendaftaran desain industri tersebut apakah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang Desain Industri tersebut, yaitu :

- 1) Apabila permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan [Pasal 4 UUDI No 31 Tahun 2000]
- 2) Apakah permohonan pendaftaran desain industri tersebut telah ditandatangani pemohon atau konsultan selaku kuasanya [Pasal 11 ayat 2 UUDI No 31 Tahun 2000]
- 3) Apakah permohonan pendaftaran desain industri telah memuat tanggal, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon.
- 4) Nama, alamat lengkap, konsultan selaku kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan
- 5) Nama negara dan tanggal pemeriksaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan prioritas, dan lain-lain

Apabila syarat-syarat permohonan kurang lengkap, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau

kuasanya, agar memenuhi kekurangannya dalam waktu 3 [tiga] bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut.

b. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan Substantif diatur dalam Pasal 25-30 UUDI No 31 Tahun 2000 Pemeriksaan substantif baru dilaksanakan apabila ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan Desain Industri. Dalam hal ini petugas pemeriksanya adalah Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Pada prinsipnya yang berhak menerima hak tersebut dari pendesain. Apabila pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka Hak Desain Industri kepada mereka secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang Hak Desain Industri adalah atasan dari si pendesain, apabila sebuah desain dibuat berdasarkan pesanan, namun tetap dalam lingkup instansi pemerintah pemegang Hak Desain Produk Industri adalah Pemesan.

Apabila sebuah desain Industri dibuat berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain tersebut dianggap sebagi pemegang Hak Desain Produk Industri dan pendesain, kecuali hal ini diperjanjikan lain. Konstruksi hukum seperti itu hanya dapat diingkari apabila para pihak pendesain dan atau pemesan memperjanjikan lain. Artinya, dapat

saja status pemegang hak desain industri ditentukan secara berbeda. Pengalihan Hak dan Lisensi desain Industri pada dasarnya dilakukan seperti halnya bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, Desain Industri dapat dialihkan atau beralih haknya dengan cara: [Pasal 31 ayat 1 UUDI No 31 Tahun 2000]

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah
- 3) Wasiat
- 4) Perjanjian tertulis atau
- 5) Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain pengalihan hak seperti di atas, desain industri dapat dialihkan oleh pemegang dengan cara lisensi untuk melaksanakan hak untuk membuat, menjual, memakai, atau mengimpor Desain Produk Industri. Namun demikian lisensi ini dilarang memuat ketentuan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Lisensi Desain Industri diatur dalam Pasal 1 butir 14 UUDI No 31 Tahun 2000 dan Bab V Pasal 45-Pasal 47.

Jika terjadi pengalihan hak Desain Industri, maka dokumen Desain Industri yang dialihkan tersebut harus disertakan agar dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, karena pencatatan pengalihan hak adalah wajib

dilakukan dan setelah pengalihan hak tersebut dicatat kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Sedangkan pengalihan Hak Desain Industri yang dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak perlu terhadap pihak ke tiga, hal ini diatur dalam Pasal 31-36 UUDI No 31 Tahun 2000.

Dalam Undang-Undang Desain Industri ditentukan adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut hal ini diatur dalam Pasal 53 UUDI No 31 Tahun 2000 :

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan tindak pidana di bidang desain Industri.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana Desain Industri.
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri,
- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dijadikan barang bukti dalam perkara di bidang Desain Industri.
- 6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Desain Industri tersebut diancam dengan sanksi pidana baik penjara maupun denda, sanksi pidana tersebut dikategorikan dalam 2 bagian yaitu:

1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- [Tiga ratus juta rupiah].

2) Barang siapa dipidana, dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda Rp 45.000.000,- [Empat puluh lima juta rupiah]

Penyelesaian sengketa hak desain Industri dengan instrumen hukum perdata dilakukan melalui proses gugatan ke pengadilan Niaga. Ada tiga jenis gugatan yang dilakukan dalam sengketa hak desain industri, yaitu gugatan pembatalan pendaftaran desain industri [Pasal 39 UUDI No 31 Tahun 2000], gugatan ganti kerugian, dan gugatan penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 [Pasal 47 UUDI No 31 Tahun 2000]⁹⁴.

Pasal 46 dan Pasal 47 UUDI No 31 Tahun 2000:

- 1) Pemegang hak atas Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran UU Desain Industri berupa:
 - a) Gugatan ganti kerugian, dan
 - b) Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
- 2) Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga [Pasal 46 UUDI No 31 Tahun 2000]

⁹⁴ *Ibid*, hal 5

Selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. Penegakan Hukum atas Pelanggaran Desain Industri

Penegakan hukum dapat dibedakan dalam penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan penegakan hukum secara represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum secara represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan pribadi orang lain, bahwa melalui mekanisme pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan.

Dengan mengacu kepada makna penegakan hukum tersebut, maka instrumen penegakan hukum dapat pula diklasifikasikan berdasarkan instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan instrumen penegakan hukum yang bersifat represif. Instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum

kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Disamping itu, instrumen penegakan hukum yang bersifat represif meliputi juga upaya-upaya non reoresif dari aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam mendorong masyarakat mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

Instrumen penegakan hukum secara represif meliputi penjatuhan sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan hukum administratif, penjatuhan sanksi keperdataan berupa melaksanakan kewajiban hukum tertentu untuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana [tindak pidana]. Untuk pelanggaran kaidah keperdataan dimungkinkan menggunakan penyelesaian sengketa alternatif [*alternative dispute resolution*] seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi.

Tersediannya penyelesaian sengketa alternatif merupakan kebijakan yang tepat karena model seperti ini juga merupakan kebijakan yang tepat karena seperti ini juga putusan arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat [*final and binding*].

Instrumen penegakan hukum yang tersedia dalam UUD No 31 Tahun 2002 untuk melindungi hak desain Industri meliputi instrumen hukum administratif, instrumen hukum perdata, instrumen hukum pidana.

Selain itu dibuka pula peluang penyelesaian model *arbitrase* dan penyelesaian sengketa alternatif di luar mekanisme peradilan⁹⁵.

Secara pidana, berbeda dengan Jerman dan Korea Selatan yang menerapkan delik aduan terhadap pelanggaran Desain Industri, Indonesia menerapkan delik biasa terhadap pelanggaran Desain Industri. Yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan sumber daya manusia para penyidik baik polisi maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan saran untuk menegakkan hukum itu masih sangat terbatas. Hal lain yang sangat mendasar, adalah karena sistem Hak Kekayaan Intelektual termasuk Desain Industri, adalah termasuk hak perdata yang sesungguhnya, negara tidak perlu jauh mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya. Selain itu, dalam realitanya di negara-negara yang menjadi pelopor penerapan Hak Kekayaan Intelektual ternyata masalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual lebih banyak diselenggarakan secara perdata dan bukan pidana⁹⁶.

Jika delik biasa yang akan diterapkan dalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka pemerintah, polisi, PPNS, harus pro aktif melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran, apakah memperoleh laporan atau tidak. Apabila begitu banyak terjadi pelanggaran waktu tidak

⁹⁵ Salman Luthan, *Instrumen Penegakan Hukum Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST*, Yogyakarta 4 Oktober 2000, hal 4

⁹⁶ Insan Budi Maulana, *Op.cit*, hal 3

ada yang melaporkan dan pemerintah tidak melakukan tindakan tegas maka akan memperoleh kecaman dari asing yang selama ini telah cukup banyak mengalami korban pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Keadaan itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah jika tidak tegas dan akan lebih mempeburuk posisi *watch list*. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada tahun ini ke arah *priority watch list*⁹⁷. Bahkan tidak tertutup kemungkin akan mendapatkan tindakan balasan terhadap ekspor produk Indonesia ke negara- negara industri maju setelah masa transisi Hak Kekayaan Intelektual terlewati dan Indonesia harus sudah menerapkan Hak Kekayaan Intelektual secara tegas⁹⁸.

Mengenai penggunaan instrumen hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dilakukan dengan mengkriminalisasikan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan kepentingan masyarakat. Kriminalisasi adalah kebijakan pembentuk Undang-Undang menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan terlarang [tindak pidana] menjadi perbuatan terlarang atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Ada beberapa perbuatan yang ingin dikriminalisaikan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri⁹⁹

⁹⁷ *Peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia ke 26 April 2002*, www.dgip.go.id, 2002, hal 1

⁹⁸ *Loc.cit*

⁹⁹ Salman Luthan, *Op.cit*, hal 5

Perbuatan yang ingin dikriminalisaian ketentuan Pasal 54 UUDI No 31 Tahun 2000 menjadi tindak pidana Desain Indsutri ada 2 macam

Pertama, Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- [Tiga ratus juta Rupiah]. Perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 9 [adalah sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri. *Kedua*, barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak p 45.000.000 [Empat puluh lima juta Rupiah].

Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 33 adalah menghapuskan nama pendesain dalam daftar Desain Indsuri dan Berita Resmi Desain Industri karena Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas atau karena hak Desain Indsutri dialihkan. Tindak pidana tentang Desain Indsutri ini merupakan delik biasa.

Perkembangan perdagangan dan indsutri di negara-negara Barat tidak bisa dilepaskan dari peranan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan insetif kepada para inovator dan kreator dalm rangka mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang baru. Perkembangan itu dipacu oleh sistim ekonomi pasar yang mengharuskan adanya persaingan bebas dan jujur yang melekat dalam masyarakat mereka, meskipun monopoli pada hakekatnya diharamkan di negara-negara industri maju itu, namun pengecualian diberikan kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual.

Hanya pemegang Hak Kekayaan Intelektual misalnya paten, merek, desain industri, rahasia dagang yang memiliki monopoli atau hak-hak eksklusif [*exclusive right*] terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan sistim masyarakat Barat merupakan kekayaan perornagn yang tidak bisa dipengaruhi atau diganggu gugat oleh siapapun. Dan dianggap sebagai pelanggaran [*infringement*] bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Disamping itu, Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan kekayaan yang tidak berujud atau *intangible assets* yang dapat dilaihkkan bahkan diwasiatkan kepada yang dianggap berhak menerimanya¹⁰⁰.

Dengan memeperhatikan penerapan Hak Kekayaan Intelektual di negara-negara Barat maka penyelesaian tentang pelanggaran terhadap pemegang Hak Kekayaan Intelektual diselesaikan secara perdata, misalnya dengan pembayaran ganti rugi, kompensasi termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh dan biaya-biaya yag timbul untuk mengajukan gugatan, dan bukan berdasarkan pada ketentuan hukum publik dengan menerapkan, misalnya hukum pidana dengan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu ketentuan *Copyright, Design, dan Patens Act 1988* yang dimiliki Inggris tidak mencantumkan sanksi pidana, begitu pula sistim Hak Kekayaan Intelektual di Ausrtralia.

¹⁰⁰ Insan Budi Maulana, *Op.cit*, hal 3.

Keberadaan UUDI No 31 Tahun 2000, jika diperhatikan Pasal-Pasal yang ada tidak semata-mata mengatur hak-hak pribadi tetapi telah masuk pula intervensi negara, Hal ini ditandai dengan delik yang dipakai bukan delik aduan tetapi delik biasa. Jadi masalah Hak Kekayaan Intelektual bukan lagi masalah pribadi atau perdata melainkan juga termasuk ke dalam hukum publik. Jadi sistem hukum yang diterapkan adalah gabungan antara perdata dan publik¹⁰¹.

D. Usaha Kecil Menengah Dan Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Desain Industri.

Dewasa ini persaingan produk industri yang dihasilkan Usaha Kecil Menengah semakin ketat dalam rangka memenuhi selera pasar. Oleh karena itu perlu kesiapan dalam meningkatkan daya saing produknya. Kejelian melihat selera pasar merupakan peluang menentukan langkah antisipasi guna meningkatkan daya saing produk Usaha Kecil Menengah. Salah satu langkah inovatif yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri¹⁰². Penciptaan suatu Desain Industri memerlukan tenaga, biaya, pikiran, waktu yang tidak sedikit. Maka diperlukan upaya perlindungan hukum agar Desain Industri tersebut tidak

¹⁰¹ *Ibid*, hal 4

¹⁰² Ori Timbul Hartonegoro, *Op.cit*, hal 1

ditiru atau dijiplak oleh pihak-pihak yang memiliki itikad buruk dan aman sebagai salah satu aset perusahaan.

Pembinaan dan pengembangan Desain Industri bagi Usaha Kecil Menengah yang terencana dan terprogram dibarengi dengan perlindungan hukum akan meningkatkan pula usaha Pemberdayaan bagi Usaha Kecil Menengah dan mampu menumbuhkan kreatifitas dan inovasi baru, sehingga siap bersaing menghadapi pasar bebas nanti. Selama ini Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh pemerintah hanya berfokus pada masalah pembiayaan atau ketersediaan dana saja dan melupakan Aspek Hak Kekayaan Intelektual.

Usaha Kecil Menengah dengan karakteristik khas dimana hal ini bisa menjadikan kelemahan bagi Usaha Kecil Menengah, sehingga rentan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Selama ini kelompok Usaha Kecil Menengah adalah sektor yang kurang diperhatikan serta tidak mengetahui arti pentingnya pendaftaran Desain Industri dalam meningkatkan persaingan perdagangan dan kurang memiliki dana untuk mendaftarkan desain yang dimilikinya¹⁰³.

Bila kita lihat berbagai produk yang ada di pasar tradisional maupun modern, sering kita jumpai berbagai macam Merek produk terkenal

¹⁰³ *Kementrian Riset Luncurkan Oleh Desain [Program Insentif Perolehan Desain Industri]*, www.ristek.go.id, Februari 2002, hal 1

seperti sapu tangan, pakaian, sepatu, ikat pinggang dan lainnya. Mereknya pun bermacam-macam, antara lain *Gianni Versace*, *Kenzo*, *Louis Vuitton*, *Lea*, *Nike*, *Piero* dan masih banyak yang lain begitu pula dengan Desain Industri. Padahal belum tentu produk tersebut asli dari pemegang Merek atau Desain Industri yang bersangkutan. Banyak dari produk tersebut hasil meniru desain dari produk berkelas yang kemudian diadopsi oleh industri-industri di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak produk yang diproduksi industri-industri di Indonesia yang diberi merek-merek yang terkenal. Produsen tersebut seolah tak peduli bahwa apa yang mereka lakukan telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual dan itu merupakan suatu bentuk kejahatan.

Usaha Kecil telah terbiasa meniru sehingga tidak ada motivasi untuk berkreasi dalam menciptakan produk baru. Untuk itu, kreativitas dan daya inovasi harus ditanamkan termasuk rasa kebanggaan terhadap karya sendiri, karena produk sendiri belum tentu kalah kualitasnya jika dibanding dengan produk asing.

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum atas Desain Industri diharapkan akan memberikan sinergi yang nyata bagi Usaha Kecil Menengah untuk besaing di pasar bebas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini. menggunakan metode penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya ¹⁰⁴, menjelaskan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Pendekatan yuridis empiris, ini digunakan untuk menemukan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁰⁵ dan untuk mendapatkan data di lapangan yang bersifat melengkapi data sekunder, dengan melakukan ivetarisasi hukum positif, yaitu:

1. Melakukan identifikasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku terhadap aspek Desain Industri dan ketentuan mengenai upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, dengan

¹⁰⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 10.

¹⁰⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 43

menggunakan konsep hukum sebagai tata hukum yaitu struktur dan perangkat hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta dalam bentuk tertulis, maka disini hukum diidentifikasi sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat yang berwenang yaitu antara lain: Undang-Undang No 31 Tentang Desain Industri, Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Usaha Kecil, Keppres No 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan, Kepmenkeu No 1251/KMK.013/1998 Tentang Tata Cara Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan pejabat yang berwenang lain pada tingkat di bawahnya.

2. Mengumpulkan norma-norma hukum itu
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistim yang menyeluruh

Iventarisasi terhadap hukum positif ini merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain. Sebelum dapat ditemukan norma hukum *in*

concreto atau ditemukan teori-teori tentang proses kehidupan hukum, haruslah diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam hukum positif yang sedang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan sesuai untuk diterapkan *in concreto*¹⁰⁶.

Selanjutnya pendekatan empiris dilakukan untuk mencari data di lapangan atau data primer yang digunakan untuk menjelaskan dan melengkapi data sekunder yang telah ada sebelumnya.

B. Spesifikasi Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu, penelitian eksploratoris, yang dilakukan apabila gejala yang akan diselidiki masih kurang bahkan tidak ada, penelitian eksplanatoris yang dilakukan apabila penelitian bermaksud menguji hipotesa-hipotesa tertentu, dan kemudian penelitian diskriptif, yaitu apabila penelitian tersebut bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala lainnya¹⁰⁷.

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian diskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 12

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 9

yang diteliti.¹⁰⁸ Dikatakan diskriptif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis faktual, akurat mengenai fenomena yang diselidiki¹⁰⁹, yaitu mengenai pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri, di Kabupaten Jepara.

Sehubungan dengan sifat dan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas maka penelitian ini memiliki spesifikasi diskriptif analisis yaitu akan berusaha mencari data yang seteliti mungkin tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum Desain Industri di Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai permasalahan yang dirumuskan pada akhirnya dibuat suatu diskripsi faktual dan akurat terhadap hasil penelitian sehingga pada akhirnya menggambarkan fenomena yang diselidiki.

C. Populasi dan Sampling

Populasi atau *universe* adalah¹¹⁰ seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini keseluruhan objek yang akan diteliti adalah pengusaha/pengrajin ukir di Kabupaten Jepara yang tergolong

¹⁰⁸Ronny Hanintjo Soemitro, *op.cit*, hal 97-98

¹⁰⁹Moch. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 63

¹¹⁰*Ibid*, hal 44

usaha kecil menengah berdasarkan UUK No 9 Tahun 1995 serta yang terdaftar di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Penelitian tidak dilakukan pada semua populasi, akan tetapi hanya dilakukan pada sebagian populasi adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan objek penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling¹¹¹.

Penentuan sampel ditentukan dengan cara *Probability Sampling design* dengan bentuk *Random Sampling*¹¹², lazimnya *probability sampling design* digunakan apabila data tentang populasi yang akan diteliti adalah cukup lengkap dan diketahui¹¹³. Mengenai penentuan besarnya sampel yang diambil dapat ditentukan dari sifat-sifat populasinya, apabila sampel yang diambil populasinya bersifat homogen maka sampel yang diambil tidak harus berjumlah banyak¹¹⁴. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dari populasi yang bersifat homogen karena kriteria dari usaha kecil menengah menggunakan ketentuan dasar yang sama yaitu berdasar Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, dan sampel yang diambil adalah berjumlah 10 Responden dari para pengrajin ukir baik para pengrajin yang mempunyai bentuk badan usaha ataupun yang berbentuk bukan badan usaha dalam hal ini usaha perorangan. Selain para Usaha

¹¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 1991, hal 43

¹¹² *Ibid*, hal 46

¹¹³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 28

¹¹⁴ Bambang Waluyo, *op.cit*, hal 45

Kecil Menengah pengrajin ukir juga diambil sebagai Responden adalah, adalah pihak-pihak dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jepara, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Tengah.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jepara, adapun pertimbangan di pilihnya Kabupaten Jepara sebagai lokasi penelitian adalah:

1. Usaha Kecil Menengah di Kabupaten. Jepara merupakan kelompok usaha yang cukup besar di Jawa Tengah, sehingga memiliki potensi cukup signifikan memberikan sumbangan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil menengah.
2. Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Jepara lebih banyak bergerak di bidang kerajinan ukir yang memiliki potensi yang prospektif untuk pengembangan dan perlindungan hukum atas desain industri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari¹¹⁵:

1. Data Primer, adalah data yang untuk pertama kalinya diperoleh di lapangan secara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu, yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan nara sumber dan dengan penyebaran kuisioner pada responden.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melalui penelusuran pustaka antara lain mencakup data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan, meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan, selanjutnya adalah karya ilmiah berupa laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berujud laporan, buku harian, makalah, artikel, arsip, dan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data yang digunakan mencakup:

1. Daftar pertanyaan/kuisioner, tipe kuisioner yang digunakan adalah tipe kuisioner dengan jawaban tertutup¹¹⁶, terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus berisi beberapa kemungkinan jawaban untuk dipilih.
2. Wawancara yang difokuskan [*focused interview*]¹¹⁷ terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam wawancara ini, responden yang diwawancara mempunyai

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 12

¹¹⁶ Ronny Hanintjo Soemitro, *op.cit*, hal 62-63

¹¹⁷ Moch. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 60-61

I. Sistematika Tesis

BAB I : Menguraikan mengenai Latar Belakang yang digunakan dalam penulisan tesis ini sehingga menampilkan alasan dari perumusan masalah yang akan diambil.

BAB II : Menguraikan mengenai Kajian Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini disajikan beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu pokok bahasan mengenai pengantar umum pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta Desain Industri, pengaturan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah serta Desain Industri, keterkaitan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dengan Desain Industri dan hubungannya dengan cabang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan penerapan ketentuan Desain Industri bagi Usaha Kecil Menengah

BAB III : Menguraikan mengenai Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini mencakup Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan seterusnya.

BAB IV : Berupa hasil-hasil pembahasan, dari perumusan permasalahan yang disampaikan pada BAB III dan

pengkajian dari hasil penelitian di lapangan dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum terhadap Desain Industri di Kabupaten Jepara.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Perlindungan Hukum Desain Industri di Kabupaten Jepara

Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian mengenai Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum terhadap Desain Industri Desain Industri khususnya khususnya pada pengrajin mebel ukir di Kabupaten Jepara, untuk hal itu dapat disajikan hasil penelitian dan selanjutnya sebagai titik tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Demografi Kabupaten Jepara-Jawa Tengah

Kabupaten Jepara terdiri dari 9 kecamatan dan 108 desa penduduk Kabupaten Jepara hingga akhir tahun 2000 mencapai sekitar 910 ribu orang yang terdiri dari 447.411 orang laki-laki dan 463.564 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang senantiasa menunjukkan penurunan. Pada akhir tahun 910 ribu orang, sehingga jumlah pertumbuhan pertahun hanya 20.000 orang atau 2,5% saja. Dengan demikian rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Jepara adalah 86 Jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan yang paling padat penduduk

adalah Kecamatan Jepara dengan 1.400 jiwa/km² dan terendah adalah Kecamatan Karimunjawa dengan 108 jiwa/km² ¹²⁰.

Wilayah kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Bangsri yang saat ini jumlahnya mencapai 145.868 orang dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Karimunjawa dengan penduduk 8.589 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia kerja yang dapat terserap diberbagai lapangan pekerjaan terdiri sebagai berikut, bidang industri 131.376 orang [13%], pertanian 156.023 orang [14%].

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri menempati posisi strategis dalam penyerapan tenaga kerja. Apalagi keberhasilan sektor industri ini juga terkait dengan sektor perdagangan, jasa dan perhubungan. Sedangkan sektor pertanian menempati urutan kedua dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan yang mulai mengarahkan struktur ekonomi ke bidang industri dengan tetap memberikan perhatian pada bidang pertanian, sehingga kelestarian swasembada pangan dapat dipertahankan.

Salah satu ciri yang telah begitu melekat dengan Jepara adalah predikatnya sebagai "Kota Ukir". Ukir kayu telah menjadi idiom kota kelahir¹²¹an Raden Ajeng Kartini ini, dan bahkan belum ada kota lain

¹²⁰ *Demografi*, www.kabjepara.com, Februari 2002, hal 1

yang layak disebut sepadan dengan Jepara untuk industri Kerajinan mebel dan ukir. namun untuk sampai pada kondisi seperti ini, Jepara telah menapak perjalanan yang sangat panjang.

Berawal dari kerajinan tangan menjadi industri kerajinan, terutama dipandang dari segi sosial ekonomi, ukiran kayu Jepara terus melaju pesat, sehingga Jepara mendapatkan predikat Kota Ukir, setelah berhasil menguasai pasar nasional. Karena perkembangan jaman dari pasar nasional kemudian berkembang ke pasar internasional. masa keemasan ekspor mebel ukir Jepara terjadi pada dekade '90-an dimana setiap bulannya tidak kurang dari 800 kontainer dikirim dari Jepara ke luar negeri. Keadaan ini sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat Jepara, bahkan ketika badai krisis melanda Indonesia sejak tahun 1997, masyarakat Jepara relatif lebih mampu mengatasinya dibanding masyarakat daerah lain. Bahkan khusus bagi para eksportir, turunya nilai rupiah terhadap dolar Amerika menambah keuntungan perusahaannya¹²².

Disamping itu, perluasan dan intensifikasi pasar terus dilakukan dalam rangka mehunjang peningkatan ekspor serta perluasan pasar internasional dengan penganekaragaman produk yang mempunyai

¹²² *Produk*, www.jepara.go.id, , November 2002, hal 1

potensial, serta peningkatan *market intelligence* untuk memperoleh transportasi pasar luar negeri. Dengan demikian para pengusaha dapat dengan tepat dan cepat mengantisipasi peluang serta tantangan yang ada di pasar internasional. Sementara itu jaringan informasi terus dilakukan melalui pengefektivan fungsi dan kegiatan *Buyer Reseption Dish* yang ada di Jepara. Langkah-langkah konseptual yang dilakukan secara terus menerus ini telah berbuah keberhasilan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat Jepara, berupa peningkatan kesejahteraannya.

2) Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Potensi Usaha Kecil Menengah Pengrajin Mebel Ukir di Kabupaten Jepara.

Dalam era pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini Jepara telah secara dini mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satu yang sangat mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang solid dalam otonomi daerah yang punya tantangan dan peluang besar, adalah penataan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Dalam penataan ini didasarkan pada efektifitas dan efesiensi kerja, sehingga potensi daerah dapat dikembangkan sebaik mungkin oleh seluruh perangkat daerah yang ada, dengan hasil yang dapat dirasakan secara maksimal.

Otonomi daerah memberi peluang besar bagi Pemerintah daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah sebaik mungkin sesuai

dengan kebutuhan dan kepentingan sendiri. Seluruh sumber daya yang dimiliki daerah menjadi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan pembangunan daerah. Beberapa sumber potensi daerah yang dulu belum tergarap secara maksimal, kini dalam kesempatan otonomi daerah merupakan tantangan nyata bagi pemerintah dan juga seluruh masyarakat Jepara.

Pada saat ini Jepara sedang serius mengurus peningkatan pendapatan daerah, dari berbagai sumber, terutama yang selama ini belum diusahakan secara maksimal. Beberapa bidang yang mempunyai potensi perubahan bagi income daerah adalah industri mebel, pertanian, perikanan darat, kekayaan laut, pariwisata dan industri kecil. Sektor-sektor tersebut selama ini memang sangat membantu perekonomian masyarakat, namun belum mampu untuk memberi kontribusi lebih banyak pada penambahan pendapatan daerah¹²³.

Kegiatan usaha di bidang mebel ukir di Jepara tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten yang meliputi seluruh hampir wilayah Kabupaten yang meliputi 9 Kecamatan dan 108 desa. Industri mebel ukir di Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun perkembangannya semakin meningkat, dengan nilai produksi pada tahun 1997 Rp 518.652.000 dan

¹²³ *Pemerintahan*, www.pemkabjepara.com, Februari 2002, hal 1

pada tahun 2001 sebesar Rp 636.412.200, hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1.
Perkembangan Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga
[Mebel Ukir] di Jepara

No	Uraian	Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1	Nilai Produksi (Juta Rp)	518.662.000	779.428.000	834.784.280	835.108.600	836.412.200
2	Jumlah Tenaga kerja terampil	58.895	57.1	58.208	58.208	58.21
3	Jumlah Unit usaha (unit)	5400	8100	7.013	7.01	7.00
4	Investasi Industri Non PMDN/PMA (Juta Rp)	0	0	0	0	0
5	Jumlah Investasi (Juta Rp)	3.847.328	4.187.575	41.187.575	41.187.575	41.187.577
6	Volume Ekspor (buah)	34.200.000	88.721078	0	0	0
7	Nilai Ekspor (Ribu US\$)	97.431.125	147.175.138	201.417.844	200.514.801	0
8	Nilai Ekspor barang kerajinan (US\$)	97.431.125	147.175.138.45	188.261.410.30	184.126.210.2	0
9	Jumlah Sentra Industri Kecil	133	178	180	180	180
10	Jumlah Unit Pelayanan Teknik (UPT)	1	1	1	1	1
11	Jumlah Lingkungan Industri (LIK)	0	0	0	0	0
12	Jumlah Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan	5	5	5	5	5
13	Jumlah Tenaga Penyuluh					
	a. Spesialis	1	1	1	1	1
	b. Generalis	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jepara

Berdasarkan data dalam Tabel 1 nampak bahwa jumlah pengusaha/pengrajin industri mebel senantiasa meningkat dari tahun ketahun, baik dalam bentuk badan usaha seperti : PT, CV, namun banyak juga yang berbentuk usaha perorangan yang hampir sebagian besar berasal dari Usaha Kecil Menengah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa potensi Usaha Kecil Menengah di Jepara sangat dominan dari segi

jumlah, dimana seharusnya Usaha Kecil Menengah dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pemerintah dan menerima apresiasi yang layak terhadap keberadaanya.

Pertambahan jumlah unit usaha ini membawa akibat pula pada pertumbuhan nilai investasi dan bertambahnya nilai produksi dan bertambahnya nilai ekspor mebel di Jepara, dikarenakan hampir seluruh hasil kerajinan mebel ukir di Jepara diekspor ke Luar negeri.

100% Responden [10 orang] mengatakan bahwa mereka Usaha Kecil Menengah tahu bahwa produk yang dihasilkannya yang berasal dari pesanan, akan dibawa dan diekspor ke luar negeri tanpa harus memikirkan prosedur ekspor dan cara untuk menarik konsumen [*buyer*] dari pihak asing karena ada seseorang yang akan melakukan ekspor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai Nomor Wajib Pajak [NPWP]
- b. Mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan [SIUP], atau mendapat izin usaha dari departemen Tekhnis/Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.

Hal ini jauh dari pemahaman Usah Kecil Menengah karena dirasakan sangat sulit untuk melakukan upaya-upaya tersebut di atas, mereka hanya menerima order dari pihak yang biasanya sudah dari beberapa tangan. Menerima order adalah hal yang terpenting buat mereka tanpa harus memikirkan hal lainnya.

Industri kerajinan mebel ukir di Kabupaten Jepara mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun tidak hanya dari kuantitas jumlah pengrajin, tetapi juga terhadap produk yang dihasilkannya. Industri kerajinan mebel di Jepara tidak hanya terbatas pada mebel ukir tetapi perkembangan mebel biasa pada saat ini sedang menjadi tren di Jepara yang biasa disebut mebel "*garden*" ataupun mebel-mebel *out door* yang bahan dasarnya sudah mulai bervariasi terdiri dari kombinasi gabungan antara kayu dan baja atau besi.

Dari hasil penelitian terhadap 10 responden dapat diperoleh data bahwa 100% pengrajin juga memproduksi mebel-mebel *out door/garden*, berdasarkan pesanan pihak pembeli yang sebagian besar berasal dari luar negeri yang tentunya memiliki konsep desain yang berbeda dengan mebel ukir. Meskipun sebenarnya industri mebel ukir bisa dikatakan setali tiga uang dengan industri mebel biasa dikarenakan tidak akan ada kerajinan ukir jika tidak ada mebel yang dibuat terlebih dahulu.

Pembuatan produk mebel *out door* membawa, kemungkinan untuk hilangnya kesempatan besar terhadap upaya pengembangan perlindungan hukum terhadap Desain Industri, karena desain *mebel out door/garden* tidak memiliki desain khusus yang dimiliki oleh Jepara karena sifatnya yang universal. Jika mebel ukir mulai ditinggalkan, potensi perlindungan desain Industri di Jepara akan mulai hilang, karena

desain mebel ukir Jepara adalah khusus yang tidak semua daerah memilikinya.

Kondisi kerajinan industri mebel ukir di Jepara Jawa Tengah, memasuki awal tahun 2001 ini bagai orang yang tengah dilanda sakit parah. Padahal baru sekitar tiga sampai empat tahun terakhir memperoleh rizeki besar yang tidak terduga. Permintaan ekspor mencapai 1.000-1.200 peti kemas tiap bulan. Keuntungan yang diraih berlipat ganda, dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap dollar merosot tajam, hal ini disampaikan Ketua Asmindo Jepara Akhmad Fauzi SE.

Perolehan keuntungan besar itu menjadi bumerang bagi pengrajin, pengusaha, eksportir industri kerajinan mebel ukir di Jepara. Mereka berlomba-lomba membeli berbagai jenis barang berharga, dan memperbanyak unit kerja. Jumlah perajin melonjak menjadi lebih 4000-4500 orang dan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 8000 orang.

Menurut Akhmad Fauzi, masyarakat industri kerajinan mebel ukir di Jepara lupa untuk memperhatikan kualitas produksi, bahan baku, sehingga produk Mebel ukir Jepara ditolak pembeli, seiring dengan itu kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin menguat, dan pembeli luar negeri mulai tahu tentang situasi harga sebenarnya di Jepara, akibatnya banyak pengusaha asing henggang dari Jepara, dan mengalihkan usahanya ke tempat lain seperti Semarang, Solo, Klaten dan sekitarnya, sehingga ekspor merosot drastis tinggal 150-200

kontainer per bulan. Memasuki tahun 2002 pasar ekspor industri kerajinan mebel ukir Jepara di 68 negara, khususnya di Eropa mulai kembali normal, tetapi tantangan yang dihadapi masyarakat pengrajin mebel ukir Jepara juga semakin ketat, khususnya menyangkut mutu produksi.

Usaha Kecil Menengah di Jepara memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang secara maksimal, karena jumlahnya yang besar dibandingkan dengan usaha menengah keatas dan usaha besar, sehingga Usaha Kecil Menengah diharapkan lebih bisa memberikan kontribusi nyata dalam pendapatan daerah dan potensi yang besar terhadap perlindungan hukum Desain Industri dari produk yang dihasilkannya.

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum terhadap Desain Industri terhadap hasil produksi Usaha Kecil Menengah yaitu mebel ukir nyaris terlewatkan. Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah bisa dikatakan hanya berkutat pada masalah permodalan saja. Meskipun sebenarnya masalah proses pemberdayaan Usaha Kecil Menengah bisa diterjemahkan atau dilakukan dengan berbagai cara dan strategi.

Proses pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Jepara dilihat dari peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai sebagai landasan yuridis konstitusional, diantaranya Undang-Undang No 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun

1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah No 44 Tentang Kemitraan. Kebijaksanaan dasar pemberdayaan Usaha Kecil Menengah diarahkan pada penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil Menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri [Pasal 4 Undang-Undang Usaha Kecil No 9 Tahun 1995].

Pembinaan dan pengembangan tersebut dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peningkatan kemampuan Usaha Kecil Menengah agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, secara operasional hal tersebut diiterjemahkan dalam 7 [tujuh] bidang strategi pemberdayaan, yaitu pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, prizinan usaha, perlindungan [Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Usaha Kecil No 9 Tahun 1995].

Pemerintah Kabupaten Jepara memfokuskan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada aspek peningkatan jiwa kewirausahaan [*enterpreneurship*], kemampuan dan ketrampilan/teknis usaha, penguasaan teknologi, penguatan permodalan, kemitraan usaha, dan penciptaan iklim usaha yang sehat. Secara kuantitatif proses pemberdayaan sampai dengan tahun 2001 telah dilakukan terhadap 278

buah sentra industri kecil termasuk didalamnya 180 buah sentra industri kecil kerajinan umum yang di dalamnya termasuk kerajinan mebel ukir, bidang pengolahan pangan 41 buah, pengolahan sandang dan kulit 17 buah, kerajinan logam 7 buah.

Jumlah Unit Usaha mencapai 12.179 buah terdiri dari 9.515 buah unit usaha kerajinan umum dimana didalamnya termasuk industri mebel, 830 buah unit usaha pengolahan pangan, 338 buah unit usaha pengolahan sandang dan kulit, 1.317 buah unit usaha pengolahan kimia dan bahan bangunan, serta 179 buah unit usaha kerajinan logam.

Pendirian berbagai Sentra Industri dan Unit Pelayanan Teknik [UPT], Lingkungan Industri [LIK], membantu pendirian Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan [KOPINKRA], Penyediaan tenaga penyuluh lapangan baik spesialis maupun generalis merupakan hal yang dapat dilihat dari upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

Pihak Bank baik Bank Swasta maupun Bank Pemerintah sendiri sebenarnya juga telah membuka peluang yang sangat luas terhadap Usaha Kecil Menengah yang ingin mendapatkan kredit dari Bank untuk mengembangkan usahanya. Bahkan berdasarkan pengalaman krisis moneter, dimana Usaha Kecil Menengah lebih bisa bertahan dibandingkan dengan Usaha Menengah ke atas dan Usaha Besar, Pihak Bank lebih membuka kesempatan pada Usaha Kecil Menengah, tetapi

berdasarkan hasil penelitian Data yang dihimpun dalam penelitian ini diambil dan diolah dari isian daftar pertanyaan/kuisisioner yang disebarkan pada 10 pengrajin mebel ukir yang termasuk kategori Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa:

Tabel 2.
Peran Bank Swasta/Pemerintah dalam Pemberian Modal Usaha

Uraian	A		B		C		D		Total	
	F	%	F	F	F	%	F	%	F	%
Peran Bank dalam pemberian kredit	1	10	2	20	4	40	3	30	10	100

Sumber Hasil Penelitian Yang diolah

Catatan, F: Frekuensi dan:

A. Kredit dari Bank

B. Kredit dari Koperasi

C. Kredit dari Juragan Kayu

D. Tidak ingin ambil kredit

Dari responden yang ada [dari pengrajin ukir mebel ukir yang termasuk Usaha Kecil Menengah], hanya 10 % yang mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit dari pihak bank baik itu bank swasta, sehingga mereka memilih Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang bisa membantu mereka dalam memperoleh pinjaman modal usaha. 20% responden memilih pinjam modal kepada Koperasi dimana mereka menjadi anggotanya, sedangkan 30% responden memilih untuk tidak mendapatkan kredit dari pihak Bank, Koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya karena mereka ingin berusaha sendiri tanpa harus kredit dari pihak lain meskipun mereka sudah ditawarkan.

Sebagian besar responden [40%] memilih mendapatkan bantuan modal usaha dengan cara hutang kayu secara pada Juragan kayu karena menurut mereka terdapat alasan yang lebih menguntungkan dengan mendapatkan modal dari mereka, yang utama adalah tidak ada jaminan pinjaman tanah seperti apa yang dilakukan oleh Bank dan cara yang tidak terlalu rumit, cukup dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor [BPKB] mereka akan mendapatkan nilai kredit yang sama besar dengan yang diberikan pihak bank.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2002 sebenarnya juga telah memberikan dana simultan¹²⁴ kepada kelompok-kelompok pengrajin di semua bidang industri termasuk industri mebel, untuk pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yaitu sebesar Rp 285.000.000, yang dibagikan melalui bantuan dana bergulir, Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah [Perda] No 18 Tahun 2001.

Di dalam pelaksanaannya 100% responden mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan bantuan dana simultan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, begitu pula dengan bantuan dalam bentuk lainnya seperti penyuluhan manajemen, ataupun pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

¹²⁴ Wawancara dengan Noor Inayah, Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah 30 Oktober 2002.

3. Perlunya Perlindungan Hukum Desain Industri pada Desain Mebel Ukir Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Berawal dari apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Hak Kekayaan Intelektual [Desain Industri] belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah bahkan bisa dikatakan terabaikan.

Secara konseptual dan filosofis sistem Hak Kekayaan Intelektual tidak melakukan pengelompokan antara kelompok Usaha Kecil Menengah dan non-Usaha Kecil Menengah. Jika kemudian muncul pengaturan khusus yang berkaitan dengan Usaha Kecil Menengah, hal itu lebih pada penerapan pelaksanaan kebijakan. Hal ini juga berlaku secara internasional seperti yang telah beberapa kali dibicarakan dalam berbagai forum internasional¹²⁵.

Sosialisai dari pemerintah dirasakan sangat kurang sekali, karena masih mengandalkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini termasuk pula Kanwil Kehakiman dan Hak Asasi Manusia¹²⁶. Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2002 belum memiliki anggaran khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya adalah Desain Industri,

¹²⁵ A Zen Purba, *Sistem Hak Kekayaan Intelektual Dan Kaitannya Dengan UKM*, Disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001, hal 1.

¹²⁶ Wawancara dengan Noor Inayah, Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah 30 Oktober 2002.

hal ini tidak sebanding dengan potensi dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap Desain Industri yang ada di Jepara.

Berbagai sosialisasai Hak Kekaya Intelektual termasuk Desain Industri yang termasuk baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan pemerintah tidak sampai pada para pengrajin, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang termuat dalam Tabel 3 di bawah ini bahwa 80% responden menyebutkan bahwa mereka belum pernah atau bahkan belum pernah mendengar tentang berbagi bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta yang seharusnya sudah mereka ketahui terlebih dahulu, begitu pula Desain Industri yang termasuk hal baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Tabel 3.
Sosialisasi Desain Industri

Uraian	A		B		Total	
	F	%	F	F	F	%
Sosialisasi Desain Industri.	2	20	8	80	10	100

Sumber Hasil Penelitian Yang diolah

Catatan, F: frekuensi dan:

A. Tahu

B. Tdak tahu

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara baru menempatkan usulan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun anggaran 2003 untuk Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan

alokasi dana Usaha Kecil Menengah di bidang Hak Kekayaan Intelektual belum ada.¹²⁷

Pada tahun 2001 pernah diminta oleh Pemerintah Pusat Propinsi Jawa Tengah untuk mengirimkan usulan daftar produk-produk mebel ukir guna mendapatkan subsidi bagi pengusaha yang mengajukan perlindungan hukum terhadap produknya, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya.

Pengrajin yang termasuk golongan Usaha Kecil Menengah memang tidak menyadari pentingnya perlindungan Desain Industri. Dari 10 pengrajin mebel di Kabupaten Jepara berpendapat bahwa hanya 2 orang responden mengatakan bahwa Desain Industri mebel agar dapat dilindungi segi hukum yang berlaku hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4.
Perlunya Perlindungan Desain Industri

Uraian	A		B		Total	
	F	%	F	F	F	%
Perlunya Perlindungan Desain Industri	8	80	2	20	10	100

Sumber Hasil Penelitian Yang diolah

Catatan, F: Frekuensi dan:

A. Tidak Perlu karena bebas meniru dan boleh ditiru

B. Perlu karena merupakan asset perusahaan

¹²⁷ Wawancara dengan Noor Inayah, Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah 30 Oktober 2002.

Penciptaan suatu Desain Industri mebel ukir oleh pengrajin perlu mendapat perlindungan hukum, karena Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana di dalam karya intelektual tersebut terdapat hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi dari para pendesain, pemilik atau pemegang hak atas Desain Industri.

Disamping hal tersebut di atas, proses penemuan atau penciptaan Desain Industri memerlukan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang diperlukan. Perlindungan Desain Industri khususnya Desain Industri mebel ukir di Kabupaten Jepara adalah penting untuk merangsang kreatifitas para pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru.

Desain Industri dapat dijadikan daya saing bagi perusahaan/pengusaha dalam persaingannya dengan produk lain yang sejenis, maka sudah sewajarnya apabila Desain Industri yang merupakan asset perusahaan patut mendapat perlindungan hukum. Adapun yang menjadi alasan atau pertimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Keunggulan komparatif perusahaan
- b. Mempunyai nilai ekonomi
- c. Sebagai alat bersaing
- d. Dibutuhkan biaya, tenaga, pikiran, untuk membuat atau menciptakan

- e. Peniruan merusak harga dalam pasar, karena semakin banyak produk yang sejenis beredar dipasar
- f. Untuk menghargai kreasi orang lain
- g. Harga jual produk tinggi apabila tidak banyak peniruan/penjiplakan.

Tabel 5.
Cara Pembuatan/Penciptaan Desain Industri Mebel

Cara Pembuatan Produk	A		B		C		D		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
	0	0	4	40	0	0	6	60	10	100

Sumber Hasil Penelitian Yang diolah

Catatan, F: Frekuensi, dan:

- A. Ciptaan sendiri
- B. Pcsanan
- C. Pengembangan
- D. Peniruan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa desain mebel yang dipasarkan, hampir semuanya untuk diekspor berasal dari peniruan desain yang telah ada atau sedang trend bahkan ada semacam tukar informasi terhadap desain yang sedang trend di suatu daerah secara sukarela, [60%] responden, sedangkan yang berasal dari pemesanan [40%].

Data ini menunjukan bahwa desain mebel yang dibuat tidak selalu hasil ciptaan sendiri, karena keterbatasan modal untuk melakukan

inovasi akan tetapi banyak juga pengrajin yang membuat desain mebel ukir sesuai dengan pesanan *buyer* di luar negeri. Dari segi ekonomi pembuatan desain mebel ukir sesuai dengan pesanan memang lebih menguntungkan karena pasti terjual, sedang dari segi hukum kemungkinan besar dapat terhindar dari *claim* atas desain tersebut karena ia hanya sebagai penyelesaian akhir dan bukan pencipta.

Mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Desain No 31 Tahun 2000, maka desain yang dibuat atas dasar pesanan atau hubungan kerja dengan pihak lain maka pembuat desain tersebut dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali diperjanjikan lain.

Pendaftaran desain harus dilakukan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, suatu jarak yang cukup jauh dan cukup alasan untuk merasa enggan mendaftarkan, walau bisa dilakukan melalui kuasa. Untuk suatu hal menggembirakan apabila dalam waktu dekat setiap Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diberi wewenang untuk menerima berkas permohonan pendaftaran sehingga dapat mendorong minat pendaftaran Hak atas Desain Industri walaupun keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.

Pemerintah melalui Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur pasar dalam bentuk melarang perbuatan atau akibat perbuatan tertentu dalam pasar, maka semakin baik alokasai sumber daya,

persaingan dalam pasar akan menciptakan alokasi sumber daya manusia dan alam yang optimum di bidang produksi dan distribusi barang dan jasa. Alokasi sumber daya efisien dipandang sebagai membawa kemanfaatan umum. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 bertujuan [Bab II Pasal 3]:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha,
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1999, menyebutkan: Persaingan Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Para pengrajin sendiri jika mendapatkan pesanan yang mengharuskan dia menjaga desain tersebut agar tidak diketahui orang lain, mereka akan patuh terhadap hal tersebut dengan tidak menjual bahkan diperlihatkan pada orang lain desain tersebut, hal ini dikarenakan perjanjian bisnis belaka bukan kesadaran perlindungan hukum terhadap Desain Industri atau karena desain tersebut telah dilindungi atau belum,

dan jika selesai perjanjian bisnis telah selesai maka mereka bebas menjual produk yang sama dengan pihak lain.

Perlindungan Desain Industri mempunyai tujuan ekonomis, perlindungan ini memberikan *insentif finansial* bagi para pendesain dan mereka yang mempekerjakan para pendesain untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan desain barang-barang ciptaan pabrik yang baru dan menarik, tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru desain industri baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya.

Peniruan tanpa seizin/persetujuan oleh pesaing ini akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan desain baru tersebut sehingga mendekati marginal produksi, dan pada akhirnya merampas kesempatan bagi penciptaan desain baru dan hak untuk mendapatkan kembali biaya penciptaan desain baru tersebut disamping premi resikonya, akibatnya produsen tidak mempunyai *insentif finansial* untuk menanamkan modal penciptaan desain-desain baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Memberikan kesempatan bagi produsen memperoleh kembali investasi dalam desain, di samping premi untuk menempuh risiko penemuannya maka desain industri perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu terbatas akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam desain industri, seperti perlindungan hukum terhadap hak milik

intelektual lainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektual dengan insentif finansial yang terbatas.

Desain Industri merupakan semacam hak milik intelektual khusus yang menempati posisi tengah antara perlindungan paten kemanfaatan dan hak cipta. Amerika Serikat melindungi rancangan industri terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai “paten rancangan”. Pada umumnya negara lain, termasuk Jepang dan Jerman, melindungi desain industri dengan cara sistem pendaftaran yang sederhana yang terutama didasarkan atas prinsip-prinsip hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah diperoleh perlindungan hukum dan mengurangi biaya dan beban administrasi pemerintah terhadap hukum perlindungan rancangan/desain.¹²⁸

Kebutuhan akan barang-barang yang berkualitas baik adalah suatu hal yang tidak asing lagi di masyarakat ini. Di dunia yang berubah ini, kesadaran dari individu dan masyarakat sebagai keseluruhan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan perbaikan-perbaikan kualitas kehidupan. Kesadaran yang bertambah meningkat ini, dalam hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam dunia persaingan membuat suatu perusahaan selalu berjuang untuk menghasilkan kualitas-kualitas produksi yang lebih baik.

¹²⁸ Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, Model Pembangunan Hukum Ekonomi, ELIPS, Juli 1998, Hal. 1.

Bagian terpenting dari kontribusi dari seorang “*industrial designer*” terhadap kualitas/produk adalah sesuatu yang lebih dari pada yang diharapkan oleh si-konsumen. Di dalam salah satu *Design Center* yang pernah kami lihat, tergantung suatu tulisan dinding, yang dapat dibaca sebagai berikut:

“Don’t ask designer to design a bridge but to design a way cross the river”.

Yang berartinya :

Jangan minta seseorang designer untuk membuat design dari sebuah jembatan, akan tetapi untuk mendesain suatu jalan untuk menyebarang sungai itu.

Desain Industri atau product design adalah erat hubungannya dengan fungsi, bahan baku, teknologi serta pemasaran [produk yang *marketable*].

Berbicara tentang mendesain produk, kita dapat lihat adanya beberapa fungsi sebagai berikut¹²⁹

- a. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain aman dan sehat buat orang yang memakai, dapat diandalkan atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi dan lain sebagainya.
- b. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa atau orang cacat.
- c. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut yang berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari si-pemakai, nilai simbolis, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan lain sebagainya.

¹²⁹ Ita Gambiro, *Op.cit*, hal. 16

- d. Fungsi aesthetis, yang menyangkut proporsi dari bentuk produk warna-warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik serta yang berhubungan dengan selera baik.
- e. Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari produk tersebut dan lain sebagainya.
- f. Fungsi sosial, yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut terhadap masyarakat, seperti sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara/lingkungan dan lain sebagainya.

Dari ketentuan pemahaman yang disampaikan Ita Gambiro tersebut di atas maka dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk/barang, didasarkan kepada fungsi-fungsi tersebut di atas baik fungsi secara keseluruhan ataupun sebagian atau seluruhnya.

Desain produk industri seharusnya dipandang dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari suatu pengembangan produk proses pengembangan produk berkaitan dengan :

- a. Dapat barang untuk dipakai [*useability*] ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan si-pemakai yang berarti produk itu harus praktis, aman, mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan
- b. Produktivitas [*productivity*] ini terkait pada pemakaian dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersediannya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada, ketrampilan, dan pengalaman tenaga kerja, proses manufaktur, "*know-know dan organizational methods*".
- c. Pemasaran [*marketability*] ini terkait dengan permintaan yang potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut,

mungkin perorangan, mungkin juga badan Pemerintah atau badan swasta.

- d. Keuntungan/laba [*profitability*] ini terkait erat dengan cara manufaktur produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi dengan harga yang cukup rendah, tergantung tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang terampil.
- e. Kualitas aesthetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan penampilan dari produk tersebut secara visual, yang terdiri dari bagian-bagian yang secara keseluruhan memberikan bentuk dari suatu produk, texture, warna dan lain sebagainya.

Ini semuanya tentu berkaitan pula dengan latar belakang kebudayaan, standard sosial dan kebiasaan si pemakai produk/produksi pembeli dari produk¹³⁰

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum atas Desain Industri sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya, yaitu karena hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi¹³¹

Dikalangan pengusaha/pengrajin mebel, terutama yang tergolong menengah kebawah perilaku meniru dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : kalangan pengusaha/pengrajin mebel menengah ke bawah berpendapat bahwa perilaku meniru dianggap sebagai perbuatan biasa atau lajim, sekalipun merasa tidak setuju terhadap perilaku semacam itu.

¹³⁰ *Ibid*, hal. 17

¹³¹ IASTP, Phase II, *Short Course in Intellectual Property Rights (Elementary)*, P. 40-41

Pandangan yang demikian didasarkan pada anggapan bahwa keterampilan mendesain merupakan keterampilan yang turun temurun dan dianggap sebagai milik masyarakat secara komunal.

Sedangkan bagi pengusaha yang tergolong besar berpendapat bahwa perilaku meniru untuk saat ini masih dapat ditolilir, karena untuk menindak atau menuntut pelakunya dalam banyak hal akan mengalami kesulitan. Namun di masa mendatang perilaku semacam itu harus dihilangkan, sebab kalau dibiarkan sama saja mendidik pengusaha atau pengrajin meubel untuk melakukan jalan pintas, tanpa kerja keras, tanpa perencanaan yang matang dalam mengantisipasi perkembangan dunia usaha¹³²

Berdasarkan nilai-nilai komunal tersebut masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan meniru karya orang lain termasuk meniru desain industri merupakan hal yang biasa dan dalam batas-batas tertentu masih dapat diterima masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang merasa bangga kalau hasil karyanya ditiru oleh orang lain, oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dalam suatu daerah tertentu terdapat beberapa orang membuat barang yang sama dengan desain yang sama pula¹³³.

¹³² Wawancara Dengan Para Pengusaha/Pengrajin Meubel Di Kabupaten Jepara, Tanggal 30 November 2002.

¹³³ *Ibid*

Konsumen Indonesia sebagai tujuan bagian masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunal, tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat disekelilingnya. Sebagai individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia selalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.

Industrialisasi di Indonesia berbasis pada *Foreign Investment* atau *Joint Venture Agreement*, bukan industri yang berbasis *Research and Development*, hal tersebut dicirikan dengan terjadinya proses lisensi-lisensi teknologi atau lisensi-lisensi produk *consumer goods* seperti : baju, sepatu, produk makanan, elektronika dan sebagainya, dengan struktur industri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan industri seperti itu, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan industri pada awalnya berasal dari si Investor, khusus untuk Desain Industri pada awalnya berasal dari si Investor.

Pada Desain Industri keberadaannya di Indonesia bukan lahir dari proses industrialisasi itu sendiri. Semua desain-desain tersebut tidak dibuat di Indonesia dan oleh orang-orang [Pendesain] Indonesia, namun dibuat oleh *Principel* di Negara Investor, yang kemudian dikirimkan ke Indonesia, lalu baru di produksi secara masal di Indonesia, oleh karena itu Indonesia sempat lebih dikenal sebagai negara Parakit.

Pada dekade 80-an, Desain Industri industri di Indonesia telah mengalami masa transisi menuju teknologi yang berorientasi desain dari desain berbasis kerajinan dengan mengembangkan industri yang berbasis teknologi modern, seperti memperkenalkan industri otomotif dan pendirian BPPT¹³⁴

Di negara industri. Desain Industri sangat berperan dalam sektor industri manufaktur, sedangkan apabila kita berbicara mengenai Desain Industri di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari sektor industri kerajinan di Indonesia. Desain Industri tidak hanya di dalam industri Manufaktur tetapi juga industri kerajinan. fenomena ini terjadi di negara-negara berkembang.

Kehidupan kerajinan di Indonesia yang berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat tradisional agraris, tumbuh dari :

- a. Lingkungan kehidupan dan kebudayaan tradisional agraris
- b. Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang ada di sekitar kehidupan yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dari lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerajinan memiliki sifat-sifat yang spesifik baik dalam mutu, seni dan teknologi maupun daya gunanya.

¹³⁴ Ita Gambiro, *Op.Cit.*, Hal. 22.

Manufaktur tetapi juga industri kerajinan. fenomena ini terjadi di negara-negara berkembang.

Kehidupan kerajinan di Indonesia yang berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat tradisional agraris, tumbuh dari :

- a. Lingkungan kehidupan dan kebudayaan tradisional agraris
- b. Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang ada di sekitar kehidupan yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dari lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerajinan memiliki sifat-sifat yang spesifik baik dalam mutu, seni dan teknologi maupun daya gunanya.

Pertumbuhan industri khususnya di Kabupaten Jepara telah meningkat pesat dan mampu menjangkau pasar internasional bahkan bisa dikatakan peningkatan secara cepat, ini dikarenakan adanya beberapa penyesuaian dalam segi mutu dan daya gunanya yang terdiri dari :

- a. Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan
- b. Aspek *Health Safety* [kesehatan dan keselamatan] bagi pengguna.
- c. Aspek *Durability of material and construction* [kesehatan bahan dan konstruksi] dari produknya.
- d. Aspek *standart of quality* [standart dari kualitas] dari produknya sendiri, yang mampu mendukung fungsi

1994 dan didalamnya termasuk salah satu pengaturan tentang Desain Industri.

Dalam UU Desain Industri, perlindungan atas Desain Industri diberikan apabila ada permohonan, hal ini berarti harus ada upaya secara aktif dari pendesain untuk melakukan pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap desain yang banyak beredar di masyarakat tidak akan mendapat perlindungan hukum apabila tidak dimintakan pendaftaran pada pemerintah. Di lain pihak bagi pendesain sendiri, belum terbiasa dengan budaya pendaftaran dikarenakan berbagai alasan.

Maka perlu diupayakan langkah tertentu dalam rangka untuk tetap memberikan perlindungan hukum atas Desain Industri [khususnya Desain Mebel]. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip UU Desain yang baru. Di lain pihak upaya prinsip pemberian perlindungan Hak Atas Desain Industri dengan pendaftaran tetap dilakukan, tetap harus dilakukan pula upaya lain agar pendesain mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan untuk perlu mendapatkan perlindungan hukum.

4. Perlindungan Hukum Desain Industri Mebel Ukir berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Kabupaten Jepara sudah dari dulu sangat terkenal sebagai tempatnya para ahli ukir bahkan telah melegenda, tetapi bila kita cermati pertumbuhan industri mebel meningkat pesat dan mampu menjangkau

pasar internasional baru diawal tahun sembilan puluhan. Hal ini bila dibandingkan dengan tenaga ahli yang ada di Jepara terjadi semacam regenerasi ketrampilan terjadi secara turun temurun secara alamiah. Kenyataan ini yang menempatkan Jpara memiliki keunggulan komperatif sebagai pemasok kebutuhan furniture/mebel tingkat dunia.

Dari segi hukum, Disain Industri memasuki babak baru dengan adanya Undang-Uandang yang khusus mengatur tentang Disain Industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tetang Disain Industri. Undang-Undang ini diharapkan mampu mengakomodasi barbagai kebutuhan perlindungan atas Disain Industri, yang selama ini tidak mempunyai aturan tersendiri dan perlindugannya hanya terbatas pada Hak Cipta.

Peralihan pengaturan Desain inbdustri dari Undang-Undang Desain Industri membawa akibat banyaknya Desain Industri khususnya mebel tidak mendapat perlindungan hak dari peniruan oleh pihak lain dikarenakan sebagian besar desain mebel yang dipasarkan tidak dimintakan pendaftaran. Keberadaan UUDI No 31 Tahun 2000 diharapkan mampu dapat menjamin perlindungan Desain Industri maupun kepada pendesain dan Pemegang Hak atas Desain Industri khususnya Desain Industri mebel ukir di Jepara

Perekonomian nasional kita menganut sistem perekonomian yang terbuka, sehingga mempunyai konsekuensi masuknya barang dan

jasa dari negara lain berupa impor, dan menyalurkan barang serta jasa negara berupa ekspor. Dari sisi pembangunan nasional, kegiatan ekspor dan impor mempunyai arti yang strategis terutama dalam pertumbuhan perkonomian nasional, yaitu mampu laju pembangunan dan dapat pula meningkat kesempatan kerja serta kemampuan berusaha.

Menurunnya nilai rupiah sebagai akibat gejolak mata uang maka peluang untuk meningkatkan ekspor hasil industri non migas lebih besar, karena dalam kondisi ini harga barang-barang ekspor kita relatif menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Kondisi ini hendaknya dipergunakan untuk lebih memacu ekspor hasil industri kita.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut, salah satu pihak yang mempunyai peranan yang cukup strategis adalah komoditi industri meubel yang telah berhasil menembus pasaran ekspor ke berbagai negara, dari hasil survey Kabupaten Jepara bisa menjadi terkenal karena memang Jepara memiliki tenaga-tenaga yang melimpah ruah. Saat ini ada sekitar 60.000 tenaga *[skill]* pengrajin yang ditampung oleh sekitar 6.000 pengusaha mebel. Jadi boleh dikatakan bahwa Jepara hampir tidak ada saingan dalam satu dekade terakhir ini di tingkat dunia.

Pada tahun 1990 Jepara mulai ekspor ke negara Eropa, Amerika dan Asia 100 container setiap bulan, dan meningkat terus rata-rata setiap

bulan 150-200 container dan pada puncaknya tahun 1998-1999 mampu ekspor 800-100 container per bulan

Keadaan tersebut ada sisi lain yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak terutama pemerintah untuk lebih memberikan iklim usaha yang sejuk dan kondusif, dengan demikian Jepara akan mampu berperan dalam menyumbang *Product Domestic Bruto* dan membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi krisis multidimensional di Indonesia.

Maka sudah saatnya Pemda Jepara dan Pemerintah Pusat turut memperhatikannya atau memberikan perhatiannya dalam bentuk jaminan kepastian perlindungan hukum terhadap Desain Industri bagi pengusaha/pengrajin mebel di Kabupaten Jepara tidak hanya memiliki keunggulan komparatif melainkan juga keunggulan kompetatif dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Perlindungan Hukum Atas Hak Desain Industri mebel yang akan memberikan jaminan demi kelangsungan perindustrian bagi pengusaha/pengrajin mebel khususnya di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Dan sejauh manakah lingkup perlindungan/syarat untuk mendapat perlindungan dan yang tidak mendapat perlindungan serta sistem perlindungan itu sendiri diberikan, jangka waktu perlindungan, subyek,

pengusaha/pengrajin mebel di Kabupaten Jepara tidak hanya memiliki keunggulan komparatif melainkan juga keunggulan kompetatif dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Perlindungan Hukum Atas Hak Desain Industri mebel yang akan memberikan jaminan demi kelangsungan perindustrian bagi pengusaha/pengrajin mebel khususnya di Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Dan sejauh manakah lingkup perlindungan/syarat untuk mendapat perlindungan dan yang tidak mendapat perlindungan serta sistem perlindungan itu sendiri diberikan, jangka waktu perlindungan, subyek, lingkup baik, hal ini akan penulis jelaskan secara garis besarnya serta dikaitkan dengan Konsep Desain Industri dalam persetujuan *TRIPS*.

a. Lingkup Perlindungan/Syarat Untuk Mendapat Perlindungan Desain Industri

Desain Industri yang mendapat perlindungan hukum adalah desain baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya [Pasal 2 ayat 2].

Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang telah diumumkan atau telah digunakan di Indonesia atau

di luar Indonesia sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak Prioritas [pasal 2 ayat 3]. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

Suatu pameran Desain Industri mengakibatkan kehilangan kebaruan bila melewati 12 [dua belas] bulan terhitung dari tanggal penerimaan, yang dimaksud pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang dimaksud pameran yang diakui sebagai resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diakui atau diperoleh persetujuan dari pemerintah.

Jika dikaitkan dengan Konsep Desain Industri dalam Persetujuan *TRIPs* terdapat dalam : *Article 25* Perjanjian *TRIPs* yaitu:

- 1) Negara anggota dapat memberikan perlindungan Desain Industri yang baru atau yang orisinal.
- 2) Negara anggota menetapkan bahwa Desain Industri dianggap tidak baru apabila:
 - a) Benar-benar tidak berbeda dari desain yang dikenal sebelumnya atau
 - b) Benar-benar tidak berbeda dari kombinasi ciri-ciri beberapa desain sebelumnya.

Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan sudah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Pasal 4 yaitu Hak Desain Industri tidak dapat diberikan perlindungan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, keteriban umum, atau kesusilaan [pasal 4].

b. Sistem Perlindungan

Desain Industri memakai sistem perlindungan atas dasar yang pertama kali melakukan pendaftaran [Pasal 12]. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan bagi yang pertama kali mengajukan permohonan akan bersifat tetap apabila tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan selama jangka waktu mengajukan keberatan, yaitu selama tiga bulan terhitung dimulainya pengumuman.

c. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan 10 [sepuluh] tahun terhitung sejak tanggal penerimaan [*Filling Date*] [Pasal 5 ayat 1]. Dari hal ini dapat penulis simpulkan bahwa terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal dipenuhinya kelengkapan mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh Desain, dan membayar biaya.

Hal ini sesuai dengan *article 26* ayat 3 Persatuan *TRIP's* yang menjelaskan bahwa lamanya perlindungan Desain Industri paling tidak

10 tahun. Adapun subyeknya yaitu Perorangan, beberapa orang atau badan Hukum sebagai diatur dalam Pasal 6, Pasal 1 butir ke 2.

Pemegang Hak memiliki hak khusus untuk melaksanakan Desain Industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain tanpa persetujuannya memakai, membuat, menjual, mengimpor produk yang diberik hak Desain Industri Pasal 9 ayat 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada waktu hak khusus atau Hak Eksekutif diberikan, maka terkandung pula larangan terhadap pihak lain tanpa seijin pemegang Hak Desain Industri.

Dikaitkan dengan *article 26* ayat (1), persetujuan *TRIP'S* menjelaskan bahwa pemilik Desain Industri yang diberik perlindungan mempunyai hak untuk mencegah pihak lain tanpa seijin dalam hal membuat, menjual atau mengimpor barang-barang yang merupakan perwujudan Desain Industri miliknya, atau mewujudkan desain tersebut dengan mengkopi, pada dasarnya memperbanyak secara foto copy, sejauh tindakan tersebut untuk tujuan komersial. Istilah mencegah dalam *article* ini mengandung arti yang lebih luas, karena istilah mencegah bisa dilakukan dari memberi peringatan lebih dahulu [bisa dalam bentuk somasi] dan kemudian baru melarangnya.

Pada dasarnya Desain Industri yang dapat perlindungan hukum yang di atur dalam Undang-Undang Desain Industri ini adalah:

- 1) Apabila Desain Industri tersebut terdaftar dalam daftar umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 2) Apabila Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya itu baru.
- 3) Desain Industri dianggap baru apabila belum pernah diumumkan atau telah pernah digunakan melalui cara apapun sebelum tanggal prioritas apabila permintaan diajukan dengan prioritas.

Pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Desain Industri dilakukan dua tahap yaitu : pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substansi.

1) Pemeriksaan Formalitas

Yaitu diperiksa dalam pemeriksaan formalitas adalah permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Desain Industri tersebut, yaitu :

- a) Apakah permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketertiban umum atau kesusilaan [Pasal 4].
- b) Apakah permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut telah ditandatangani pemohon atau konsultan selaku kuasanya [Pasal 11 ayat 2].

- c) Apakah permohonan pendaftaran Desain Industri telah memuat tunggal, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain.
- d) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon.
- e) Nama, alat lengkap, konsultan selaku kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan
- f) Nama negara dan tanggal pemeriksaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan prioritas, dan lain-lain.

Apabila syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Desain Industri tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau konsultan selaku kuasanya, agar kekurangan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 [tiga] bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.

2) Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif baru dilaksanakan oleh pemeriksa apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya.

Pemeriksaan yang memeriksa substantif tersebut adal pejabat ada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Pada prinsipnya yang berhak menerima Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain [Pasal 6 ayat 1 UUDI No 31 Tahun 2000]. Apabila pendesain terdiri dari

beberapa orang secara bersama-sama, maka Hak Desain Industri kepada mereka secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain [Pasal 6 ayat 2 UUDI No 31 Tahun 2000].

Pemegang Hak Desain Industri adalah Atasan dari si Pendesain, apabila si Pendesain bekerja di sebelah Instansi Pemerintah atau apabila sebuah desain dibuat berdasarkan pesanan, namun tetap dalam lingkup Instansi Pemerintah Pemegang Hak Desain Produk Industri adalah Pemesanan [Pasal 7 ayat 1 UUDI No 31 Tahun 2000].

Apabila sebuah Desain Industri dibuat berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Produk Industri dan Pendesain, kecuali diperjanjikan lain.

Konstruksi hukum seperti itu hanya diingkari apabila para pihak [Pendesign dan Atasan atau Pemesan] memperjanjikan lain. Artinya, dapat saja status Pemegang Hak Desain Industri ditentukan secara berbeda.

Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri pada dasarnya dilakukan seperti halnya bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, Desain Industri dapat dialihkan atau beralih haknya dengan cara [Pasal 31 UUDI No 31 Tahun 2000]:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Perjanjian tertulis atau

- e) Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain pengalihan hak seperti di atas, Desain Industri dapat dialihkan oleh Pemegang dengan cara Lisensi untuk melaksanakan hak untuk membuat, menjual, memakai atau mengimpor desain Produk Industri.

Namun demikian Lisensi ini dilarang memuat ketentuan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Jika terjadi pengalihan hak atas Desain Industri, maka dokumen Desain Industri yang dialihkan tersebut harus disertakan agar dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual karena pencatatan pengalihan hak adalah wajib dilakukan dan setelah pengalihan hak tersebut dicatat kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Sedangkan pengalihan hak Desain Industri yang dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak terlalu terhadap pihak ketiga.

Dalam undang-undang Desain Industri ditentukan adalah Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut [Pasal 53 UUDI No 31 Tahun 2000]:

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan tindakan pidana Desain Industri.
- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri.
- d) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri.
- e) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta
- f) Melakukan penyitaan terhadap bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara di bidang Desain Industri.
- g) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

**B. Faktor-Faktor Yang Menghambat dalam Pemberdayaan Usaha Kecil
Menengah melalui Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri
Mebel Ukir di Kabupaten Jepara**

1. Faktor Internal

Faktor internal, disini akan disampaikan mengenai faktor yang menghambat yang berasal dari Pengrajin sendiri,

- a. Pengetahuan, masih terbatasnya pengetahuan pengrajin mebel terhadap peraturan perundangan yang berlaku khususnya menyangkut Desain Industri
- b. Pemahaman, pengrajin mebel belum paham prosedur pendaftaran dan arti penting pendaftaran Desain Industri mebel.
- c. Ekonomi, para pengrajin mebel merasa keberatan dengan adanya biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran, disamping itu tempat pendaftaran yang jauh di Jakarta memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar.
- d. Budaya, bahwa Desain Industri mebel merupakan hal yang sudah lama ada dan merupakan kegiatan yang turun-temurun sehingga sudah menjadi milik masyarakat [*komunal*].

Bagi pengusaha/pengrajin mebel di Kabupaten Jepara semua responden [100%] tidak melakukan pendaftaran terhadap Desain Industri, dari desain mebel ukir yang mereka buat, alasannya di samping karena tidak mengetahuinya adanya ketentuan perlunya pendaftaran dalam Undang-

Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya perlindungan hukum atas Hak Desain Industri mebel ukir. Kalaupun ada yang mengetahui mereka tidak begitu berkepentingan untuk mendaftarkan, karena manfaat nyata tidak dapat dirasakan, di samping itu untuk mengurus pendaftaran tentunya membutuhkan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit. Sehingga bagi mereka yang penting dapat memproduksi dan memasarkan secara lancar dengan memperoleh keuntungan dari kerja keras yang dilakukan.

Adanya unsur pendaftaran bagi karya intelektual manusia khususnya desain industri agar dapat jaminan perlindungan hukum. Menurut Bill Morrow bagi negara-negara dikalangan Asia dipandang akan menjadi kendala, karena corak semacam itu terasa asing dan hanya ada sebagai peninggalan kolonialisme yang keberadaannya bertentangan dengan tradisi hukum asia yang lebih nampak bercorak komunal¹³⁶

Hal ini menurut Sutoyo dalam bukunya yang berjudul dalam Revrisord Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan menyatakan bahwa ciri-ciri umum keterbelakangan usaha kecil di Indonesia, disebabkan oleh :

¹³⁶ Bill Morrow, *Tourism, Batik and Pashion : Intelektual Property Rights Issue*, Makalah Conferensi Internasinal Haki, Yogyakarta, 2-6 Nopember 1997, Hal. 1

- a. Masalah Permodalan
- b. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh bantuan dari bank.
- c. Sebagian besar masih menggunakan teknologi tradisional.
- d. Pangsa pasar cenderung menurun.
- e. Melakukan pemasaran langsung kepada konsumen.
- f. Mempunyai tingkat ketergantungan yang besar terhadap fasilitas dari pemerintah¹³⁷

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan dalam hasil penelitian Pusat Pengembangan Bisnis Lembaga Pengembangan Kewirausahaan [Puspangnis LPKwu] Universitas Sebelas Maret Surakarta, bahwa ada 8 kelemahan pada Usaha Kecil Menengah¹³⁸ yaitu:

- a. Kurang mampu memanfaatkan peluang bisnis.
- b. Kurangnya kemampuan dalam di bidang manajemen pengembangan bisnis.
- c. Kurangnya kemampuan mengakses pasar.
- d. Kurang mampu mengakses sumber-sumber dana dan modal usaha.
- e. Keterbatasan wawasan perencanaan pengembangan usaha.
- f. Kelemahan kualitas produk termasuk desain.
- e. Kelemahan sikap dan motivasi berwira usaha.
- f. Kelemahan jaringan antar pengusaha sejenas atau pelaku ekonomi lain.

Desain Industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan bahwa suatu negara industri akan mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai prioritas utama ekspor dan devisa bagi negaranya.

¹³⁷ Sutoyo, Dalam Revisord Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, Hal. 55

¹³⁸ *Usaha Kecil Miliki Delapan Kelemahan*, Suara Merdeka 3 Oktober 2002, hal 7

Dalam memacu persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, mutu, harga suatu produk sangat penting. Namun yang tak kalah pentingnya Desain Industri sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan antara satu produk dengan produk lain dan juga sebagai batasan baru bagi persaingan di bidang industri dilihat dari Desain Industrinya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru hasil industri kerajinan dan industri-industri tradisional. Oleh karena itu pengusaha kecil perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam undang-undang ini.

Dengan melihat begitu pentingnya harga suatu desain dalam bisnis perdagangan maka hal tersebut perlu didaftarkan meskipun ada sebagian desain industri yang sudah didaftarkan masih ada yang menirunya, namun hal ini dalam upaya memperoleh perlindungan hukum masih ditemukan hambatan. Namun demikian upaya untuk melakukan pendaftaran tetap diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi karya desain itu sendiri yang benar-benar merupakan hasil kreatifitas tinggi, inovasi dan pengembangan para pembuat suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Dengan maksud agar tetap lebih bergairah dalam berkarya dan sekaligus sebagai penghargaan kerja keras yang telah menghasilkan karya desainnya.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal di sini akan disampaikan mengenai faktor-faktor yang berasal dari selain dari diri pengrajin sendiri

- a. Yuridis, Bahwa pengaturan Desain Industri merupakan hal yang baru. dimana dalam UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri diharuskan adanya upaya pendaftaran agar desain industri dapat dilindungi dari pihak-pihak lain yang akan meniru hasil ciptaan desain industri tanpa seizin pemilik/pemegang hak atas desain industri.
- b. Kurangnya sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya Desain Industri, Peranan Pemda untuk melindungi hasil kerja seni tradisional masyarakat Jepara yang sudah menjadi milik masyarakat [publik]. Perlu upaya pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual [HKI] khususnya UUDI No 31 Tahun 2000, disamping itu diperlukan inventarisasi terhadap karya-karya seni tradisional agar pihak lain atau pihak asing tidak mudah

mengambil alih hak-hak atas kekayaan intelektual milik masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan masyarakat umum lainnya.

- c. Sosiologis, Sejak 1 Januari 2000, ketentuan mengenai *TRIPs* berlaku penuh di Indonesia sehingga diperlukan adanya peraturan pelaksanaan lebih lanjut terhadap Desain Industri. Disamping Hak Kekayaan Intelektual Pemerintah perlu melindungi dan menghargai pemilik/pemegang hak atas Desain Industri.
- d. Terdapat faktor-faktor dari ketentuan UUDI No 31 Tahun 2000 sendiri .

Di dalam ketentuan UUDI No 31 Tahun 2000, terdapat ketentuan-ketentuan yang memiliki pemahaman yang tidak menguntungkan bagi para desainer khususnya bagi Usaha Kecil Menengah yang pada akhirnya menimbulkan hambatan sendiri dalam pelaksanaan perlindungan hukum Desain Industri,

- a. UUDI No 31 Tahun 2000 menentukan syarat kebaruan [*novelty*] bagi Desain Industri yang akan diajukan permohonan pendaftaran atas Desain Industrinya. Hal ini diatur Pasal 2 ayat 1 UUDI No 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa: Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Syarat kebaruan [*novelty*] ini merupakan syarat

yang berat dirasakan bagi para pengrajin dari kalangan Usaha Kecil Menengah, dikarenakan syarat kebaruan [*novelty*] ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan proses pemikiran yang panjang dan tentunya memerlukan dana yang besar untuk bisa di kategorikan desain tersebut adalah baru, hal ini tentu saja akan mengakibatkan pengajuan kepemilikan hak desain industri dari para pengusaha kecil dan menengah akan kandas ditengah jalan, yang selanjutnya akan mengakibatkan kepemilikan hak atas desain industri akan hanya dimonopoli oleh pengusaha besar.

- b. Ketentuan pendaftaran Pasal 10 UUDI No 31 Tahun 2000 disebutkan bahwa “Hak Desain Industri atas dasar permohonan”, dari hal tersebut dapat disebutkan bahwa keberadaan Desain Industri menimbulkan Hak Desain Industri, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5. Hal ini karena sebelumnya dalam sebuah komunitas pengrajin dari sebuah produk desain industri para pengusaha kecil dan menengah ditemukan ratusan bahkan ribuan desain industri yang diproduksi secara massal, sehingga tidak diketahui secara pasti desainer pertama kali yang menciptakan desain tersebut, dan pada akhirnya mengakibatkan “perang” klaim atas Desain Industri maupun tuntutan peniruan Desain industri akan marak

di pengadilan dan dikhawatirkan masalah ini akan menjadi masalah baru yang cukup rumit.

- c. Dalam ketentuan Pasal 29 UUDI No 31 Tahun 2000 disebutkan mengenai “Sertifikat Desain Industri” tetapi ternyata yang dikeluarkan adalah “Surat Desain Industri”. Tindakan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang, penyimpangan ini disebabkan karena pengaruh sistim paten yang telah memenuhi persyaratan dan diterima permohonannya. Walaupun sebagian memetik persyaratan kebaruan untuk setiap desain Industri yang dapat didaftar yang juga terdapat dalam sistim paten namun sistim desain Industri lebih dekat pada sistim Hak Cipta yang tidak menerapkan pemeriksaan substansi terhadap setiap pendaftaran yang diterima oleh Direktorat itu.

3. Beberapa Alternatif /Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Masalah Pendaftaran Desain Industri Mebel Ukir

Dalam mengatasi masalah pendaftaran Desain Industri khususnya pada desain mebel ukir, maka dapat dilakukan berbagai upaya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pensosialisasian UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa para pengusaha/pengrajin meubel di Kabupaten Jepara belum pernah mendaftarkan hak atas Desain Industri mebel kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Adapun alasan yang dikemukakan dengan beragam antara lain belum mengetahui adanya Undang-Undang yang khusus mengatur desain industri, di samping itu mereka belum mengerti bagaimana proses permohonan pendaftaran atas hak desain yang mereka buat.

Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dilakukan upaya pemasyarakatan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha/pengrajin meubel. Langkah sosialisasi Undang-Undang Desain Industri sangat penting dimasykaratkan mengingatkan undang-undang tersebut masih baru, yaitu baru disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 20 Desember tahun 2000.

Hal ini mengakibatkan masyarakat belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Desain Industri tersebut. Untuk itu diperlukan dari pemerintah dan aparatnya memberikan penyuluhan seminar, pertemuan-pertemuan dalam bentuk diskusi untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masy pemilik, pemegang hak atas desain industri yang dimiliki, sehingga mereka mengerti hak dan

kewajibannya sebagai pemilik, pemegang dan pemakai dari hak atas desain industri tersebut.

Peningkatan kesadaran para pengusaha kecil dan menengah terhadap perlindungan hukum Desain Industri sangat sulit dilakukan jika dibandingkan dengan usaha non Usaha Kecil Menengah, untuk itu harus dibantu oleh segenap pihak yang terkait, yang dekat dengan Usaha Kecil Menengah seperti, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM]. LSM, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam melaksanakan sistem hak kekayaan intelektual nasional. Kerjasama pada tingkat nasional ini juga secara tidak langsung melakukan *institution building* dengan lahirnya berbagai sentra, klinik dan pusat studi hak kekayaan intelektual pada berbagai departemen, yayasan dan perguruan tinggi.

Kegiatan yang dihasilkan dari kerjasama di atas bermuara pada terbantunya langkah untuk mendorong lebih berkembangnya kesadaran masyarakat termasuk kelompok Usaha Kecil Menengah. Prinsip dasar peningkatan kesadaran masyarakat adalah **demistifikasi**¹³⁹, yakni bahwa hak kekayaan intelektual bukanlah sesuatu yang sakral, yang bukan untuk masyarakat biasa. Hak kekayaan intelektual adalah urusan kehidupan sehari-

¹³⁹ A Zen Purba, *Sistim Hak Kekayaan Intelektual dan Kaitannya dengan UKM*, Makalah Seminar Disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001, hal 4.

hari. Kegiatan diskusi pada hari ini merupakan wujud dari program peningkatan kesadaran masyarakat.

b. Peran Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jepara

Industri mebel di Kabupaten Jepara merupakan usaha yang sudah lama ada, dan merupakan usaha yang turun temurun, baik dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh kelompok usaha keuangan. Para pengusaha/pengrajin mebel Jepara dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengusaha/pengrajin mebel yang tergolong kecil [tradisional], menengah dan tergolong besar.

Pengusaha/pengrajin yang tergolong tradisional ciri yang menonjol adalah dengan menjalankan usahanya dengan melakukan sendiri sebagai home industri, tidak memiliki izin usaha dan tidak berbadan hukum. Sementara yang tergolong menengah mempunyai ciri merupakan usaha home industri memiliki izin usaha dan tidak berbadan hukum. Sedangkan pengusaha yang tergolong besar jumlahnya sangat terbatas, ciri yang menonjol adalah berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

Dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap desain-desain mebel yang bersifat klasik, dimana selama ini dianggap sebagai produk budaya dan milik masyarakat secara komunal, perlu peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten untuk melakukan pencatatan dan pendataan karya-karya tradisional dan selanjutnya dapat

didaftarkan, hal ini dilakukan agar menjaga pihak-pihak lain atau pihak luar negeri yang akan melakukan peniruan atau penjiplakan karya-karya tradisional, sehingga ada jaminan perlindungan dan mempertahankan kesakralan karya-karya seni tradisional dapat dipertahankan khususnya terhadap karya desain industri meubel di Kabupaten Jepara. Pemerintah Daerah harus mampu menjaga dan mengamankan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat Jepara khususnya bagi pengusaha/pengrajin desain mebel.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara akan menempatkan usulan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun anggaran 2003 untuk Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan alokasi dana Usaha Kecil Menengah di bidang Hak Kekayaan Intelektual belum ada.¹⁴⁰

c. Membuka Kantor Pendaftaran Desain Industri Di Daerah

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-80.PR.07.10 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual¹⁴¹ bahwa Pendaftaran Hak Cipta, Paten dan Merek dapat diajukan melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

¹⁴⁰ Wawancara dengan Noor Inayah, Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah 30 Oktober 2002.

¹⁴¹ Wawancara dengan Bambang Sulistyio Budi, SH, Kepala Bagian Pendaftaran HKI, Kanwil Kehakiman dan HAM, Tanggal 22 Oktober 2002

Manusia Semarang. Dalam hal ini belum termasuk pendaftaran Desain Industri. Ada kemungkinan pendataran Desain Industri di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah dimana hal ini hanya tinggal menunggu pendelegasian dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dari data empiris yang ditemukan bahwa para pengusaha/pengrajin mebel belum pernah mendaftarkan hak atas Desain Industrinya kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan berbagai alasan, diantaranya karena proses permohonan pendaftaran harus diajukan ke Jakarta, sehingga diperlukan tenaga, waktu dan biaya yang dapat dikatakan tidak sedikit.

Dengan telah dikenalnya kerajinan ukir [desain] kayu di Kabupaten Jepara di berbagai negara, terutama pada era perdagangan bebas tidak menutup kemungkinan adanya peniruan yang dilakukan pihak luar negeri, kondisi semacam itu belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan tapi harus merasakan bangga bahwa produk budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat Internasional, tapi pada sisi lain merasa prihatin karena bisa saja karena mereka yang pertama kali mengenalkan sehingga menutup kemungkinan mereka mengklaim sebagai pemiliknya.

Desain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah produk yang banyak dipasarkan pada konsumen, sering konsumen tertarik membeli sebuah produk karena desain yang menarik dari pada kegunaan barang tersebut. Tidak jarang pula para konsumen harus membayar suatu barang produk karena desain sebuah produk yang langka. Dengan demikian desain dapat dijadikan daya saing bagi perusahaan/pengusaha dalam persaingannya dengan produk yang lain dan sejenisnya.

Hal ini sudah sewajarnya apabila desain industri merupakan asset perusahaan yang patut mendapat perlindungan hukum. Bagaimanapun juga suatu desain memerlukan tenaga, pikiran, waktu dan tidak jarang membutuhkan tenaga/biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diupayakan agar desain tersebut tidak mudah jatuh ke tangan pihak lain, termasuk di dalamnya melindungi dari peniruan/penjiplakan oleh pihak lain.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan masalah pendaftaran hak atas desain industri dapat dilakukan di Wilayah Propinsi. Hal ini sangat perlu dan membantu para pemilik, pemegang hak atas desain yang diciptakan tidak perlu lagi datang ke Jakarta, sehingga masalah tenaga waktu dan biaya yang diperlukan menjadi berkurang.

d. Perjanjian Lisensi Untuk Menghindari Pelanggaran Desain Industri

Sama halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, hak atas Desain Industri sebagai hak kebendaan immaterial dapat beralih dan di peralihkan. Desain industri sebagai hak milik dapat dialih tangankan baik

dengan cara : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang [Pasal 31 UUDI No. 31 Tahun 2000].

Selain berhak untuk mengalihkan hak atas Desain Industri, pemilik juga berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan desain industri miliknya berdasarkan perjanjian lisensi, kemutlakan hak eksklusif yang mengandung hak monopoli dapat dikurangi dengan diberikannya kesempatan penggunaan suatu desain industri yang terdaftar oleh pihak lain yakni dengan menerima lisensi [*Licensee*].

Hal ini berarti terbuka kemungkinan bagi setiap orang atau badan hukum lain untuk melakukan usaha dengan menggunakan Desain Industri yang sudah terdaftar, mereka tidak perlu melakukan pelanggaran desain industri seperti peniruan, penjiplakan, menjual, mengimport, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, tapi dapat meminta izin pada pemilik desain industri untuk menggunakan desain industri tersebut melalui perjanjian lisensi. Dengan cara ini pemilik desain industri dan masyarakat lainnya sebagai konsumen tidak dirugikan dan terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri juga dapat dihindari.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian Lisensi Desain Industri yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalm daftar Umum Desain Industri para Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan biaya sebagaimana diatur dalam [Pasal 35 ayat 1 UUDI No 31 Tahun 2000].
- 2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga [Pasal 35 ayat 2].
- 3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1 diumumkan dalam berita resmi Desain Industri.
- 4) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ini diatur dalam [Pasal 36 ayat 1].

Dari beberapa hal yang tersebut diatas, untuk point satu sampai dengan tiga adalah ketentuan Undang-Undang yang bersifat sebagai pelengkap, Dalam hal ini jika para pihak tidak menentukan lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang. Sedangkan untuk point empat yakni harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian dan jika tidak, maka Kantor Direktorat Hak Kekayaan Intelektual diwajibkan untuk menolak permintaan pencatatan perjanjian tersebut dengan mengemukakan alasannya.

Dikarenakan tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang standarisasi perjanjian Lisensi sangat menyulitkan para pihak nantinya karena tidak ada pedoman yang dijadikan patokan dalam membuat perjanjian. Hal ini memungkinkan terjadinya penolakan oleh Kantor Hak Kekayaan Intelektual dengan alasan yang berbeda-beda dan tidak jelas, atau bahkan dapat pula dipakai sebagai alasan untuk menolak perjanjian yang tidak diinginkan. Hal seperti ini akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif atau bahkan dapat menghambat lalu lintas perdagangan.

e. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dibedakan dalam penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan penegakan hukum secara represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan umum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme peradilan maupun mekanisme diluar pengadilan.

Mengacu kepada makna penegakan hukum tersebut, maka instrumen penegakan hukum dapat pula diklasifikasikan berdasarkan instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan instrumen penegakan hukum yang bersifat represif. Instrumen penegakan hukum

yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.

Di samping itu instrumen penegakan hukum yang bersifat represif meliputi juga upaya-upaya non represif dari aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam mendorong masyarakat menaati aturan-aturan hukum yang berlaku. Instrumen penegakan hukum secara represif meliputi penjatuhan sanksi administrasi untuk pelanggaran ketentuan hukum administratif, penjatuhan sanksi keperdataan berupa melaksanakan kewajiban hukum tertentu untuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana [tindak pidana]. Untuk pelanggaran kaidah keperdataan dimungkinkan menggunakan sengketa alternatif [*alternative dispute resolution*] seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan rekonsiliasi.

Tersedianya penyelesaian sengketa hak desain industri melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif merupakan kebijakan yang tepat karena model seperti ini juga putusan arbitrase dan

penyelesaian sengketa alternatif merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat [*final and binding*].

Instrumen penegakan hukum yang tersedia dalam Undang-Undang Desain Industri untuk melindungi hak desain meliputi instrumen hukum administratif, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Selain itu dibuka pula peluang penyelesaian model arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif di luar mekanisme peradilan¹⁴²

Secara pidana, berbeda dengan Jerman dan Korea Selatan yang menerapkan delik aduan terhadap pelanggaran desain industri, Indonesia menerapkan delik biasa terhadap pelanggaran desain industri. Yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan sumber daya manusia para penyidik baik polisi maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan saran untuk penegakan hukum itu masih sangat terbatas. Hal lain yang sangat mendasar, adalah karena sistem Hak Kekayaan Intelektual termasuk UU Desain Industri, adalah termasuk hak perdata yang sesungguhnya negara tidak perlu terlalu jauh mencampurinya, kecuali pihak yang dirugikan melaporkannya. Selain itu, dalam realitanya di negara-negara yang menjadi pelapor penerapan Hak Kekayaan

¹⁴² Salman Luthan, *Instrumen Penegakan Hukum dan Desain Industri*, Rahasia Dagang, DTLST, Yogyakarta 4 Oktober 2000, Hal 4

Intelektual ternyata masalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual lebih diselenggarakan secara perdata dan bukan pidana¹⁴³

Jika delik biasa yang akan diterapkan dalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual maka Pemerintah Polisi dan Pejabat Pemerintah Negeri Sipil harus pro-aktif melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran, apakah memperoleh laporan atau tidak. Apabila begitu banyak terjadi pelanggaran waktu tidak ada yang melaporkan dan begitu banyak terjadi pelanggaran waktu tidak ada waktu tidak ada yang melaporkan dan pemerintah tidak melakukan tindakan tegas maka akan memperoleh kecaman dari pihak asing yang selama ini telah cukup banyak mengalami menjadikorban pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Keadaan itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah jika tidak tegas dan akan merosotkan posisi *watch list* pada tahun ini ke arah *priority watch list*. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan tindakan balasan terhadap ekspor produk Indonesia ke negara-negara industri mau setelah masa transisi Hak Kekayaan Intelektual terlewati dan Indonesia harus sudah menerapkan Hak Kekayaan Intelektual secara tegas¹⁴⁴.

¹⁴³ Insan Budi Maulana, *Kewenangan Polisi, Jaksa Dalam UU Desain Industri, Rahasia Dagang*, DTLST, Makalah Seminar, Yogyakarta 4 Oktober 2002, Hal. 3

¹⁴⁴ *Loc, Cit*, Hal. 3.

Mengenai penggunaan instrumen hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dilakukan dengan mengkriminalisasikan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kriminalisasi adalah kebijakan pembentukan undang-undang menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan terlarang [tindak pidana] menjadi perbuatan terlarang atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Ada beberapa perbuatan yang ingin dikriminalisasikan dalam Undang-Undang Desain Industri¹⁴⁵

Perbuatan yang ingin dikriminasikan ketentuan Pasal 55 Desain Industri menjadi tindakan pidanan Desain Industri ada 2 [dua] macam. **Pertama**, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 [tujuh] tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- [tiga ratus juta rupiah]. Perbuatan yang di larang berdasar ketentuan Pasal 9 adalah dengan sengaja dan tanpa hak membuat,, memakai menjual dan mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri.

Kedua, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 atau Pasal 33 di pidana dengan penjara paling lama 2 [dua] tahun dan denda paling banyak Rp.

¹⁴⁵ Salman Luthan, *Op. Cit.*, Hal. 5

45.000.000,- [empat puluh lima juta rupiah] . Perbuatan yang di larang menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 33 adalah menghapuskan nama pendesain dalam daftar desain industri dan Berita Resmi desain industri dibuat dalam hubungan dinas atau karena hak desain dialihkan. Tindak pidana tentang desain industri ini merupakan delik biasa.

Untuk mendukung dan efektif berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 ini diperlukan perangkat hukum yang lain yang segera diterbitkan demi efektifnya peraturan yang telah dibuat, perangkat hukum itu meliputi :

- 1) Rancangan Keputusan Menteri tentang Permohonan Pendaftaran Desain industri
- 2) Rancangan Keputusan Menteri tentang Permohonan Pendaftaran Desain industri.
- 3) Rancangan Pengaturan Pemerintah tentang Besarnya Biaya
- 4) Rancangan Keputusan Menteri tentang Tata Cara Pembayaran
- 5) Rancangan Keputusan Menteri tentang Lisensi
- 6) Rancangan Keputusan Menteri tentang Pemberian Salinan dan Petikan

Dengan diterbitkan perangkat hukum ini penegakan hukum di bidang Desain Industri akan terwujud dan dapat menjamin kepastian hukum. Beberapa Alternatif Mengatasi Masalah Pendaftaran.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak dengan waktu sangat terbatas. Dengan demikian diperlukan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang dapat bergerak cepat. Dengan UU Baru, kecuali bidang rahasia dagang, penyelesaian sengketa perdata dilakukan di Pengadilan Niaga. Untuk menopang hal ini dalam UU Baru juga diatur tentang hukum acara tersendiri seperti yang berlaku dalam kaitan dengan masalah kapailitan.

Selama ini praktis tidak ada gugatan perdata menyusul perkara pidana berkenaan dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual. Ini sangat disayangkan karena untuk kepentingan korban upaya hukum ini seyogianya ditempuh. Selain itu kasus-kasus semacam ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Dalam UU Baru diatur pula ketentuan untuk menggunakan sarana lain di luar pengadilan, misalnya melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Mengenai aparat penyidik UU Baru tetap memberikan kewenangan bagi pejabat tertentu di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual untuk bertindak selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS]. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengefektifkan PPNS untuk melakukan penyidikan dalam rangka pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tetapi kedudukan PPNS tidak dapat langsung menyerahkan perkara ke pengadilan. Secara normatif pertanyaan itu dapat dijawab dengan singkat : hal itu tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Undang-undang tentang KUHAP.

Pada hemat saya kalau kita ingin maju patut direnungkan. **Pertama**, sebagai wacana peningkatan upaya penegakan hukum. Pendapat ini sepenuhnya didasarkan perhitungan bahwa dalam era reformasi sekarang ini pihak kepolisian amat sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat untuk masalah-masalah yang lebih langsung menyentuh kehidupan masyarakat banyak dan umumnya berskala sangat besar, misalnya masalah perbankan, korupsi, dan lain -lain. **Kedua**, hal ini sejalan pula dengan pelaksanaan konsep kenegaraan yang benar, dimana polisi lah yang mengendalikan urusan keamanan negara, tidak lagi seperti pada masa lalu dimana polisi hanya merupakan pelengkap yaitu, misalnya cukup dengan memberikan kemungkinan bagi PPNS untuk menyerahkan penyidikannya kepada penuntut umum, disamping yang dilakukan oleh polisi sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Perlindungan Hukum Desain Industri di Kabupaten Jepara khususnya Desain Industri mebel ukir belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari Pemerintah Daerah, jika dibandingkan dengan upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di bidang lainnya [SDM, Manajemen, Permodalan, Akses terhadap teknologi, Distribusi dan pemasaran Produk, Kemitraan, Sarana dan Prasarana pendukung Usaha Kecil] dan mengingat potensi Usaha Kecil Menengah dan potensi perlindungan hukum Desain Industri yang cukup besar di Kabupaten Jepara, dengan alasan:

- a. 80% Responden [Tabel 3] belum pernah mengetahui tentang pentingnya Perlindungan Desain Industri sebagai salah satu upaya yang cukup berpengaruh untuk lebih memberdayakan potensi Usaha Kecil Menengah, dan ini dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi Desain Industri yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintah Kabupaten Jepara baru akan menetapkan anggaran tertentu di bidang Desain Industri dan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya sebagai salah satu upaya yang potensial dalam

memberdayakan Usaha Kecil Menengah pada Tahun anggaran APBD 2003

- c. Sosialisasi Desain Industri /Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya sebagai salah satu upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, baru menyentuh lapisan pengusaha besar saja dan belum menyentuh kalangan Usaha Kecil Menengah.

2. Faktor-faktor dominan yang menghambat para pengusaha/pengrajin mebel di Kabupaten Jepara dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan hukum terhadap Desain Industri mebel adalah disebabkan karena:

- a. Para pengusaha kecil Menengah belum mengetahui pemahaman tentang Desain Industri.
- b. Belum mengerti dan memahami manfaat secara ekonomis dan yuridis dari pendaftaran hak atas Desain Industri yang mereka ciptakan.
- c. Kurangnya sosialisasi tentang Desain Industri dari Pemerintah Daerah dan berbagai pihak yang terkait.
- d. Pengaruh konsep budaya [komunal] yang melekat pada konsep berpikir Usaha Kecil Menengah.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk bisa memberikan perhatian yang maksimal terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Perlindungan Hukum Desain Industri, mengingat potensi Usaha Kecil Menengah yang besar jika dibandingkan dengan Usaha yang berskala besar untuk menjadi masa depan bangsa dan potensi yang luas dalam perlindungan Desain Industri serta Hak Kekayaan Intelektual pada khususnya, serta keberadaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang baru disahkan dan berlaku efektif pada tanggal 30 Desember tahun 2000 sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya para pengrajin mebel di Kabupaten Jepara masih sangat terbatas.
2. Upaya pendaftaran Desain Industri untuk dapat dilakukan di wilayah Propinsi, seperti yang sudah ada yaitu pendaftaran hak cipta, paten dan merek, yang dapat diajukan ke kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sehingga memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran Desain Industri.
3. Kemungkinan penerapan usaha yang lebih pro aktif dari pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui perlindungan Desain Industri, seperti “program jemput bola” misalnya, terhadap desain mebel ukir dari Usaha Kecil Menengah khususnya.

4. Alternatif yang digunakan oleh para Usaha Kecil Menengah pengrajin mebel ukir untuk mengatasi masalah belum didaftarkannya hak atas Desain Industri yang mereka ciptakan adalah dengan menjaga dan meningkatkan hubungan yang baik dengan rekan bisnisnya, baik dengan adanya saling percaya mempercayai dan memberikan iklim usaha yang kondusif. Namun demikian upaya untuk melakukan pendaftaran Desain Industri tetap harus dilakukan sebagai langkah untuk melindungi suatu desain dari suatu produk yang akan membedakan dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum khususnya bagi para pendesain itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwilaga, Rizki, 4 Oktober 2000, *Penyalahgunaan Desain Produk Industri dan Rahasia Dagang Bagi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat, Yogyakarta*, Makalah Seminar "Implementasi UU Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST.
- Affendi, Yusuf, 30 Juni 1997, *Peranan Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Desain Industri Kriya-Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*, Makalah Seminar-Pekan Seni 1997 IKJ.
- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit goods.*
- Basri, Faisal, 2002, *Nestapa UKM Jangan Cuma Sekadar Retorika Politik*, www.kompas.com.id,
- Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- ————, *Demografi*, Februari 2002, www.kabjepara.com,.
- Daud, Danny, Setiana, *Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Periode Pelita VII : Membangun Struktur Industri Yang Kokoh Dan Seimbang*, www.ekonomirakyat.org,
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedilah, R, 1993, *Hak Milik Intelektual [Sejarah, Teori dan Perkembangannya di Indonesia]*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhamad, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ————, *Diberlakukannya UU Desain Industri Bagi Pendesain/Pengrajin Dan Industri Kecil di Indonesia*, 2002 www.ristek.go.id,
- ————, *Ekonomi Kerakyatan Cuma Retorika?*, Harian Kompas 7 Oktober 2001, dalam www.jps.or.id,
- Gambiro, Ita, 1992, *Desain Produk Industri*, CV. Gramedia Offset, Jakarta.

- Gambiro, Ita, *Hak Milik Industri dan Alih Teknologi*, Prisma, Jakarta.
- Gautama, Sudargo dan Winata Rizawanto, 2000, *Hak Atas Kekayaan Intelektual [HAKI] Peraturan Baru Deain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Groves, Peter, 1991, *Copyright and Designs Law*, Graham & Trotman, London, 1991, hal 97, Dalam, Muhamad Djumhana dan R Djubaidilah, *Hak Milik Intelektual [Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia]*, 1993, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamad Ibnu, 1995, *Yang Kuatpun perlu dukungan yang Lemah, Dalam Membangun Kemandirian Indonesia: Dari Penggalan Nilai-Nilai Menuju Penataan Kelembagaan*, Forum Dialog Indonesia, Jakarta,
- Hartonegoro, Timbul, Ori, 2001 *Pembinaan Dan Pengembangan Desain Indusri Bagi UKM di Jawa Tengah*, Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah satu Aset Perusahaan, Kerjasama Klinik HaKI FH UNDIP, JICA [Japan International Coopertion Agency], Business Forum AOTS Dosokai Indonesia, Semarang.
- Hersugondo, 1999, *Pengembnagan Usaha Kecil Yang berdaya saing: Antara Kendala dan Peluang*, Gema STIKUBANK, Edisi 31 No III /Juni, Semarang.
- IASTP Phase II, *Short Course in Intellectual Property Rights 9 Elementary*.
- Jafar, Muhamad, Hafsa, *Kemitraan Usaha; Konsepsi dan Strategi*, Sinar Harapan, Jakarta, Jakarta.
- Jahisa, Zainudin, 14 Februari 2002, *Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek*, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Kejasama Japan Institute of Invention and Innovation [JIII/APIC], Yayasan Klinik HaKI [IP Clinic], Pusat Pengembangan dan Pelayanan HaKI LPKwu UNS

- [P3HaKI LPKwu UNS], Asosiasi Alumni *JIII* Indonesia, FH UII, FH UNDIP, Surakarta.
- Juoro, Umar , 2001, *Pemerintah mengabaikan UKM*, www.bmtlink.web.id.
 - , 2002, *Jumlah permohonan Desain Industri*, www.dgip.go.id,
 - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
 - Khairandy, Ridwan, 1996, *Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual Jilid I*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
 - Kesowo, Bambang, 15 Desember 1994, *Pengantar Umum HAKI di Indonesia*, Kerjasama FH UNDIP & Setneg RI, Semarang.
 - Kastowo, C, 1 Maret 1997, *Strategi dan Kesiapan Indonsia, Kebijaksanaan Perdagangan Internasional, Beberapa Catatan mengenai Penanaman Modal dan Milik Intelektual Indonesia*, Seminar WTO, Mekanisme Perdagangan Internasional, Antar Peluang dan Tantangan, Serta Kesiapan Indonesia, FH Atma Jaya Yogyakarta.
 - , *Kementrian Riset Luncurkan Oleh Desain [Program Insentif Perolehan Desain Industri]*, www.ristek.go.id, Februari 2002.
 - Keppres No 61 Tahun 1998 Tentan Lembaga Pembiayaan.
 - Kepmenkeu No 1251/KMK.013/1998 Tentang Tata Cara Lembaga Pembiayaan.
 - Kompas, 06 Maret 2002, *Sampai Kapan UKM Teraniaya... ?*
 - Kompas, 07 Maret 2002, *Adakah Kepentingan Politik Dibalik Masalah PKPS dan UKM?*
 - Laksmi, Isworo , 2002 *UKM Bali Diuntungkan oleh Ketenarannya*, www.Kompas.com.id,
 - Luthan, Salman, 4 Oktober 2000, *Insrumen Penegakan Hukum Desain Indsutri, Rahasia Dagang, DTLST*, Yogyakarta

- M, Jhon, Echols dan Sadly Hasan, 1996, *Kamus Bahas Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bill Morrow, *Tourism, Batik and Pashion : Intelektual Property Rights Issue*, 2-6 November 1997, Makalah Conferensi Internasional Haki, Yogyakarta.
- Makalah Seminar 12 Juni 2001, *Pelaksanaan Sosialisasi HaKI Bagi Para Pengusha UKM di Wilayah Jawa Tengah*, Kerjasama Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah dan Klinik HaKI FH UNDIP.
- Maulana, Budi, Insan ,2002, *Undang-Undang Desain Industri dan Merek Qua Vadis*, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Kejasama Japan Institute of Invention and Innovation [JIII/APIC], Yayasan Klinik HaKI [IP Clinic], Pusat Pengembangan dan Pelayanan HaKI LPKwu UNS [P3HaKI LPKwu UNS], Asosiasi Alumni JIII Indonesia, FH UII, FH UNDIP, Surakarta.
- Insan Budi Maulana, *Kewenangan Polisi, Jaksa Dalam UU Desain Industri, Rahasia Dagang*, DTLST, Makalah Seminar, 4 Oktober 2002, Yogyakarta
- Madiantono, Februari 1999, *Identifikasi Komoditi Unggulan Produksi Usaha Kecil di Jawa Tengah*, Gema STIKUBANK, Edisi XXXI
- Manajemen Usahawan Indonesia, No 11, November 1997
- Maskur Ali, September 1998, *Penggalangan Dana, Model Institusi Syariah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan, Usaha Kecil*, Gema STIKUBANK.
- Marbun, BN, 1993, *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil Mengapa ribuan perusahaan Kecil rontok setiap tahun*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum [Suatu Pengantar]*, Liberty, Yogyakarta.

- Mubyarto, 1999, *Reformasi Sistem Ekonomi Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Nasution, S, 1996, *Metode Penelitian Naruralistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, Muslim, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat: Tujuan Proses Pengembangan Masyarakat yang Dibangun di atas Realits*, Jurnal Studi Pembangunan Vo 2 No 1 Pasca Sarjana ITB, Bandung.
- Nasir, Moch, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- —————, 2001 *Niat Menolong UKM, Malah Jadi Momok*, www.Kompas.com.id,
- Pratomo, Prieyo, 2001, *Penilaian Dan Manajemen Desain Industrial Dalam Skala Usaha Kecil Dan Menengah* Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu Aset Perusahaan, Kerjasama Klink HaKI FH UNDIP, Bisines Forum AOTS Dosokai Indonesia dan Japan International Cooperation Agency [JICA], Semarang.
- Prajudi, S, Atmosudirjo, 1990, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- —————, *Produk*, November 2002, www.jepara.go.id.
- Pardede, Marulak, 2000 *Aspek Hukum Pemberdayaan Pengusaha Kecil*, Newsletter No 41/VI/Juni, Semarang.
- —————, *Pengertian Aset Intelektual*, www.ipr.itb.ac.id, 6 November 2002.
- —————, *Peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia ke 26 April 2002*, www.dgip.go.id,
- —————, *Pemerintahan*, Februari 2002, www.pemkabjepara.com.
- PP No 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.
- PP No 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Usaha Kecil.

- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ramli, Rizal ,1995 *Transformasi Ekonomi dan Dualisme Kebijakan*,
Makalah Seminar, UGM Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, *Supremasi Hukum Yang Benar*, Kompas, 12 Juni, 2002
- , *Restrukturisasi Kredit UKM untuk yang Berpotensi Usaha*,
Pemotongan Utang adalah Ongkos Krisis, 2001 www.bmtlink.web.id,
- S, Onny, Priyono dan AMW, Pranarka, 1996, *Pemberdayaan, Konsep*,
Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta.
- Santosa, Budi, 2000, Makalah Seminar Nasional Implementasi UU Desain
Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
Perlindungan Atas Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Syaipudin, Hetifah, dkk, 1995, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*,
Yayasan Akatiga, Bandung.
- Satriagung, Erlangga, 2001, *JICA Bantu Berdayakan 10 Cluster UKM*,
www.bmtlink.web.id,
- Satjipto Raharjo, *Supremasi Hukum Yang Benar*, Kompas, 12 Juni, 2002
- Seda, Frans, 1996, *Kekuasaan dan Moral, Politik Ekonomi Masyarakat*
Indonesia Baru, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siregar, F Ade, 2001, *Upaya Membantu Usaha Kecil Memperluas Jaringan*
Bisnis, www.bmtlink.web.id,
- Soekanto, Soerjono, 1991, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas
Indonesia [UI PRESS], Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanintjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan*
Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sutoyo, Dalam Revisi Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, 1997, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soroso, PC.dkk, 1997, *Perekonomian Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta,
- Sutrisno, Nandang, 4 Oktober 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST, Makalah Seminar*, Yogyakarta.
- Suara Merdeka, 29 Oktober 2002, *Dijadikan Komoditi Politik, CDSMEs Tawarkan Bantuan*.
- Sumarto Adi, Harsono, *Hak Intelektual Khususnya Paten, Merek*, Akademika Persada, Jakarta.
- Sunaryati, Hartono, C.F.E, 1994, *Penelitian hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke 20*, Alumni.
- Tempo, 2002, *Langkah Baru Penyelamatan si Kecil*.
- Timbul Ori Hartonegoro, 6 September 2001 *Pembinaan Dan Pengembangan Desain Industri Bagi UKM di Jawa Tengah*, Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah satu Aset Perusahaan, Kerjasama Klinik HaKI FH UNDIP, JICA [Japan International Coopertion Agency], Business Forum AOTS Dosokai Indonesia, Semarang.
- Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, Juli 1998, *Model Pengembangan Hukum Ekonomi*, ELIPS.
- ————, *Usaha Kecil Miliki Delapan Kelemahan*, Suara Merdeka 3 Oktober 2002.
- Undang-Undang No 12 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 7 Tahun 1987 Jo Undang-Undang No 6 Tahun 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No 9 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tentang Usaha Kecil
- Undang-Undang No 31 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 243 Tentang Desain Industri

-Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 85 Tentang Hak Cipta.

—, *UU Desain Industri Ancam Kelangsungan UKM Akibat minimnya Dana UKM Untuk Pendaftaran Desain Industri*, 2001, www.Pikiranrakyat.com.id,

-UKM Ciri Ekonomi Kerakyatan, 13 Mei 2002 www.Kompas.com,

-Warjono, Desember 1996, *Beberapa upaya pengembangan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi pada pengusaha kecil*, Gema Stikubank, Semarang.

-Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

-Zen, A, Umar Purba, 20 November 2001, *Perindungan dan Penegakan Hukum HaKI*, Makalah Pelatihan Teknis dan Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Makasar, dalam www.dgip.go.id.

-Zen, A, Umar Purba, 18 November 2002, *Sistim HAKI Nasional dan Otonomi Daerah*, Seminar Nasional, Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKI, JIII, APIC, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, didukung oleh JPO dan Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado, dalam www.dgip.go.id.

-Zen, A, Umar Purba, 7 November 2001, *Sistem Hak Kekayaan Intelektual Dan Kaitannya Dengan UKM*, Disampaikan pada acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta.